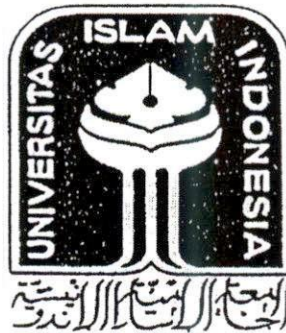


STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM EKONOMI ISLAM
DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALIS



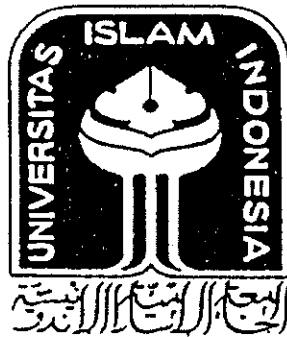
Oleh:
Nihayatul Masykuroh
NIM: 2011118

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2005

STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALIS



Oleh:
Nihayatul Masykuroh
NIM: 2011118

Pembimbing
Prof. Dr. H. M. A. Tihami, MA., MM

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2005



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 41/PS-MSI/Peng./III/2006

TESIS berjudul : **STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM EKONOMI ISLAM
DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIAL**

Ditulis oleh : Nihayatul Masykuroh

N. I. M. : 2011118

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.



Yogyakarta, 6 Maret 2006

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Dra. Nihayatul Masykuroh
Tempat/Tg.lahir : Serang, 12 Pebruari 1964
N. I. M. : 2011118
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : **STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTIM EKONOMI
ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALIS**

Ketua/Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA. (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A, MM. (.....)
Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, M.S. (.....)
Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Pebruari 2006

Pukul 11.00 - 12.00 WIB

Hasil/Nilai : 86/ A

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Mengetahui
Ymt. Direktur Program Pascasarjana UII

Dr. Ir. Edy Purwanto, DEA.



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 223/PS-MSI/ND/II/2006

TESIS berjudul : **STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIAL**

Ditulis oleh : Nihayatul Masykuroh

NIM : 2011118

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 Pebruari 2006

Ketua Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. (0274 – 523637)

PERSETUJUAN

TESIS Berjudul : STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM EKONOMI
ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS
DAN SOSIALIS
Ditulis oleh : Dra. Nihayatul Masykuroh
No. Peserta : 2011118
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diajukan di Dewan Penguji pada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, Desember 2005
Pembimbing

Prof. DR. H.M.A. Tihami, M.A.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALIS

NAMA : NIHAYATUL MASYKUROH
NIM : 2011118

ABSTRAK

Sampai tahun 50-an, di dunia hanya dipenuhi pertentangan ideologi antara kapitalisme dari satu pihak dan komunisme dipihak lain, kedua kubu, dengan pertentangan mati-matian berpangkal pada satu falsafah hidup yang dinamakan materialisme (falsafah kebendaan), seolah-olah manusia melupakan bahwa dibalik materi yang diperjuangkannya, masih ada kekuatan gaib yang harus diyakini dan ditakuti yaitu tuhan yang maha esa.

Munculnya system ekonomi kapitalisme dan sosialis ditengah masyarakat dengan beberapa prinsip yang dimiliki masing-masing, memiliki kelebihan dan keukarannya. Ekonomi kapitalisme cenderung berorientasi pada pertumbuhan sebagai tujuan dalam mencapai kemakmuran individual bukan kemuakmuran masyarakat, sedangkan ekonomi sosialis lebih mengedepankan pada aspek kolektivisme. Kehadiran ekonomi Islam mempunyai nuansa tersendiri yang pada gilirannya diharapkan mampu menghapus ketidakadilan dan eksploitasi terhadap masyarakat.

Islam membawa falsafah tentang harta dunia yang menguasai sebagian faham manusia didunia, yaitu falsafah ketuhanan. Falsafah ini berbeda sekali dengan faham Universalisme dari gereja pada abad pertengahan yang lalu dan faham Individualisme yang biasa diartikan orang, salah satu sumbangan terbesar Islam. Kepada umat manusia yakni prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Adapun penelitian ini adalah studi literatur/konsep yang pembahasannya menggunakan metode deskriptif, komparatif dan analitik.

Setelah dilakukan penelitian secara konferhensif, ternyata penulis mendapatkan kesimpulan bahwa ada kelebihan/kekuarangan dari masing-masing sistem, yakni bahwa prinsip atau persoalan keadilan bila di kaitkan dengan aspek ekonomi baik kepemilikan, konsumsi dan distribusi pendapatan akan terlihat persamaan dan perbedaannya yang lebih unggul adalah Islam, yakni prinsip berkeadilan.

ABSTRACT

STUDY COMPARISON BETWEEN ECONOMIC SYSTEM of ISLAM WITH ECONOMIC SYSTEM of CAPITALIST AND SOCIALIST.

Name : Nihayatul Masykuroh
Register Number : 2011118

Until 50th Year, world only fulfilled by oppositions of ideology between capitalism from one side and other party communism, both of citadel, with opposition furiously have jetty at one named by life philosophy materialism (materialism philosophy), impressing human being forget that at the opposite of fought for items, strength there is still be occult which must believe and daunted that is the infinite which god.

Appearance of System economic of socialist and capitalism in the middle of society with a few principles had by each, owning excess and insufficiency him. Capitalism economics tend to orient at growth as target of in reaching individual prosperity non prosperity of society, while socialist economics more placing forward at aspect of collectivism. Attendance of economics of Islam have separate nuance which is on its innings is expected can vanish exploitation and injustice to society.

Islam brings philosophy about estae a world of mastering some of human being understanding in world, that is the infinite philosophy. This philosophy differ once with understanding of universalism of church at last middle ages and understanding of individualism which is ordinary to be interpreted by people, one of the biggest contribution of Islam. To mankind namely justice principle and its execution in each; every human life aspect.

As for this research is literature study / concept which its solution use descriptive method, comparative and is analytic.

After done by research by comprehensive, in the reality writer get conclusion that there is excess / lacking of from each system, namely that principle or problem of justice if related to economic aspect of goodness ownership of, earnings distribution and consumption will seen equation and difference which more pre-eminent is Islam, principal namely with justice.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah Swt., tesis yang berjudul *Studi Perbandingan antara Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis* ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tesis ini, tentu saja dukungan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak sangat berarti, sehingga akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan.

Untuk itu, dengan tulus penulis menyampaikan terima kasih tidak terhingga kepada:

- ◆ Ayah Bunda, Prof. DR. H.M. Junus Gozali dan Hj. Mamduchah, atas segala yang setelah diberikan kepada ananda selama ini, semoga diberikan pahala yang setimpal dari Allah Swt.
- ◆ Suamiku yang terkasih, dr. Hikmat Sumantri, dan anak-anakku tersayang, Afiyatul Mardiyah dan Subaihatin Nur Rahmadini, atas segala dukungan, doa dan perhatian yang telah diberikan, sehingga dapat menyelesaikan studi bahkan tesis ini.
- ◆ Bapak DR. Ir. Luthfi Hasan MS selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
- ◆ Bapak Prof. DR. H.A. Amir Mu'alim, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Studi Islam yang telah menyetujui pembahasan tesis ini.
- ◆ Bapak Prof. DR. H.M.A. Tihami, M.A, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah mengoreksi, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga tesis ini bisa selesai.
- ◆ Dosen pengajar, staf akademik dan perpustakaan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
- ◆ Teman-teman seperjuangan, terutama Sdr. Asep Furqonuddin, S.Ag dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mengingatkan dan memotivasi dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya. Meski demikian, penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Desember 2005
Penulis,

Dra. Nihayatul Maskuroh
NIM. 2011118

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI
 No.158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tdak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
س	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-
هـ	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zāl	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-

ل	lām	l	-
م	min	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	hamzah	.	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء : ditulis *karamat ul-aulyā*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *a*, *i* panjang ditulis *i*, dan *u* panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*

F. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أنتم : ditulis *a'anikum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القران : ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

الشيعة : ditulis *asy-Syi'ah*

H. Huruf besar

Penulisan Huruf Besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per-kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGUJI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
D. Tela'ah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG SISTEM EKONOMI	
A. Pengertian Ekonomi dan Sistem Ekonomi	17
B. Macam-macam Teori Tentang Sistem Ekonomi	21
C. Prinsip-prinsip Dasar dan Tujuan Sistem Ekonomi	68

BAB III	ASPEK-ASPEK DALAM PRINSIP EKONOMI	
	A. Aspek Kepemilikan dalam Prinsip Sistem Ekonomi	91
	B. Aspek Konsumsi dalam Prinsip Sistem Ekonomi	113
	C. Aspek Distribusi Pendapatan dalam Prinsip Sistem Ekonomi	124
BAB IV	STUDI PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS DN SOSIALIS	
	A. Persamaan dan Perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis dan Sistem Ekonomi Islam	146
	B. Analisis Penulis tentang Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis Sistem Ekonomi Sosialis dan Sistem Ekonomi Islam	161
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	197
	B. Saran	198
DAFTAR PUSTAKA		



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai lapisan, baik individu maupun masyarakat. Berbagai macam penelitian telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Namun usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengetahui masalah ekonomi secara keseluruhan banyak menemui hambatan dan kegagalan. Sangat sedikit sekali keberhasilan yang diperoleh. Kebanyakan penelitian yang dihasilkan telah menyimpang jauh dari motivasi semula, sehingga menghasilkan tujuan yang sebenarnya. Di satu pihak ada pendapat yang menyarankan untuk mementingkan hak individu, sementara itu dipihak lain menolak keistimewaan individu.¹

Dewasa ini ada dua kubu teori ekonomi yang saling bertentangan yaitu sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Meskipun dalam masing-masing kategori besar ini sangat variatif. Namun sebenarnya mereka memegang asumsi-asumsi yang sama tentang manusia, masyarakat dan kegiatan ekonomi.² Keduanya yakin bahwa manusia

¹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Yogyakarta; Dana Bakti Wakaf, 1992), hal. 1.

²Nyang Sulaiman, *The Islamic State and Economic Development a Theoretical Analysis*, Islamic Culture, It. 1976, hal.10.

mampu dan harus mengatur kehidupan ekonominya tanpa kendala-kendala moral apapun dan ini sangat menyimpang dari Islam.

Al-Asal dan Karim dalam kitabnya *An-Nidzam Al-Iqtishasy fi Al-Islam Mabadihu Wahdafuhu* telah mengkritik system ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme. Kapitalisme dianggap terlalu banyak menonjolkan pada kepentingan khusus (individu) dari pada kepentingan umum yang ternyata telah banyak menimbulkan krisis dan meratanya pengangguran. Hal itu disebabkan melimpahnya produksi yang melampaui kebutuhan konsumsi, selanjutnya banyak industri tutup serta menyebabkan banyaknya kaum buruh yang menganggur.³

Adapun sistem ekonomi Sosialis merupakan pemberontakan terhadap sistem ekonomi Kapitalisme, dimulai oleh Karl Marx yang mengupas dan membahas Kapitalisme serta meramalkan keruntuhannya serta naiknya Sosialisme sebagai penggantinya. Menurut Marx, hal ini dikarenakan sistem ekonomi Kapitalisme telah sedemikian merajalela dan menimbulkan penderitaan dan kemelaratan buruh yang dihisap dan diperas serta adanya ketimpangan dan kesenjangan sosial.⁴

Namun menurut kenyataannya, pertarungan kedua sistem ekonomi itu di dunia menunjukan arah sebaliknya, yakni keruntuhan Sosialisme.⁵ Dampaknya terhadap Perkembangan ekonomi ialah gejala semakin diyakininya Kapitalisme sebagai dasar pembangunan beberapa negara. Tetapi para pakar ekonomi masih

³Al-Asal Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abd. Karim, *Sistem Prinsip dan tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Saefuddin, (Bandung; Pustaka Setia, 1999), hal. 33-35.

⁴Mukhtar Ahmad, *Tujuan Ekonomi Islam*, Jilid II, 1991, hal. 4.

⁵Nik Musthafa Hj. Nik Hasan, *Islam and Justice*, (Malaysia; Institut of Islamic Understanding, 1999), hal. 62.

melihat ketimpangan dan kemiskinan yang melanda kehidupan manusia di seluruh dunia serta guncangan ekonomi yang tidak teramalkan, termasuk di negara yang menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme itu sendiri.⁶

Salah satu contoh di Indonesia dalam bidang ekspor semenjak nilai tukar rupiah anjlok pada tahun 1998 sampai mencapai level Rp. 17.000,- idealnya depresiasi yang demikian besar ini secara teoritis mendorong ekspor Indonesia. Dengan kemerosotan nilai tukar, daya saing produk dari Indonesia meningkat, sehingga akan terjadi peningkatan permintaan produk barang dan jasa dari negara kita. Atas dasar pandangan teoritis demikian, maka tidak jarang secara sengaja suatu negara mendepresiasi mata uangnya yang dikenal dengan kebijakan evaluasi, guna mempertinggi daya saing produknya atau untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan (*Balance of Trade*) maupun transaksi berjalannya (*current account*) melalui devaluasi harga produk barang dan jasa suatu negara menjadi lebih murah dilihat dari sisi konsumen di negara lain, dan harga impor menjadi lebih mahal di mata masyarakat negara yang melakukan devaluasi.⁷

Lebih lanjut lahirnya sistem kehidupan ekonomi Kapitalisme di satu pihak dan Sosialisme di pihak lain merupakan bukti yang tidak terbantah tentang akibat penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sosial.

⁶*Ibid*, hal. 61

⁷Edi Suandi Hamid, *Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis dan Restrukturisasi Industri Serta Analisis Pasca Krisis*, Prospek Ekonomi Indonesia Pasca Krisis, diselenggarakan oleh Magister Manajemen dengan ISFI cabang Yogyakarta, (Yogyakarta, 19 April 1999), hal. 3-4.

Jika masing-masing tersebut sampai kini masih memperoleh dukungan dari pejuang-pejuangnya, maka kepentingan apa lagi yang lebih logis untuk diterima selain dari pada untuk menjaga nilai-nilai moral atau etika tersebut, yang mana filsafat ekonomi Kapitalisme berbasas pada Laissez Fair (bebas liberal) dan filsafat ekonomi Sosialisme/Marxisme adalah pertarungan kelas. Sedangkan filsafat ekonomi Islam yaitu Tauhid sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat 39 ayat 38.

Selanjutnya bagaimana implikasi-implikasi yang dapat ditimbulkan dari penerapan ilmu ekonomi yang diajarkan di lembaga pendidikan.⁸

Pola kehidupan Kapitalisme merupakan implikasi dari sistem kehidupan saat ini, maka tidak heran jika dewasa ini semakin banyak terlihat pudarnya nilai moral kehidupan bangsa yang sarat dengan nilai gotong-royong dari suasana religius akhirnya bermuara pada budaya permissive, hedonistic, kemiskinan ditengah kemakmuran yang tentu bertentangan dengan nilai kemanusiaan/moral agama.

Jika digambarkan akibat dari penerapan sistem ekonomi ini menimbulkan krisis ekonomi seperti di Indonesia, dimana lebih dari 100 juta rakyat Indonesia terjermus kedalam jurang kemiskinan dan hampir 20 juta orang menganggur, lebih parah lagi tak kurang dari 5 juta anak putus sekolah.

Jika pada abad 21 nanti seluruh negara di dunia harus memasuki apa yang mereka (Kapitalisme) katakan sebagai tata ekonomi baru melalui *World Trade Organization* (WTO) atau organisasi ini akan menguasai secara sempurna seluruh

⁸M Rusli Karim (Fd), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana, Yogyakarta P3EI, UII, 1992), hal. 1.

sektor perdagangan, perekonomian, moneter, perburuhan, pertanian, jasa keimigrasian dan perundang-undangan yang berkaitan dan semua yang ada di dunia ini. Dan seluruh negara-negara di dunia ini dipaksa untuk membuka seluruh pasarnya serta harus siap berkompetisi secara bebas dan terbuka tidak peduli apakah itu negara maju atau negara melarat. Keadaan ini memberi peluang yang lebih besar kepada golongan ekonomi kuat. Sehingga ketimpangan ekonomi dengan golongan ekonomi lemah semakin meningkat.⁹

Adapun sistem ekonomi Sosialis yang didasarkan pada materialisme dan kolektivisme bersifat materialisme yang sama dengan Kapitalisme, karena percaya pada faktor ekonomi sebagai faktor tunggal yang menentukan nasib manusia. Kolektivisme sebagai suatu pandangan terhadap organisasi ekonomi yang segala sesuatunya milik negara dan negara akan mengkoordinasi aktivitas ekonomi. Hal ini secara pasti bertentangan dengan sifat dasar organisasi sosial manusia. Ia tidak hanya gagal menjalankan secara keras tapi juga menghadapi bencana dan pada akhirnya harus roboh (gagal).

Di tengah krisisnya umat manusia saat ini yang memulai sejarah paling kritis tetapi kreatif yaitu sistem kontemporer yang bebas nilai (paham) Kapitalis dan Sosialis ditemukan Islam sebagai alternatif sistem yang penuh dan lengkap menurut nilai moral kehidupan. Keunikannya terletak pada pendekatan Islam terhadap sistem yang mewarnai tingkah laku ekonomi /kehidupan yang memuat nilai-nilai

⁹Adi Sasono, *Liberalisme Ekonomi Pemerintahan dan Kemiskinan*, (Ed Lukman Soetrisna dan Faraz, Yogyakarta, P3PK UGM dan Tiara Wacana, 1995), hal. 11

instrumental dan norma-norma operasional untuk ditetapkan dalam lembaga ekonomi masyarakat.¹⁰

Berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berketuhanan. Disamping material, namun didalamnya tidak mengabaikan aspek spiritual (ibadah). Sendi dari aspek spiritual adalah kesadaran individu muslim akan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan menempatkan Allah SWT pada puncak atas, maka segala aktifitas ekonomi dalam Islam tidak akan terlepas dari pengawasan dan petunjuk yang diberikan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits, baik menyangkut masalah produksi, distribusi maupun konsumsi.

Allah SWT melarang terhadap cara memperoleh barang produksi dalam mendistribusikannya atau mengkonsumsinya dengan jalan bathil. Kecuali dengan aktifitas yang sah berdasarkan dengan kesukarelaan masing-masing pihak, tidak curang dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan.

Hal ini dikarenakan Islam mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep ekonomi Kapitalis dan Sosialis, dimana individu maupun hak umum (kollektif) tidak mutlak tetapi terkait oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak dan mencegah bahaya dengan membuat hak milik menjadi tugas masyarakat berdasarkan syari'at. Islam memberi pengakuan terhadap hak milik individu, memberi kebebasan mendorong mengatur dan melindunginya, namun tidak

¹⁰M. Najiullah Siddiqi, *Ekonomi Islam*, terjemahan AM. Saefuddin, (Jakarta; LIPPM kerjasama Media Dakwah, 1986), hal 20.

membebaskan terhadap kendali seperti dalam sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Sebaliknya Islam juga mengakui hak milik umum berupa harta yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat, seperti jalan, sungai, tanah suaka, barang tambang dan petroleum. Pemilikan umum tersebut, khususnya barang tambang dan petroleum semata-mata harus menjadi milik negara atau baitul mal dan pemanfaatannya harus sesuai dengan syari'at.¹¹

Selanjutnya ekonomi yang berbasis syari'ah yang diturunkan oleh Allah SWT, harus diyakini sebagai sistem terbaik yang diharapkan akan membawa masyarakat kepada tatanan ekonomi yang adil. Sebab jika melihat kembali sistem ekonomi yang berlaku pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz dijelaskan bahwa sistem ekonomi syari'ah terbukti telah membawa masyarakat dalam tatanan yang islami, hidup sejahtera, damai lahir bathin. Berangkat dari masalah ini, maka penerapan sistem ekonomi Islam untuk saat ini sangat signifikan sebagai langkah atau tindakan preventif terhadap tumbuh dan kembangnya sistem ekonomi Kapitalis yang jelas sekali sangat tidak menguntungkan.

Maka sangat relevan kiranya jika penulis mengangkat persoalan ini kepermukaan, sehingga akan tampak signifikansi yang diharapkan dalam rangka menyikapi permasalahan sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam, namun dalam penelitian ini penulis mensepesifikasikan permasalahan pada ketunggalan sistem ekonomi Islam, yang pada saat ini merupakan suatu sistem ekonomi alternatif dalam mengatasi kehidupan perekonomian yang sudah tidak menjunjung etika/moral,

¹¹Al 'Asal Ahmad Muammad dan Fathin Karim, *Op-cit*, hal. 64-67.

dimana dalam Islam mengajarkan pemeluknya untuk hidup kaya, namun memiliki batasan kepentingan individu dan kolektif, sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan agar "Harta itu jangan hanya berada diantara golongan kaya saja diantara kamu".¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas ada dua masalah yang akan diteliti dalam tesis ini, yaitu:

1. Apa prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam ?
2. Seberapa besar keunggulan sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya ?



C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar yang ditegakkan dari sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam, juga untuk mengembangkan pengetahuan yang telah diteliti oleh para ahli-ahli terdahulu.
- b. Untuk mengkaji seberapa besar keunggulan dari sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis.

2. Signifikansi Penelitian

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, (Pelita III, tahun IV, 1982-1983), hal. 916.

- a. Secara teoritis yaitu memberikan kontribusi teoritik tentang perinsip-perinsip dari sistem Kapitalis, Sosialis dan Islam, sehingga dapat ditemukan pemikiran baru khususnya dalam aspek ekonomi Islam.
- b. Secara praktis yaitu mengembangkan ilmu dan proses Islamisasi (penerapan nilai-nilai Islam) dalam ilmu dan amal ekonomi dalam kehidupan masyarakat terutama tentang keunggulan dari prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, pokok masalah tersebut di atas belum dikaji secara spesifik terutama dengan pendekatan historis filosofis, walaupun dalam beberapa buku telah disinggung akan tetapi dalam pembahasan global.

Dalam buku *Ekonomi Islam* suatu pengantar yang ditulis oleh H. Ibrahim Lubis¹³, dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip Kapitalis, Sosialis dan Islam, tetapi ia belum menjelaskan latar belakang lahirnya sistem ekonomi tersebut, dan belum menyentuh kepada pembahasan tentang keunggulan dari sistem ekonomi Islam.

Demikian pula Syekh Akhmad Mahmud¹⁴, ia menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Kapitalis dan Islam tentang distribusi pendapatan, ia menjelaskan

¹³H. Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar*, Jilid I, (Jakarta; Kalam Mulia, 1994), hal. 50-51

¹⁴Syeikh Mahmud Ahmad, *Ekonom Islam suatu Pengantar*, Comparative Study, Edisi I, (Lahore Pakistan; Ashraf Press, 1947), hal. 46

laatar belakang lahirnya sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh dan lebih jauh lagi membahas tentang kepemilikan.

Sementara Abdul Mannan¹⁵ dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* mengatakan bahwa dalam ekonomi Islam ada konsep keadilan, khususnya pada pembahasan mengenai distribusi pendapatan yang berhubungan dengan faktor-faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, teknoligi dan sumber daya manusia dalam Islam kepemilikan individu juga kolektif.

Dr. Syauqi Ahmad Dunya¹⁶ dalam bukunya *Al-Iqtishad Al-Islam* menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sebuah pola ekonomi baru, dimana teori dari ekonomi Islam menurutnya adalah kebutuhan manusia itu sesungguhnya terbatas, sementara alat pemuasnya (sumber daya) itu sendiri tidak terbatas, bahkan lebih dari cukup. Pernyataan ini bertolak belakang dengan sistem ekonomi konvensional (Kapitalis dan Sosialis) yang telah mendidik manusia serta menciptakan iklim pada kehidupan manusia untuk berbuat sewenang-wenang tanpa memperdulikan orang lain maupun lingkungan. Sementara dalam ekonomi Islam mengambil jalan tengah yakni memiliki konsep yang mandiri dan mempunyai perbedaan yang esensial dari sistem ekonomi lainnya secara individual yang prinsip utamanya adalah bebas tetapi terbatas.¹⁷

¹⁵Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 113.

¹⁶Syauqi Ahmad Dunya, *Sistem Ekonomi Islam sebuah Alternatif*, (Jakarta; Fikahati Miska, 1994), hal. 11

¹⁷Atzalur Rahman, *Op-cit*, hal. 10

Pada konsep ekonomi Islam, kekayaan yang telah diciptakan oleh Allah SWT di alam dan manusia menguasainya sebagai amanat-Nya, berarti mengidentifikasi/mengindikasikan pada pemikiran secara kolektif, karenanya dukungan tak bersyarat kepada pranaata dan pemilik pribadi yang menjadi tolak ukur ekonomi Kapitalis tak bergeming dalam pemikiran ekonomi Islam, sebab kebebasan tanpa batas atas pemilikan pribadi hanya menyisakan ruangan yang sempit bagi kebebasan manusia dengan membebankan tanggung jawab social yang sangat ringan kepada kaum kaya.

Walaupun diantara buku-buku tersebut sudah ada yang membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam tentang kelebihan dan kekurangan (dari sini dapat dilihat keunggulannya), tetapi masih terdapat sisi yang perlu dipertegas sehingga pemahaman yang diperoleh tidak parsial dalam mencari landasan dari sistem ketiganya.

Kendati harus disadari bahwa minimnya literature yang berkenaan dengan pembahasan permasalahan tersebut, maka deskripsi dalam penelitian ini tentu saja masih terbatas pada tataran historis normative dan deskriptif illustrative. Sebab untuk dapat menemukan bentuk atau sampai pada tataran empirik masih perlu dilakukan pengkajian secara mendalam tentang berbagai teori yang terkait. Melalui kajian filosofis normative inilah, dapat menggugah kita membentuk teori baru atau minimal mengembangkan teori yang sudah ada atau mungkin mengevaluasi kebijakan teori yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian naskah yang diperoleh melalui sumber literature (Library Research), yaitu kajian literatur yang melalui riset kepustakaan. Oleh sebab itu ada dua sumber pokok yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber primer yang dimaksud adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang fungsinya menunjang data/sumber primer, yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan data kepustakaan ini, yaitu mencari prinsip-prinsip ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam serta keunggulan dari sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan lainnya, maka pendekatannya adalah historis filosofis. Pada hakekatnya pendekatan ini terdiri atas analisis lingustik dan analisis konsep. Yang dimaksud dengan analisis lingustik yaitu untuk mengetahui makna yang sesungguhnya, sedangkan analisis konsep untuk menemukan kata kunci yang mewakili suatu gagasan.¹⁸

¹⁸Imam Brnadib, *Filsafat Pendidikan; Sistem dan Metode*, (Yogyakarta; FKIP, 1987), hal. 89.

3. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, komparatif dan analisis.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk menemukan prinsip pandangan dari sistem ekonomi yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini prinsip-prinsip dari sistem ekonomi tersebut dipaparkan sebagaimana adanya, untuk menemukan jalan pikirannya secara menyeluruh.

Sedangkan metode komparatif dimaksudkan untuk membandingkan prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam serta keunggulan dari sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi lain, sehingga dapat diketahui ada tidaknya persamaan dan perbedaan dari prinsip-prinsip dari sistem ekonomi tersebut serta dapat diketahui keunggulan dari sistem ekonomi Islam dari lainnya. Adapun bentuk komparasi yang akan digunakan adalah komparasi simetris yaitu perbandingan dilakukan setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap, dan masalah-masalah yang dibandingkan menyangkut perumusan masalah, cara pendekatan dan argumentasi yang digunakan.

Selanjutnya dengan metode analisis sintesis, penulis berusaha mencari keunggulan dari sistem ekonomi Islam untuk menemukan rumusan-rumusan baru yang lebih sempurna/ valid dan relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kekinian. Untuk itu tentunya akan digunakan bentuk penalaran induktif a posteriori yaitu masalah yang diketahui (dilihat, diselidiki) keadaan yang

sebenarnya dan bentuk penalaran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah umum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya adalah analisis isi (Content Analysis).

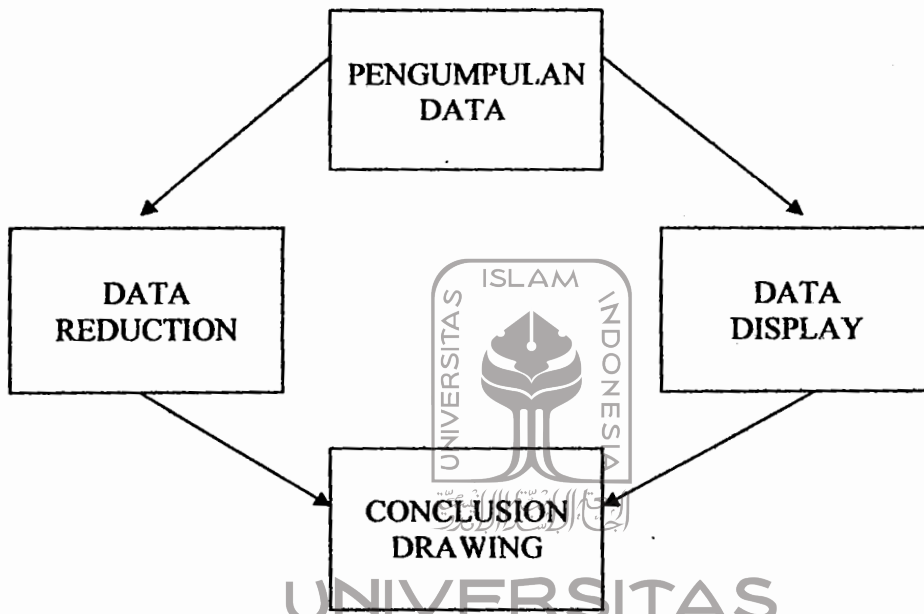
Data primer dilakukan dengan mengumpulkan pokok pikiran yang ada yang bisa dikategorikan berkaitan langsung dengan ide dasar (bernuansa filosofis), ide cabang (dalam kerangka sistem ekonomi). Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan pokok pikiran yang ditulis oleh para pemikir (tokoh ekonomi) dalam buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lainnya, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi terutama tentang keunggulan dari sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya.

5. Teknik dan Model Analisis

Dalam penelitian kualitatif, pada tahap analisis setidaknya-tidaknya ada tiga komponen pokok yang harus diperhatikan oleh peneliti yaitu : data reduction, data display dan conclusion drawing.

Tiga komponen analisis ini berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada waktu pengumpulan data, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis yang umumnya disebut model analisis mengalir (Flow model analisis).

Tiga komponen analisis tersebut dapat dilakukan adanya interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar: Model Analisis Data.¹⁹

Selanjutnya penelitian yang bersifat pemikiran, pada dasarnya tidak terlepas dari pendekatan filosofis yang pada hakekatnya terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep.

6. Teknik Penyajian Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan disajikan dalam bab IV, dimana dalam bab ini mula-mula diuraikan temuan hasil penelitian secara deskriptif, kemudian dilanjutkan

¹⁹Haribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif; Dasar-aasar dan Praktis*, (Surakarta; Pusat Penelitian UNS, 1998), hal. 2.

dengan interpretasi, elaborasi pembahasan dan analisis perbandingan teori sampai akhirnya pada kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini penulis susun menjadi lima bab, dengan menguraikan masing-masing bab menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I; Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Signifikansi Penelitian, Tela'ah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II; Deskripsi umum tentang Sistem Ekonomi, meliputi Pengertian Ekonomi dan Sistem Ekonomi, Macam-macam Teori tentang Sistem Ekonomi, dan Prinsip-prinsip dan Tujuan Sistem Ekonomi

Bab III; Aspek-aspek dalam Prinsip Sistem Ekonomi, meliputi Aspek Kepemilikan dalam Prinsip Sistem Ekonomi, Aspek Konsumtif dalam Prinsip Sistem Ekonomi, dan Aspek Pemerataan Pendapatan dalam Prinsip Sistem Ekonomi.

Bab IV; Studi Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis dan Sistem Ekonomi Islam, meliputi Persamaan dan perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis dan Sistem Ekonomi Islam, dan Analisis penulis Tentang Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis dan Sistem Ekonomi Islam.

Bab V; Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

DESKRIPSI UMUM TENTANG SISTEM EKONOMI

A. Pengertian Ekonomi dan Sistem Ekonomi

Kata ekonomi dalam buku Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan “pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekaayaan (konsumsi)”.¹ Sedangkan AN Nabhani² mendefenisikan kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (Greek) yang bermakna “mengatur uraian rumah tangga”, dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut memikirkan apa yang mereka peroleh, populasinya kemudian semakin banyak, mulai dari rumah ke rumah menjadi kelompok (community) yang diperintah oleh negara.

Muhamad Abdul Manan mengutip pendapat Profesor Robin bahwa kata-kata ekonomi sebagai berikut ; ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1982), h. 267.

²Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, a.l. Maghfur Wachid, (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h. 47

perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif.³

Demikian pula Zainal Abidin Ahmad,⁴ mengungkapkan perkataan ekonomi adalah berasal dari “bahasa Yunani” *Oikos* dan *Nomos*, *Oikos* berarti “rumah” sedangkan *Nomos* berarti “aturan”. Jadi jelasnya bahwa ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*Volkshuishouding*), maupun dalam rumah tangga negara (*Staatshuishouding*), yang dalam bahasa Arab dinamakan *Mu’amalah maddiyah*, ialah aturan-aturan tentang pergaulan dan perkembangan manusia mengatur hubungan kehidupannya, dan lebih tepat lagi dinamakan “*Iqtishad*” (إقتصاد) ialah yang mengatur hidup manusia dengan sehemat-hematnya, demikian beliau menambahkan.

Karena luasnya kaedah ekonomi ini, maka umumnya pembahasan ilmu ekonomi terbagi kepada :

1. Ekonomi sebagai usaha hidup dan pencaharian masing-masing manusia, dinamakan *ekonomisme live, economical life wirs schaff*.
2. Ekonomi di dalam rencana sistem pemerintah yang dinamakan *economisme poliysical, political economy*, atau *wirs schaff political*.

³ M.A Mannan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, a.l. Potn Arif Harahap, (Jakarta; Internusa, 1992), h. 19.

⁴ Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1979), h. 30.

3. Ekonomi di dalam teori dan pengetahuan, dinamakan *economisme wirs schaff vety schappenjk*, *economical science* atau, *wirschaff*, *wirsseem schaff*.

Masalah-masalah ekonomi tersebut di atas disebutkan dengan jelas dalam sebuah Hadis Nabi riwayat Bukhari sebagai berikut :

لأن يأخذ أحدكم حبله فيحطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا
أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. (رواه مالك)

“Sungguh bahwa seseorang diantara kamu membawa tali (pagi-pagi hari) lalu ia pergi berangkat mencari seikat kayu api ke bukit-bukit dipanggulnya, kemudian ia menjual (memperoleh, meminta dan menjaauhi kefakiran) itu lebih baik lagi dari pada ia hidup meminta-minta kepada manusia, kerja mereka bisa memberinya atau memperolehnya”. (H.R. Malik)⁵

Dari hadits Nabi Saw di atas dapat dijelaskan masalah-masalah ekonomi di dalam bagian-bagiannya :

1. Mengerjakan kayu api, adalah berarti berusaha menambah produksi.
2. Berusaha menjualnya adalah mengerjakan distribusi (pembagian)
3. Memakannya adalah berarti memenuhi konsumsi (pemakaian)
4. mendedekhkannya kepada orang lain, adalah mengajarkan rencana sosial.⁶

Hadis tersebut sesuai dengan teori ilmu ekonomi tentang tingkatan-tingkatan kemajuan perekonomian, bahwa pada mulanya pertama kali orang masing-masing memborong diri sendiri mengajarkan segala rencana ekonomi itu, setelah luas

⁵ *Ibid.*

⁶ Imam Malik Al Muwatha, *"Al-Muwatho"* (Mesir, Al-Maktabahat Tijariyah, tt), h. 259-260.

lapangan ekonominya, barulah tiap-tiap rencana dikerjakan tersendiri daripada rencana yang lain.

Sebagaimana diketahui dalam buku-buku sejarah diceritakan bahwa pada zaman dahulu, tiap-tiap orang menjadi produsen (pengusaha), dan masing-masing mereka juga menjadi konsumen (pemakaian), setelah perkembangan menjadi luas, timbulah bagian yang ketiga ialah distribusi (pembagian), golongan saudagar. Pada awalnya manusia masih dapat mengrejakan sendiri ketiganta, yaitu dia yang mengusahakan (produsen), dia yang menjual (distributor) dan dia yang memakai (konsumen). Tetapi kemudian satu persatu berdiri sendiri, dikerjakan oleh orang banyak (produsen sendiri, distributor sendiri dan juga konsumen sendiri).

Pada zaman modern ini ketiganya sangat luas lapangannya, rencana ekonomi sudah banyak bercabang-cabang, dan tiap-tiap cabang itu tidak lagi dikerjakan oleh tenaga satu orang atau satu bangsa, tetapi dengan tenaga orang banyak, atau tenaga berbagai bangsa.⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dinamakan ekonomi ialah pengetahuan tentang kegiatan yang mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut tentang sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Adapun yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan ekonomi.

⁷Zainal Abidin Ahmad, *Op-cit*, 1979), h. 32.

Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁸ Sistem ekonomi sangat berbeda dengan ilmu ekonomi. Sistem ekonomi di bahas ssebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup (way of life) tertentu, sdangkan membahas ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup (way of life) tersebut.⁹

Ekonomi diartikan sebagai alokasi sumebr daya material,¹⁰ maka sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagaisebuah perangkat nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan sumber daya material menurut kerangka referensi tertentu.¹¹ Kalau kerangka referensinya Islam maka disebut sistem ekonomi Islam, demikian pula sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

B. Macam-macam Teori Tentang Sistem Ekonomi

1. Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Kapitalisme

a. Lahirnya Istilah Kapitalisme dan Ekonomi Kapitalisme

Dalam *Encyclopedia Britannica*, Kapitalisme dapat dideskripsikan secara paling ringkas sebagai kekayaan yang digunakan dalam memproduksi lebih banyak kekayaan dan *Kapitalisme* itu sendiri adalah sistem yang

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), edisi 2, cet. IX, h. 950.

⁹Taqiyuddin AN Nabhani, *Op-cit*, h. 48

¹⁰Lihat definisi yang dikomentarkan oleh Arkhan: "Ilmu Ekonomi Islam bertujuan melakukan kegiatan tentang kebahagiaan hidup manusia (hukman falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar gotong royong dan partisipasi.

¹¹Mozer Khaf, *Al-Mizam al Iqtisad, al Islam Nazariah 'Amallah, al Muslim al Ma'asir*, No. XX (Oktober-Nopember-Desember, 1978). H. 47.

mengarahkan “proses itu”.¹² Istilah tersebut berasal-usul sosialistik, yang mulai timbul pada paruh kedua abad ke-19 juga menunjukkan proses pengorganisasian produksi atau perdaagangan di seluruh dunia dengan basis *individualistik*, *sekuleristik* dan *materialistik*. Orang-orang dengan bantuan kekayaan yang terakumulasi sebelumnya, tetapi lebih sering dengan menggunakan uang yang dipinjam dengan bunga, memburu laba dan kekayaan bagi diri mereka sendiri dengan mempergunakan sejumlah besar tenaga manusia dengan imbalan upah.¹³

Lebih jauh lagi kegiatan usaha (enterprise) individual adalah napas dari Kapitalisme. Ia memungkinkan kebebasan mutlak untuk memilih salah satu dari ribuan lowongan sebagai upaya produktif atau komersial, untuk memilih lokasi guna memperkejakan kualitas agen-agen produksi dan pasar bagi hasil produksinya, juga metode (sistem) untuk menjualnya seperti yang diinginkan. Elemen Kapitalisme ini telah dikritik secara tajam oleh para *sosialis* dan *fasis* dari sudut pandang mereka masing-masing. Kaum sosialis terganggu oleh eksploitasi besar-besaran yang dimungkinkan oleh kapitalisme individualistik. Kaum fasis mencemooh pemborosan dan ketiadaan perencanaannya. Akan tetapi, eksperimen-eksperimen sosialis dan fasis mengungkapkan bahwa baik nasionalisasi dan perencanaan menimbulkan sejumlah besar penindasan manusia. Kelemahan riil dari sistem kapitalis tidak

¹²Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic of Islam*, Comparative Study, Edisi 1,(Lahore, tan; Ashraf Press, 1947). hal. 1.

¹³*Ibid*

ditunjukkan oleh keduanya. Penekanan keduanya pada eksploitasi dan ketiadaan perencanaan telah mendorong penghapusan keduanya ini dalam bentuk-bentuk kapitalisme selanjutnya, yang dicontohkan oleh New Deal dan Beveridge Scheme. Namun cacat dasar Kapitalisme tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda tersembuhkan dan serangan itu tidak diarahkan pada titik lemah Kapitalisme.

Maka sesungguhnya secara historis perkembangan Kapitalisme merupakan bagian dari gerakan *individualisme*.¹⁴ Berakan itu juga menimbulkan dampak dalam bidang yang lain, seperti dalam bidang keagamaan yang menimbulkan reformasi; dalam bidang penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam; dalam bidang hubungan masyarakat memunculkan ilmu-ilmu sosial; serta dalam ilmu ekonomi melahirkan sistem *Kapitalisme*.¹⁵ Karena itu peradaban Kapitalisme sah (legitimate) adanya. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa Kapitalisme merupakan *sistem sosial ekonomi yang komprehensif*, lebih dari hanya sekedar tipe tertentu dari perekonomian.

Sistem ini berkembang di Inggris pada abad ke-18 dan selanjutnya menyebar

¹⁴*Individualisme* sebagai suatu strategi filosofid pada organisasi ekonomi sesungguhnya tidak dapat memimpin pada suatu masyarakat ekonomi yang maju dan harmonis, malah ia dapat berkontribusi sejumlah problem-problem ekonomi antara lain : *Pertama*, ia dapat menggiring pada praktek-praktek eksploitasi oleh mereka yang ada pada posisi kuat dalam masyarakat dan ini akan menyebabkan konflik di masyarakat. *Kedua*, ia akan berkontribusi alokasi yang salah terhadap sumber-sumber ekonomi di negara tersebut. *Ketiga*, penggunaan sumber-sumber ini dengan unit-unit pabrik dapat menimbulkan problem pada ekologi. Karena pada dasarnya individualisme tidak mempertimbangkan sifat dasar manusia, dimana manusia bukan hanya makhluk *individu* tapi juga *kolektif* sehingga seharusnya saling bergantung dan saling membutuhkan demi penyempurnaan makna hidup. Selanjutnya baca buku *Islam and Justice*, pada tulisan Nik Mustapha Hj. Nik Hassan, halaman 60.

¹⁵Wiliam Eberstein, Edwin Focelma dan Alex Jemadu, (dkk), Alih Bahasa Alex Jemadu, *Isme-isme DewasaIni*, Edisi IX, (Jakarta; Erlangga Press, 1994), hal. 148.1

luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara.¹⁶ Selanjutnya di Amerika lahirlah Kapitalisme berhubungan dengan banyaknya/melimpahnya material terhadap kemajuan peradaban industri dengan tingginya sistem dinamika klas dalam demokrasi politik dengan pola/aturan-aturan kultural, (contohnya: individualisme); di mana masing-masing bisa dilihat sebagai peradaban dalam perencanaan ekonomi.¹⁷

Sementara sebagian orang mengatakan bahwa semangat Kapitalisme sering disalahtafsirkan dengan pengertian : “hasrat untuk memiliki sebanyak-banyaknya, khususnya uang”. Werner Sombart dalam bukunya *Des Moderne Kapitalisme*,¹⁸ yang versi pertamanya telah diterbitkan pada tahun 1902, mengatakan bahwa Kapitalisme mempunyai tiga aspek yaitu: semangat, bentuk dan teknologi. Semangat itu diimplementasikan pada hasrat memiliki, persaingan dan rasionalitas. Bagi Weber, semangat “keserakahan tidak terbatas” tidak ada sama sekali kaitannya dengan Kapitalisme, bahkan Kapitalisme sering identik dengan sikap menahan diri dan sikap atau tempramen yang terkendali. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Kapitalisme identik dengan upaya mencari keuntungan melalui kegiatan usaha kapitalitas yang rasional dan berkelanjutan. Lebih lanjut dia mendefinisikan “tindakan kapitalis” sebagai usaha yang bertumpu pada harapan mendapatkan

¹⁶*Ibid*

¹⁷Peter L. Berger, *The Capitalist Revolution, Fifty Proposition a bout prosperitty, Equality and Liberty*, (United States of America, 1986), hal. 3.

¹⁸Robert W. Green, *Protestantism and Capitalism, The Weber Thesis and His Critics* (D.C. Heat and Cimpany, New York), hal. 7.

keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan pertukaran atau perdagangan.¹⁹ Menurut Weber keadaannya haruslah demikian, sebab dalam suatu tata masyarakat yang sama sekali kapitalistis, perusahaan kapitalis individual yang tidak dapat memanfaatkan kesempatannya untuk menciptakan keuntungan, akan membentur kematian.²⁰

Adanya keyakinan kita akan eksistensi Kapitalisme seperti itu diarahkan tidak hanya oleh keabsahannya tetapi juga oleh kepentingan historis. Maka di mana pun tidak ada kenyataan sejarah dan kultur diungkapkan dengan lebih jelas, dibandingkan konsep Barat tentang sejarah Kapitalisme. Adapun konsep *Fanfani* mengenai ciri-ciri pokok Kapitalisme berasal dari sejarah Eropa; dan ini muncul di kota-kota Italia pada abad ke-14, jika tidak lebih awal, dan tempat-tempat lain di Eropa. Maka G.G Well berkata bahwa Kapitalisme adalah “suatu yang tidak dapat didefinisikan (selanjutnya mengenai dinamisasi tersendiri dalam memahami dan menginterpretasikannya terus berlangsung hingga sekarang) tetapi pada umumnya kita menyebutnya sebagai sistem Kapitalisme yang berarti suatu kompleks kebiasaan tradisional, perolehan energi yang tidak terkendalikan dan kesempatan jahat serta pemborosan hidup”.²¹ Pernyataan ini diperkuat

¹⁹Warner Sombart, “Capitalism”, dimuat dalam *Encyclopedia of the Social Science*, vol. 3-4, hal. 196.

²⁰Max Weber, *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, (Tr. Talcott Parson, Charles Scribner, New York; 1958), hal. 17.

²¹Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 310.

oleh Syed Nawawi Haidar Naqvi yang penulis kutip dari buku *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*²² menjelaskan bahwa Kapitalisme diartikan “suatu pencarian kekayaan yang ngotot dan tak terbatas melalui industrilisasi yang tak kenal lelah, pembatasan yang kaku atas pembelanjaan untuk konsumsi pribadi atau sosial, pemusatan waktu untuk mengurus usaha pribadi, eksploitasi yang sistematis dan tanpa ampun terhadap buruh. Namun dalam memberikan batasan tentang *Kapitalisme*, para sosiolog dan sejarawan mengatakan : “Pada hakikatnya semua orang sepakat (dari sekian banyak definisi tentang Kapitalisme) bahwa Kapitalisme adalah suatu sistem yang menganggap modal adalah utama, tenaga kerja bebas, disertai dengan persaingan yang tidak terkendali (*persaingan bebas*), kredit yang meluas, bank-bank makmur, industri bebas dan pasaran dunia menjadi satu.”²³

Berangkat dari masalah di atas, maka Kapitalisme bukanlah hanya sekedar *instrumental* ; tetapi juga konsep terhadap alasan historis dan tidak sulit untuk merekonstruksinya sehingga kapitalisme didefinisikan sebagai cara yang sudah termasuk penilaian tentang sistem ekonomi di mana beberapa tenaga kerja dieksploitasi terhadap yang lain dan sistem ekonomi yang mendominasi dunia Barat sejak runtuhnya Feodalisme.²⁴

²²Syed Nawawi Baqir Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*, Alih Bahasa Husin Anis, (Bandung; Mizan, 1985), hal. 113.

²³Aminore Fanfani, *Catholicism, Peotestantism and Capitalism*, (Sheed and Ward, London; 1938), hal. 30-31.

²⁴Peter L. Berger, *Op-cit*, hal. 3.

Pada bagian lain Max Weber mendefinisikan *Kapitalis* sebagai aktivitas ekonomi yang diorientasikan terhadap pasar dan perlengkapan untuk menghasilkan keuntungan dari pasar. Jelasnya semua aktifitas hanya merupakan bagian kecil dari ekonomi secara keseluruhan. Lebih jauh lagi Weber berpendapat bahwa kata-kata kapitalisme diaplikasikan pada situasi di mana persyaratan-persyaratan ekonomi masyarakat/kelompok sangat menonjol.²⁵

b. Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kapitalisme

Pada dasarnya perjalanan kapitalisme tidak dapat dipisahkan dari bumi Eropa, tempat lahir dan berkembangnya kapitalisme tahun 1448 (tahun perjanjian *Westphalia*) dipandang sebagai tahun lahirnya negara modern. Perjanjian tersebut mengakhiri perang tiga puluh tahun (antara Katholik dan Protestan di Eropa) dan menetapkan negara mereka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan gereja Katholik Roma. Inilah awal munculnya *sekularisme*, sejak itu aturan main kehidupan dipisahkan dari gereja (yang menurut mereka wakil Tuhan), dengan anggapan bahwa negara itu sendiri yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan rakyatnya sehingga negaralah yang layak membuat aturan untuk kehidupan, sementara Tuhan (agama) diakui keberadaannya tetapi dibatasi hanya di gereja (hubungan manusia dengan Tuhan). Sehingga prinsip dasar

²⁵*bid*, hal. 18.

sekuler tersebut adalah menempatkan manusia (negara/kerajaan) sebagai pembuat peraturan/hukum. Permasalahan berikutnya adalah siapa/apa wewenang pembuat aturan yang menjamin terciptanya kehidupan yang damai, tentram dan stabil. Kenyataannya Eropa sampai abad ke-19 merupakan kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh kaisar, raja dan para bangsawan (aristokrat). Sampai pada masa itu, peran politik rakyat sangatlah minim bahkan tidak ada. Rakyat secara prinsip patuh pada raja dan undang-undang yang dibuat oleh raja, tanpa melibatkan diri dalam proses politik (*decision making*), dan ternyata raja selalu tidak bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Secara adil dan menyeluruh.

Sedangkan an-Nabhani dalam bukunya *Nidzom At-Islam* menerangkan bahwa penamaan ideologi ini dengan nama Kapitalisme, berawal pada kaisar dan raja-raja di Eropa dan Rusia yang menjadikan agama sebagai alat pemereras, penganiaya dan penghisap darah rakyat. Sementara para pemuka agama pada waktu itu dijadikan sebagai perisai untuk memenuhi keinginan mereka. Dari kondisi seperti itu, maka selanjutnya menimbulkan pergolakan sengit, yang kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan cendekiawan yang mana sebagian mereka mengingkari adanya agama secara mutlak sedangkan sebagian lagi mengakui adanya agama tetapi menyerukan agar agama dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan filosofis dan cendekiawan lebih cenderung memilih ide yang memisahkan agama dari kehidupan, yang selanjutnya menghasilkan

usaha pemisahan agama dan dunia. Disampaikan juga pendapat untuk tidak mempersoalkan agama, dilihat dari aspek diakui/ditolak, sebab yang menjadi masalah adalah agama harus dipisahkan dari kehidupan dunia.²⁶

Walaupun demikian, Kapitalisme saat ini sudah tidak bisa disebut sebagai hanya sebuah “isme” biasa atau sebuah pemikiran filsafat belaka, bahkan tidak bisa juga hanya dikatakan sebuah teori ekonomi, akan tetapi Kapitalisme telah menjadi sebuah ideologi dunia yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia secara menyeluruh dan sistemik.²⁷ Lebih lanjut Lester C. Thurow dalam bukunya:²⁸

“Since the onset of industrial revolution, when success came to be defined as rising material standards of living, no economic system other than capitalism has been made to work anywhere. No one knows how to run a successful economic system on any other principles. The market, and the market alone, rules and no one doubts it. Capitalism alone taps into modern beliefs about individuality and exploits what some would consider the basic human motives, greed and self-interest, to produce rising standards of living. When it comes to creating the wants, and desires of every individual, no matter”.

Pada dasarnya memperoleh ilustrasi tentang manifestasi Kapitalisme sangat diperlukan menurut interpretasi berbagai pengamat, walaupun mereka

²⁶Taqyuddin An-Nabhani, *Nidzom Al-Islam*, (Beirut; Libanon: Darul Ummah, 1953), Cet.V, hal. 25.

²⁷Para ilmuwan sepakat bahwa Kapitalisme merupakan sebuah “evolusi” yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Dewasa ini Kapitalisme bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi, Kapitalisme dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi yang muncul pada bagian terakhir abad pertengahan dan mungkin mencerminkan suatu “gaya hidup”. Selanjutnya baca dalam Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme, Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, (Bandung; Remaja Karya, 1986), hal. 33.

²⁸Lester Thurow, *The Future of Capitalism*, (London; Nicholas Bearley Publishing, 1996), hal. 17.

berbeda dalam teori. Seperti : *Mandel* yang melihat Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi. Hal ini berbeda dengan pandangan lain yang membagi tahapan kapitalis dari “Kapitalisme Kompetitif” menuju Kapitalisme Monopoli” dan selanjutnya memasuki tahapan “Kapitalisme Negara Monopoli”, maka *Mandel* melihat perubahan-perubahan dalam sistem Kapitalisme dari gerak kapital dan perwujudan akumulasi kapital yang kini, pada tahap kapitalisme mutakhir, menurutnya dikendalikan melalui sistem perusahaan multinasional.²⁹

Namun pada dasarnya sejumlah kapitalisme itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Michel Beand, tidak hanya mengandung kapitalis destruktif tetapi juga sebagaimana yang terjadi di Indonesia selama lima belas tahun terakhir, di Eropa dan Amerika Utara, di Jepang dan Korea Selatan atau Singapura telah mendemonstrasikan kapitalis kreatifnya, tidak saja dalam menyediakan kebutuhan material dan kenyamanan, tetapi juga dalam mendinaamisasikan kondisi kebudayaan dan spiritual.

Sesungguhnya jika suatu paham ingin dikatakan memiliki ciri Kapitalisme adalah:³⁰ a). Menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat, produksi maksimum dan pemuas “keinginan” individu sebagai sesuatu yang penting untuk kesejahteraan manusia; b). Menganggap kebebasan individu

²⁹M. Dawam Raahardjo (Ed), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, (Jakarta; LP3ES, 1987), hal XI.

³⁰M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Islamisasi Ekonomi Kontemporer, (Surabaya; risalah Gusti, 1999), hal. 18.

tanpa batas untuk mencari kekayaan pribadi, memiliki dan mengatur kepentingan pribadi sebagai sebuah keharusan bagi setiap individu;³¹ c). Mengasumsikan inisiatif individu bersamaan dengan *fase decasion* (pengambilan keputusan) yang terdesentralisasi dalam operasi pasar bebas sebagai syarat untuk mewujudkan efisiensi optimum pengalokasian sumberdaya; d). tidak mungkin perlunya peranan penting pemerintah atau pertimbangan-pertimbangan nilai kolektif baik dalam efisiensi alokasi maupun keadilan distribusi, dan e). Mengklaim bahwa pemenuhan kepentingan pribadi oleh *semua individu* secara otomatis memenuhi *kepentingan sosial*.

Hal ini berarti pencarian keuntungan sendiri tersebut secara alamiah, akan selalu mendorongnya untuk lebih memilih lapangan kerja yang paling “menguntungkan bagi masyarakat”, tetapi dengan mengarahkan industri seperti ini mungkin hasilnya memiliki nilai terbesar, seperti dalam banyak hal lain sistem ini dikendalikan oleh suatu tangan tak terlihat untuk mendorong tujuan yang bukan merupakan bagian dari maksudnya, namun tidak juga selalu merupakan keburukan bagi masyarakat karena masyarakat bukan

³¹Oleh sebab itu *kapitalisme* menjadi sebuah sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan setiap individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya. Ini diakibatkan karena “hukum-hukum” ekonomi pasar seperti hukum-hukum fisika yang absah secara obyektif, maka berhasil atau kegagalannya tidak seyogyanya dinilai dengan kekurangan dan kemiskinan bagi mereka yang ketinggalan dalam perjuangan demi keberlangsungan hidup. Lebih jauh setiap orang adalah hakim yang terbaik untuk kepentingannya sendiri dan jika dibiarkan sendiri, tidak hanya akan menjadikan dirinya baik tetapi juga dalam jangka panjang akan menjadikan baik semua orang. Untuk lebih jelasnya baca dalam Umer Chapra, dalam *Islam dan Tantangan Ekonomi*, hal. 37.

bagian dari maksudnya itu. Jadi dengan memburu kepentingannya sendiri berarti mendukung kepentingan masyarakat secara lebih efektif dibandingkan bila sungguh-sungguh bermaksud mendorongnya.

Walaupun kemudian istilah itu oleh para ahli teori sosial dianggap sebagai *isme* atau *sistem pemikiran*, namun kapitalisme³² bukanlah suatu paham yang dipropagandakan oleh orang-orang yang dianggap pendukungnya. Bahkan pada awal XX, ketika Kapitalisme sebagai suatu tahapan perkembangan, namun ekonomi terkemuka seperti : Charles Gide, Canwas, Marshall, Seligman atau Cassel-boleh dikatakan mengutuk/menganggapnya sebagai istilah terlarang, yang tidak boleh dipakai dalam pembahasan ilmu ekonomi.³³ Sebab istilah “Kapitalisme” mengandung arti yang berbeda dan bersumber dari berbagai teori, antara lain diartikan sebagai sistem pemikiran yang berpretensi netral; sebagai tahapan sejarah yang dialami oleh masyarakat; juga sebagai suatu paham yang diperjuangkan atau ditentang.

Terlepas pro dan kontra terhadap keberadaan Kapitalisme sebagai sistem ekonomi, maka penulis ingin mengkaji langsung aplikasi praktis tentang penerapan Kapitalisme dengan mencontohkan penerapan di Amerika.

³²Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, dimana Kapitalisme mempunyai kegagalan pada masa lampau dan kita harus mencegah hal tersebut terulang kembali, namun terlepas dari kekurangan-kekurangan itu bahwa Kapitalisme telah menjadi sistem perekonomian “unggul”. Untuk lebih jelasnya baca bukunya Rich Devos, dalam *Compassionate Capitalism*, (Kapitalisme dengan Kepedulian Sosial), (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 6.

³³Dewam Rahardjo, (Ed), *Op-cit*, hal. IX.

Banyak ekonom menyebut bahwa puncak sentral pelaksanaan Kapitalisme ada di Amerika, hal itu nampak pada perusahaan yang bebas, persaingan dalam bisnis, menganggap gelar/derajat kebebasan adalah hak azazi dan meminimalisir campur tangan pemerintah dalam bisnis pribadi, kemajuan mereka dalam hal ini karena mengacu teori dan kebijakan *Laissez faire laissez passer*.³⁴

Adam Smith sebagai pelopor/tokoh aliran Kapitalisme ini, dalam bukunya "*An Inquiry Into the Nature and Causes of Wealth of Nation*" beranggapan bahwa segala sesuatu merupakan perintah alam, kaitannya dengan konsep *laissez faire* Kapitalisme, dimana pemerintah seharusnya menerapkan hukum yang netral yaitu dengan memiliki rasa hormat terhadap alam dalam melancarkan produksi dan bisnis. Bisnis seharusnya diakui dengan aturan itu sendiri; menurut *hukum alam*.³⁵ Walaupun telah begitu banyak mengalami perubahan, ternyata teori Smith-lah yang sampai kini mendasari perkembangan ilmu ekonomi liberal yang melahirkan sistem ekonomi kapitalis. Selanjutnya Kapitalisme yang telah mulai berjangkit sejak revolusi Industri, dan makin berkembang dengan penemuan-penemuan Smith pada suatu masa dalam sejarahnya telah melahirkan "anak haram"-nya yang

³⁴James Harvei Dood, C.W. Hasek, *Ekonomi Principles and Application*, South Western, (New York; Publishing Company, 1948), hal. 41. menurut J. Barkley Rosse, Jr. Marina V. Rosser, dalam bukunya *Comparative Economics in a Transforming World Economy*, pada hal 14, mengatakan yang dimaksud dengan terminologi *laissez faire* adalah pandangan yang menyatakan minimnya intervensi pemerintah dan dalam istilah francis diartikan dengan "biarkanlah mereka melakukan itu".

³⁵*Ibid*

kemudian memberontak. Meskipun benih nilai-nilai filsafatnya berasal dari masa pemunculan yang sezaman, “anak haram” yang memberontak dalam wujud komunisme itu dapat muncul setelah kapitalisme merajalela di mana-mana menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada masyarakat buruh yang diperas dan dihisap. Sementara Karl Marx, si bidan yang di “nabi”-kan oleh pengikutnya pada masa selanjutnya menulis tentang Kapitalisme, mengupas dan meramal keruntuhan sistem tersebut dalam bukunya “Das Kapital”. Namun Kapitalisme tidak segera mati seperti yang diramalkan Marx, tetapi justru pemikiran Marx sendiri tentang komunisme memunculkan kekuatan baru yang tidak kalah besarnya dari Kapitalisme.³⁶

Tetapi sikap pemerintah Amerika terhadap bisnis tidak pernah pasif yang mana selama kurang lebih 3 (tiga) kuartal/abad setelah pembuatan konstitusi (undang-undang) pemerintahan harus aktif dalam mempromosikan perusahaan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi bantuan finansial yang bertujuan untuk membangun barak-barak, jalan kreta api, sambungan komunikasi dan mendirikan bank-bank; bantuan untuk pertanian dalam berbagai bentuk serta meningkatkan tarap industri maju, mereka mendorong penciptaan keuntungan dan itu juga berarti kemajuan bagi *kesejahteraan umum*.

³⁶M. Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini, diterjemahkan oleh A.M. Saefuddin, (Jakarta; Penerbit Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986), hal. xii.

Walupun demikian, Amerika, Swedia, Prancis dan Jepang menurut penulis belum bisa dikatakan sebagai penganut Kapitalisme murni, sebab masih ada bagian-bagian yang kebajikannya diambil dengan ketentuan pemerintah, misalnya dalam hal pendapatan dari produksi dan distribusi, namun paling tidak Amerika bisa dikatakan negara yang paling dekat dan paling dominan dalam menerapkan ekonomi Kapitalisme murni tetapi tetap saja jauh dari modal yang asli karena sangat besar tuntutan pemerintah terhadap barang dan jasa. Ekonomi Amerika juga memiliki kontrol melalui perusahaan raksasa yang ironisnya lebih banyak mengadakan koalisi dan koordinasi daripada berkompetisi.³⁷

Lebih jauh lagi Amerika yang merupakan pendekar utama negara yang mengatur sistem ekonomi Kapitalis ini, telah menjadi korban dari sistem ekonominya sendiri. Hal itu bisa dibuktikan, bahwa sseparo dari kekayaan dan keuntungan dari sebanyak 200.420 unit perusahaan industri di Amerika telah dimiliki/dikuasai oleh hanya sebanyak 102 unit perusahaan industri raksasa saja (dimana kekayaan rata-rata tiap perusahaan telah lebih dari satu milyar dolar US).³⁸

Kenyataan itu barangkali mengagambarkan ketidaknyamanan masyarakat Amerika, yang kaya, diusik ketentramannya. Mereka

³⁷Zimbakst Andres, Howard J. Sherm, *Stuart Brown Comparing Economics System a Political-Economic Opproach*, 2 Edisi (Harcourt Broce Javanovindi Sandiago, 1989), h. 3.

³⁸Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya; Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999), hal. 2.

mengkhawatirkan derasnya investasi asing yang menjadikannya dijajah secara ekonomis. Awal dari itu semua bisa dilihat pada kebijakan Reagan sebagai penganut paham "*supply-side economics*", dia berpendapat bahwa cara yang paling tepat menggairahkan ekonomi adalah merangsang sisi produksi dan agar rakyat tergerak untuk berproduksi, maka pajak dikurangi. Tarif pajak tertinggi untuk orang-orang kaya diturunkan dari 70 % menjadi 28 % tetapi teragisnya, sisi pengeluaran ternyata gagal dilaksanakan/disesuaikan dengan penurunan sisi pendapatan (akibat penurunan pajak). Anggaran militer membengkak dan sebagai akibat AS mengalami defisit terbesar sepanjang sejarah.³⁹

Dan pada saat yang bersamaan, AS mengalami defisit perdagangan yang cukup parah, maka terjadilah kelangkaan dana dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Padahal, tabungan yang berhasil dihimpun tidak mencukupi akibat gaya hidup masyarakat yang konsumtif. Pada saat itulah, modal dari luar masuk secara tiba-tiba akibatnya selama 10 tahun (1978-1988) arus masuk modal internasional berlipat hingga mencapai total 1.8 triliun dolar. Sedangkan total investasi AS dalam periode yang sama hanya 1.3 triliun dolar.

³⁹Hendro Basuki, *Ekonomi Amerika dalam Pembinaan*", Suara Merdeka, (No. XLI/14/VI/24 Februari 1993), hal. 4-9.

Dalam mengantisipasi persoalan ini, maka Clinton mencoba untuk menawarkan beberapa program ekonomi seperti:⁴⁰ (1) Peningkatan investasi, (2) Disiplin dalam bidang moneter dan fiskal, (3) Menciptakan daya saing yang tinggi dan liberalisasi, (4) Kerja sama yang erat antara karyawan dan perusahaan serta (5) Keterbukaan pasar dunia. Lebih lanjut Clinton mengimplementasikannya dalam 4 paket yaitu: *Pertama*, kebijakan jangka pendek yang memberikan rangsangan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi sekitar setengah juta orang dalam dua tahun berikutnya. *Kedua*, kebijakan pemotongan anggaran termasuk di dalamnya anggaran militer, subsidi pertanian, proyek ruang raksasa dan sejumlah program lainnya. *Ketiga*, kenaikan pajak sebesar 70 % sebagai suatu kenaikan luar biasa yang di tujukan untuk kaum menengah yang berpendapatan Rp 60 juta keatas. Sedangkan paket kebijakan *keempat*, investasi baru yang bertujuan untuk pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi. Dan program ini dinilai strategis untuk mempersiapkan AS menghadapi masa depan.⁴¹

Dari keempat paket tersebut, memang ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan naik, paling tidak bergerak sekitar 3 %. GDP akan bergerak dari angka 2 % (1992) menuju 3,1 % (1993). Tetapi yang agak bisa dipastikan, pengangguran hanya mampu turun sekitar angka 1,5 % menjadi

⁴⁰ *Ibid*, hal. 4-9.

⁴¹ *Ibid*, hal. 4-9

6,7 % dari angka 2,5 juta pengangguran. Selanjutnya dua masalah yang pasti akan muncul adalah invasi, yang bisa mencapai 3,5 % karena dorongan investasi yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Dan Fortune memprediksikan edisi januari 1993, tingkat konsumsi masyarakat akan naik menjadi 3,2 % di bandingkan tahun lalu yang hanya 3 %.

Adapun yang terjadi sekarang, perekonomian AS terus berkinerja dengan baik, walaupun sangatlah penting bahwa kita terus membuat rencana dengan hati-hati; khususnya dengan menyisihkan pangsa terbesar dari surplus-surplus anggaran terproyeksikan untuk membayar hutang nasional. Dan untuk mengetahui gambaran tentang peranan perusahaan dalam perekonomian AS, kita dapat melihat bahwa 50 perusahaan industri terbesar mempunyai andil 80 % dari total penjualan sektor industri, 75 % penyediaan lapangan pekerjaan diantara semua perusahaan industri. Dalam dasawarsa terakhir kecenderungan kearah skala yang besar ini telah meningkat, dalam sektor ekonomi nonindustri yang penting seperti perbankan, asuransi jiwa, dan pelayanan jasa kepada masyarakat umum untuki konsentrasi pemilikan saham dan kontrol bahkan lebih besar daripada dalam bidang industri.⁴²

Dan klimaksnya yang nampak sekarang adalah peranan negara industri maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia dan Belanda

⁴²William Eberstein, Edwain Fogelma dan Alex Jemadu, Alih Bahasa Alex Jemadu, *Ismeisme Dewasa ini*, (Jakarta; Erlangga, 1994), Edisi IX, hal. 154.

telah mencapai 63,37 % terhadap GWP.⁴³ Ironisnya perkembangan ekonomi ketujuh negara industri maju tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Untuk lebih sistematisnya penulis akan menjelaskan kronologis/uraian lahirnya istilah kapitalisme dan sistem kapitalisme itu sendiri sebagai berikut:⁴⁴

a.1. Kapitalisme awal

Di Inggris industri sandang pedesaan terus tumbuh pesat selama abad ke-16, 17 dan 18. Jadi industri wool memelopori kapitalisme sebagai sistem sosial dan ekonomi serta untuk pertama kali membuatnya berakar di tanah Inggris, sehingga pendayagunaan 'surplus sosial' cara produktif merupakan prestasi istimewa yang membuat kapitalisme mampu menggauli semua sistem ekonomi sebelumnya. Diantara berbagai kejadian dan lingkungan yang secara pasti mempengaruhi pembentukan modal di Eropa Barat pada tahap awal berkembangnya kapitalisme, ada tiga hal yang patut diberi perhatian khusus yaitu: *Pertama*, dukungan agama bagi kerja keras dan sikap hemat. *Kedua*, pengaruh logam-logam mulia dari dunia baru terhadap pembagian relatif atas upah, laba dan sewa. *Ketiga*, peranan negara-negara dalam membantu dan secara langsung melakukan pembentukan modal dalam bentuk modal yang multifungsi.

a.2. Kapitalisme klasik

⁴³Suroso Imam Dzajuli, *Indonesian International Currency System*, (Surabaya; Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1998), hal. 3.

⁴⁴M. Dawam Rahardjo, *Op-cit*, hal. 17.

Di Inggris mulai abad ke-18 fokus pembangunan kapitalis bergeser dari perdagangan ke industri. Revolusi industri dapat didefinisikan sebagai periode peralihan dari dominasi modal perdagangan atas modal industri ke dominasi modal industri atas modal perdagangan, sehingga akumulasi modal yang terus-menerus selama dua atau tiga abad mulai menunjukkan hasil baik pada abad ke-18. dan kapitalisme sebagai penggerak kuat bagi perubahan teknologi karena akumulasi modal memungkinkan upaya penemuan-penemuan baru yang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat miskin. Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa karya besarnya Adam Smith yaitu *An inquiry into the nature and Causes of the Wealt of Nation (1776)* mencerminkan ideologi kapitalisme klasik. Smith menganjurkan untuk membongkar birokrasi negara dan menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi kepada kekuatan pasar yang mengatur dirinya sendiri secara bebas.

Dalam pandangan Smith, keuntungan pribadi dan kesejahteraan umum dapat diserasikan oleh kekuatan-kekuatan impersonal kompetisi pasar, sebab kebijakan-kebijakan *laissez faire* liberalisme politis abad ke-19 mencakup pula perdagangan bebas, keuangan yang kuat (dengan standar emas), anggaran belanja berimbang, bantuan kemiskinan minimum-singkatnya, prinsip yang mengembalikan individu-individu kepada diri mereka sendiri dan percaya bahwa interaksi-interaksi yang tidak diatur akan menghasilkan akibat-akibat sosial yang diinginkan. Sehingga sistem

ini biarpun didefinisikan secara baik dan ditandai koherensi-logis, harus dipahami semata-mata sebagai sistem dari berbagai kecendrungan. Sebab secara lebih definitif dibanding dengan semua kurun historis lainnya, (maksudnya perkembangan yang terjadi pada fase sebelumnya dimana kaum bisnis tidak berkuasa secara politis) perkembangan ini dapat diterangkan semata-mata secara ekonomis. Ia merupakan sukses dari usaha kapitalis mengingat kaum borjuis ke posisi yang untuk sementara sangat berpengaruh, sukses ekonomi menghasilkan kekuatan politis, yang pada gilirannya melahirkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan proses kapitalis. Ajdi para industrialis Inggris memperoleh perdagangan bebas merupakan faktor utama dalam suatu periode ekspansi ekonomi yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

a.3. Fase Lanjut (sejak 1914)

Perang dunia 1 (pertama) menandai titik balik perkembangan Kapitalisme pada umumnya dan kapitalisme Eropa khususnya. Sejak tahun 1914 menyaksikan adanya pembalikan minat publik kepada Kapitalisme dan terbaliknya hampir pada semua aspek yang dimulai dari kurun liberal sebelum perang, di mana Kapitalisme Eropa menjalankan kepemimpinan kuat dalam masyarakat ekonomi internasional. Pasar dunia saat itu berkembang pesat, standar emas hampir menjadi universal, Eropa bertindak selaku bank dunia, Afrika menjadi jajahan Eropa, sementara Asia dibagi-bagi menjadi berbagai wilayah dan pengaruh yang dominan

oleh kekuatan-kekuatan Eropa dan Eropa tetap menjadi pusat peningkatan volume perdagangan internasional.

Namun sesudah Perang Dunia 1, keberpihakan-keberpihakan itu terbalik arah, di mana pasar internasional surut, standar emas ditinggalkan dan alat pembayaran nasional yang terkendali lebih dikuasai, hegemoni perbankan berpindah dari Eropa ke Amerika Serikat, dan rakyat Asia dan Afrika berhasil bangkit melawan kolonialisme Eropa dan berbagai hambatan perjalanan bertambah banyak, puncaknya revolusi Rusia sebagai akibat perang, tidak hanya membongkar lembaga pokok kapitalis yang berupa pemilikan pribadi atas sarana produksi di wilayah yang luas tetapi lebih jauh lagi tetapi membongkar struktur kelas dan agama yang sudah mapan. Di atas segala-galanya *Laissez Faire*, kebijakan yang menjadi kesempatan abad ke-19 telah di permalukan oleh perang dan pengalaman sesudah perang.

Terlepas dari adanya keberhasilan yang dimiliki oleh ekonomi kapitalisme, namun tidak semua orang/negara yang bisa menerima atau setuju terhadap model kebijakan ekonomi kapitalisme, maka muncul berbagai kritik walaupun pada hakikatnya kapitalisme hanyalah 'hasil sampingan' dari filsafat politik yang bernama *liberalisme*, yang berkembang di zaman pencerahan (Enlightenment) pada abad ke-18, semangat liberalisme itu mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia sama sekali tidak jahat dan sejarah umat manusia dapat di simpulkan sebagai

kemajuan (progress) yang menuju pada suatu tatanan rasional dalam kehidupan, sehingga tuntunan spritual dari lembaga a gama apapun tidak lagi di perlukan.⁴⁵

Perkembangan selanjutnya menunjukkan ternyata kapitalisme tersebut justru menimbulkan suatu masyarakat yang tidak Egalitarian dan menciptakan kesengsaraan bagi rakyat banyak, di samping munculnya keserakahan pendukung kapitalisme serta individualisme yang menyebabkan alienasi. Meskipun dalam dunia empiris tidak mungkin kita temukan kapitalisme murni, dimana barang-barang ekonomi yang tersedia dalam masyarakat didistribusikan sepenuhnya melalui mekanisme pasar, tetapi setiap sistem ekonomi yang pada dasarnya bersifat kapitalis mempunyai beberapa kelemahan yaitu:⁴⁶

Pertama, Kapitalisme melahirkan ketidaksamaan (*inequality*), atau kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, umumnya orang mengakui bahwa kapitalisme memang dapat mendorong produktivitas yang tinggi dan memiliki kemauan untuk melipatgandakan kekayaan, tetapi tetap tidak dapat menghilangkan keimpangan. **Kedua**, kapitalisme adalah sitem ekonomi yang bersifat interansional, jadi tidak bisa berdiri sendiri dalam suatu negara tertentu. Kapitalisme internasional dapat mempertahankan hidupnya lewat eksploitasi yang dilakukan atas dunia ketiga. **Ketiga**, demi

⁴⁵M. Amin Rais, *Cakrawala Islam; Antar Cita dan Fakta*, (Bandung; Penerbit Mizan, 1996), hal. 91.

⁴⁶*Ibid*, hal. 92-93.

kepentingan ekonominya, kekuatan kapitalis selalu bersikap “double-standart”. Kapitalisme langsung atau tidak, berkaitan dengan sistem operasi internasional demi kelangsungan kepentingan ekonominya. Sebagai contoh: Amerika Serikat yang sering menamakan dirinya benteng demokrasi lebih sering membantu kelangsungan regim-regim di dunia ketiga yang operasif terhadap rakyatnya. Jadi, di satu pihak Amerika sangat menghargai hak asasi manusia dan etika politik yang cukup tinggi (kasus jatuhnya Presiden Nixon karena skandal Watergate), tetapi di pihak lain prinsip-prinsip penting itu sama sekali tidak menjadi problem jika menyangkut negara lain. **Keempat**, Kapitalisme yang secara teoritis memberikan kesempatan sama (*equality of opportunity*) kepada setiap anggota masyarakat, dalam kenyataannya bersifat diskriminatif, bahkan rasis. **Kelima**, Semboyan Kapitalisme yang berupa “berproduksi untuk dapat berproduksi lebih besar” menyebabkan keserakahan dan berkembangnya kehidupan yang materialistis. Jadi melimpahnya produksi tidak lagi menjadi alat untuk mencapai suatu tujuan yang luhur, karena ia telah menjadi tujuan itu sendiri. **Keenam**, sebagai konsekuensi logis dari cara produksi seperti diatas, lahirnya pola kehidupan konsumerisme.⁴⁷

⁴⁷Drs. Misalam Munrahim, MA., Ec, P.hD, dalam *Kuliah Filsafat Ekonomi Islam*, pada tanggal 8-10-2002, lebih ringkas lagi mengatakan bahwa berbagai konsep yang lemah dalam kapitalisme yaitu: 1) Hukum Ekonomi dianalogikan dengan Hukum Alam, 2) Prilaku rasional; *self interest*, 3) Positivisme Ekonomi; Bahwa sesuatu yang terjadi dalam ekonomi itulah yang sesungguhnya terjadi; *no value*, dan 4) Hukum *Say Supply Creates it is Own Demand* (penawaran diciptakan oleh permintaan itu sendiri). Hal ini dikarenakan sistem ekonomi kapitalis memandang bahwa problem dasar ekonomi diakibatkan oleh kebutuhan manusia yang tak terbatas, sementara itu

Dan kegagalan ekonomi Kapitalisme yang paling mencolok seperti yang dikatakan dan diakui oleh Hillary Clinton yaitu : munculnya kesenjangan ekonomi antara negara-negara industri maju (Kapiatlisme) dengan negara-negara miskin (selatan). Kesenjangan ekonomi telah menggejala sejak Perang Dunia II, saat itu Amerika Serikat memiliki 40% dari seluruh kekayaan dunia, padahal berpenduduk hanya 6% dari seluruh penduduk bumi.⁴⁸ Menurut World Bank Report pada tahun 1979, penduduk Amerika dan Eropa Barat hanya 16,5% dari penduduk dunia dan menguasai dua pertiga kekayaan dunia. Sedangkan menurut laporan PBB, sekitar tahun 90-an terjadi sebuah fenomena yang disebut sebagai *negara transfer atau revising finansial flows*. Artinya fenomena ini menggambarkan sesungguhnya bukan dunia industri maju yang mengalirkan dana mereka ke dunia berkembang tapi sebaliknya, yaitu dunia berkembang yang membuat dunia maju. Jumlah negara transfer pada tahun 1984-1990 diperkirakan USS 180 milyar.⁴⁹

Lebih jauh lagi adanya sistem kapitalis yang ditopang oleh perkawinan ilmu dan teknologi canggih, memang telah memberikan ketamaman/keseronokan kepada segelintir manusia. Tapi *Herbert Marcuse*

sarana pemuasnya sangat terbatas. Agar proses produksi tersebut dapat selalu terdorong dan disisi lain persoalan konsumsi serta distribusi ekonomi dapat selalu terjaga seadil-adilnya, maka manusia mengembalikan kepada hukum pasar bebas yaitu hukum yang kendalikan oleh *Supply and demand*.

⁴⁸Hillary Clinton, *It Takes a Village*, Alih bahasa Widodo, (Jakarta; Gramedia Pustaka, 1996), Cet. 1, hal. 269.

⁴⁹Ruslan Abdul Gani, *Harian Merdeka*, (28 Februari 1997), hal. 4.

lebih jelas lagi mengatakan bahwa buah dari sistem ini ialah “memudarnya dimensi bagian dalam dari pikiran, pupusnya kekuatan kritis dari rasio, ketertundaan kepada fakta-fakta kehidupan”. Dan demi pemenuhan dorongan hedonistik, alam smesta telah dilukai melalui cara-cara yang tidak beradab, bumi menjadi terluka parah.⁵⁰

Mungkin kita masih bisa menemukan kelemahan-kelemahan Kapitalisme yang lain, jika kita menggunakan etika al-Qur’an tentunya akan nampak jelas sekali kelemahan tersebut, sebagai contoh dalam konsumsi, al-Qur’an mengajarkan untuk mengkonsumsi sesuatu sesuai dengan kebutuhan (prinsip moderasi) atau tidak boros, sementara dalam ekonomi Kapitalisme seseorang dianjurkan untuk memproduksi dan mengkonsumsi sesuatu dengan sepuas-puasnya. Dari sini kita sudah bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan antar konsep al-Qur’an yang penuh dengan muatan etika/moral dalam berekonomi.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada pada teori ekonomi tersebut, namun akseptabilitas dari teori ini sudah sangat tinggi di dunia. Paham kapitalis saat ini sudah menyebar ke seluruh peloksok dunia, bahkan negar-negara yang dulunya menganut paham komunis seperti Rusia dan beberapa negara ex Uni Soviet dan RRC, saat ini tatanan kehidupan ekonominya juga sudah tidak menunjukkan lagi penolakan terhadap paham

⁵⁰Ahmad Syafi’i, *Islam dan Politik; Upaya Membingkai Peradaban*, (Cirebon; Pustaka DINAMIKA, 1998), hal. 194.

ekonomi tersebut. Uniknya perluasan ini telah menjangkau dunia Islam, terbukti dengan banyaknya ekonom di negara-negara itu yang secara terang-terangan menurut paham tersebut. Hal ini tentu saja sedikit banyak telah memberi warna terhadap analisis-analisis ekonomi Islam.⁵¹

Kenyataan ini diperkuat lagi (dan menurut penulis memang harus diakui) bahwa ekonomi Islam belum memiliki alat analisis yang orisinal dari khasanah ekonomi Islam sendiri, alat analisis ekonomi Barat. Walaupun adanya asumsi bahwa alat analisis yang dimiliki ekonomi Barat bersifat matematis-analisis saja, sehingga dipandang *bebas nilai*. Asumsi inilah yang sebenarnya merupakan ekspresi amoralitas dari ekonomi Kapitalisme. Jika penggunaan alat ini akan terus dilakukan, maka dikhawatirkan hasil postulasi ekonomi Islam “sama” (tidak jauh berbeda) dengan ekonomi Kapitalisme. Atau jika tidak hanya memberi label “moral” terhadap ekonomi Kapitalisme.⁵² Oleh sebab itu kita harus menemukan formulasi yang tepat untuk membangun ekonomi Islam secara integral.

2. Sistem Ekonomi Sosialis

c. Sejarah Timbulnya Gerakan Sosialis

⁵¹Munrokhim Misnam, *Pendekatan Akademik dalam Paradigma Ekonomi Islam*, makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, (Surakarta; 17 Mei 1998), hal. 2.

⁵²*Ibid*, hal. 3.

Abdul Dzarr al Gifari meninggal tahun 32 H (652 M), adalah salah satu di antara yang telah merintis gerakan sosialisasi keagamaan di kalangan umat Islam. Setelah berabad-abad lamanya barulah timbul gerakan sosialisasi di dunia Barat. Walaupun banyak persamaan di dalam tujuan, akan tetapi dasar pergerakannya sangat berlainan dari gerakan perintis itu. Abu Dzar mendasarkannya kepada agama, sedangkan gerakan sosialis dunia di bangkitkan oleh perbaikan nasib buruh, persoalan gaji dan persoalan materi yang tidak ada kaitannya dengan masalah ketuhanan. "menurut penjelasan para ahli-ahli penyelidik dunia bahwa, paham sosialisme dunia di dalam gerakannya yang belum teratur belumlah lama usainya."⁵³

Adapun pemakaian perkataan sosialisme yang pertama kali, masih diperdebatkan orang dalam permulaan abad ke XIX ysgn lampau. Menurut Grunbreg, bahwa perkataan itu dipakai pada tahun 1808 M, oleh pendeta Italia yang bernama Guailani, pada waktu itu perkataan sosialisme disamakan dengan arti "Katholicisme" sebagai lawan dari "Protestanisme". Di Inggris pengikut-pengikut Robert owen, perrama kali menggunakan perkataan itu. Sedangkan di Prancis pertama kali yang memakainya ialah Vinet. Penulis Perancis L. Rebaud yang menulis buku "*Etudes sur les reformeteurs un socialistes modernes*" (tahun 1864 tebit, cetakan nya ke 7) menganggap dirinya orang yagn pertama mendapatkan perkataan itu.....perdebatan yang sengit daalm Majelis rendah Inggris pada tahun 1923 M tentang arti perkataan sosialisme,

⁵³Zainal Abidin Ahmad, *Op-cit*, h. 98

merupakan suatu bukti yang sejelas-jelasnya atas demikian. Ada juga yang memberi arti bahwa sosialisme ialah pelaksanaan dari pelajaran Yesus Kristus. Tetapi anggota yang lainnya mengartikan bahwa sosialisme ialah pengawasan atas perusahaan-perusahaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena hebat dan pentingnya perdebatan itu, maka majelis memutuskan akan mengumpulkan segala pendapat-pendapat yang berbeda itu dalam satu buku yang diberi nama "*What is socialism*".⁵⁴

Pendapat Janet yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad: bahwa yang dimaksud Sosialisme itu, ialah tiap-tiap pelajaran, yang mengajar bahwa negara berhak memberikan pemerataan kekayaan yang ada di antara manusia, dan berhak melaksanakan keseimbangan menurut hukum, dengan jalan mengambil dari mereka yang mempunyai kelebihan untuk diberikan kepada mereka yang kekurangan; dan tindakan ini jangan hanya diambil terus menerus.⁵⁵ Demikian pula Adolf Held yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad menambahkan bahwa sosialisme itu menghendaki penundukan kemauan perseorangan kepada kemauan masyarakat. Sedang Kirkup berpendirian bahwa kokok dari segala macam-macam pendapat itu ialah para sosialis menghendaki supaya semua industri dikemudian oleh masyarakat dan hasilnya dibagi dengan adil. Baik professor Diepenhorst maupun Kirkup keduanya sependapat bahwa amat sulit untuk menentukan arti sosialisme,

⁵⁴*Ibid*, h. 99

⁵⁵*Ibid*, h. 99

karena amat jauh perbedaan faham antara ahli yang telah menulis tentang soal itu. Sedangkan Mr. A. Luhrs dalam bukunya "*Burgerlijk en Socialistische denken*" (1946), karena menengok berbagai macam gerakan sosialis yang mengatakan bahwa seseorang yang mengaku dirinya sosialis, masih harus diselidiki lagi, Faham sosialis manakah yang dipegangnya? Orang harus mengakui bahwa gerakan sosialis yang pertama itu adalah dilakukan oleh Abu Dzarr, seorang pemimpin Islam yang hidup dalam abad ke-6/7. Gerakan itu dimulai dari kota Damascus, Syiria, ditengah lingkungan tuan-tuan tanah dan kaum-kaum agana nasrani dengan budak-budak belian dan rakyat umum.

Di samping tujuan dan pendiriannya tegas, serta konsekuwen dan panatik memegang keyakinannya dan berjuang terus menantang pemerintah Mu'awiyah yang dipandangnya reaksioner-penghianat, tetapi juga Abu Zarr sebagai pemimpin sanggup menderita dan mengakhiri hayatnya dengan kepahitan yang luar biasa sebagai korban dari pendiriannya itu. Semboyan Abu Dzarr al Giffri yang terkenal "Wahai kaum yang mampu, bantulah kaum proletar yang tidak mempunya".⁵⁶

Dua orang perna menulis sautu buku bernama "*Teori ekonomi sosial*" pada tahun 1938 M, di Amerika yaitu Oscar Lange, Lektor Ilmu Ekonomi University Of California, Lektor (luar biasa) di university Craeowu dan Polish free University di Warsawa. Buku itu diberi kata penuntun oleh Fred M. Tylor, Profesor tentang politik perekonomia dan keuangan, University of

⁵⁶Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Ibid*, h. 98-101

Michigan. Buku tersebut diberi prakata pendahuluan yang lebar dan panjang oleh Benjamin E. Lippineott, Assistant profesor in The Political Science, University of Misnessota. Secara terus terang Lippineott memulai tulisannya dengan berkata: “ Dalam tradisi kuno kapitalise, terdaapt kepercayaan bahwa perekonomian sosialis itu adalah suatu perekonomian yang tidak dapat di peraktekan. Seeperti halnya dengan kepercayaan-kepercayaan lainnya di dalam kebudayaan kapitalis, maka kepercayaan ini tidak saja banyak dianut oeh orang-orang awam kebanyakan, tetapi juga oleh ahli-ahli ekonomi. Dari semua keberatan-keberatan yang diajukan terhadap sosialisme, tidak satupun yang berakata lebih daripada ucapan ini, “Bahwa sosialisme itu tidak dapat dilaksnakan dalam praktek”.⁵⁷

Ruslan Abdulgani dalam bukunya “*Sosialisme Indonesia*”, yang dikutip oleh Zainal Abidin Ahmad, ia mencoba menguraikan cita-citanya dengan uraian yang panjang lebar tentang “*Sosialisme Utophia*” dan “*Sosialisme Ilmiah*” lalu akhirnya, “*Usaha mensynthesir Islam dan Marxisme*” dan juga usaha mensynthesir Islam, Marxisme dan Nasionalisme”.⁵⁸

Dari uraian di atas dengan tidak mengurangi jasa para pahlawan sosialis yang hidup dikemudian hari, adalah merupakan suatu kehormatan bagi dunia pada umumnya dan kaum sosialis khususnya, apabila mereka mengakui bahwa gerakan sosialis yang agak teratu: sudah timbul pertama kali pada abad

⁵⁷Oskar Lange dan Fred M. Taylor., *Teori Ekonomi Sosialisme*, (Minnesota, USA, 1938), diterjemahkan oleh Drs. Paul Sitohang (Jakarta, Bharata, 1964), h. 60

⁵⁸Zainal Abidin Ahmad, *Op-cit*, h. 107

ke-6/7 M. di bawah pimpinan seorang muslim Abu Dzarr al-Giffari. Dengan penjelasan ini bukanlah merupakan tujuan menyatakan bahwa haluan sosialis itu sesuai dengan ajaran Islam di suatu sisi tetapi di sisi yang lain tidak ada persamaan karena haluan sosialis maupun paham atheis (tidak bertuhan), hanya mementingkan materi saja.

3. Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Islam

Dalam wacana perekonomian, setidaknya-tidaknya ada dua sistem ekonomi besar yang dominan dalam literatur ekonomi yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada filosofi *Individualis* atau *selfishness* serta bekerjasama *invisible hand* sehingga memunculkan persaingan di pasar yang selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi, serta kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kompetisi tersebut didukung pula dengan adanya kebebasan pemilikan atau penguasaan aset secara individu. Berbeda dengan sistem ekonomi sosialis di mana faktor produksi diakui negara, sehingga eksploitasi sesama individu dapat dihindari, akan tetapi karena mengabaikan sistem pasar, maka telah membunuh gairah untuk berkompetisi yang selanjutnya berpengaruh negatif terhadap efisiensi.

Sistem ekonomi islam⁵⁹ memiliki perbedaan yang sangat jauh dan fundamental terhadap kedua sistem ekonomi di atas. Adapun dasar dari ekonomi

⁵⁹*Islam* tidak saja berarti selamat, sejahtera dan tunduk serta penyerahan diri secara total untuk mendapat keselamatan, namun bukanlah sebuah agama yang hanya memuat dogma, kumpulan ritus

Islam diturunkan dari kerja sama (bukan kompetisi), serta adanya keseimbangan antara individu dengan kepentingan masyarakat yang semuanya dibangun atas dasar Syari'ah. Prilaku manusia (seperti produsen atau konsumen) dalam ekonomi Islam adalah jujur, adil, tidak tampak karena mereka adalah makhluk yang beriman.⁶⁰ Sistem pasar tetap berperan, akan tetapi tidak seluruh persoalan ekonomi umat harus dan mampu diselesaikan melalui mekanisme pasar seperti keadilan, pemerataan, moral dan sebagainya. Sehingga dengan dasar keimanan tersebut mereka percaya bahwa segala perbuatan termasuk di dalamnya perbuatan ekonomi yang dilakukan di dunia, akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Maka sebagai orang beriman, mereka percaya bahwa ada dua tahapan kehidupan manusia (baca: dunia dan akhirat) di mana segala perbuatan manusia di bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di akhirat nanti (accountability). Oleh karena itu fondasi *self interest* dan *invisible hand*-nya Adam Smith yang dipakai sebagai dasar dalam mengembangkan teori-teori ekonomi konvensional yang dikenal sekarang ini harus dihilangkan atau paling tidak

semata, tetapi lebih luas lagi dalam makna yang lebih utuh Islam adalah sebuah doktrin, world view, sebuah sistem ekonomi, sosial, politik dan juga budaya, yang beralaskan pada paradigma tauhid, selanjutnya baca dalam Nourrouzaman Shiddiqi yang berjudul *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, pada hal. 290. Muhammad . . . Baqir Sadr (seorang pakar dalam ekonomi Islam kontemporer) menjelaskan bahwa Islam bersifat komprehensif dan menyeluruh yang menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan manusia, selanjutnya baca dalam Farhad Nomani dan Ali Rehnema, *Islamic Economic System*, (malaysia; Business Information Press, 1995), hal. 44.

⁶⁰M. Husein Sawit, *M etodologi Penelitian Ekonomi Islam; perlukah berbeda?* , Dalam Seminar Nasional, yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi, (Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia, 1997). H. 2

“diminimalisasikan” dalam rangka membentuk sistem yang berbeda dari ekonomi konvensional, salah satunya dengan menghilangkan paradigma bunga.⁶¹

Sedangkan gagasan mengenai konsep ekonomi Islam sebenarnya baru muncul secara internasional pada sekitar belahan kedua dasawarsa 70-an, ketika untuk pertama kali diselenggarakan Konferensi Internasional tentang ekonomi Islam di Makkah, pada tahun 1976 yang ditandai oleh pertumbuhan fantastis lembaga perbankan Islam di berbagai belahan dunia. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam tersebut belum pernah dibahas sebelumnya. Dan pembahasan secara modern tentang ekonomi Islam yang bersifat filosofis sudah ada sejak permulaan dasawarsa 50-an dan meningkat pada dasawarsa selanjutnya mengenai sistem ekonomi, pembangunan ekonomi, sejarah pemikiran ekonomi dan analisis ekonomi yang sifatnya empiris. Pada dasawarsa 70-an, tulisan-tulisan serupa terus berkembang, baru sekitar belahan kedua dasawarsa itu, mulai muncul teori-teori ekonomi yang memiliki model-model ekonometri, setelah munculnya sarjana-sarjana ekonomi angkatan baru, terutama lulusan universitas-universitas Amerika.⁶²

Jika kita melihat kronologi sejarahnya, Islam sudah memiliki pemikir-pemikir ekonomi kaliber dunia sejak abad kedelapan tahun Masehi. Di sana tercatat beberapa nama besar seperti Abu Yusuf (731-798) yang banyak

⁶¹M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, (int. Isalaic Pub. House, and the Intern. Institute of Islamic Thought : Herndon VA, 1992), hal 6. dan M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 312.

⁶²M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah; Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung; Penerbit Mizan, 1987), h. 15.

menitikberatkan pada masalah keuangan (*public finance*), perpajakan dan sektor pertanian. Beliau mengajukan pemikiran tentang kelebihan sistem pajak yang proporsional dengan sistem yang dikenakan secara tetap (*lumpsum taxation*). Kemudian Ibn Taimiyyah (1262-1328) yang walaupun beliau seorang ahli dalam dunia pengobatan, sementara dalam ekonomi bisa dilihat dari tesis singkatnya yang tertuang dalam *Tadbir al-Manzel*, beliau mengemukakan pentingnya elemen dari masyarakat politik, organisasi sosial dan manajemen pendapatan dan pengeluaran. Menurutnya pengeluaran harus tunduk pada keadilan yang mensyaratkan perlunya jalan *iqtisad* (pemuahan kebutuhan dalam keadaan terbatas). Jelas di sini bahwa segala pengeluaran harus didasarkan pada prinsip optimalisasi. Selanjutnya Ibnu Khaldun disebut sebagai pelopor pemikiran ekonomi Islam, seperti teori nilai, hukum penawaran dan permintaan, produksi dan distribusi, keuangan dan sebagainya.⁶³

Lebih lanjut menurut Boulakia (1971), beberapa konsep ekonomi yang diajukan oleh beberapa pemikiran Barat seperti Adam Smith, David Ricardo dan Robert Malthus, sudah ditulis oleh Ibn Khaldun lebih kurang empat abad sebelum bukunya Adam Smith yang terkenal itu terbit. Dengan demikian adalah keliru kiranya, klaim kebanyakan atau sementara orang yang berpendapat bahwa Adam Smith adalah “nabi” ekonomi modern.⁶⁴

⁶³Muhammad Akhyar Adnan, *Analisis SWOT Pengembangan Ekonomi Islam*, makalah STAIN Surakarta, Surakarta, 17 Mei 1998, hal. 1. Baca juga Munrahim Misanam, *Pendekatan Akademik dalam Paradigma Ekonomi Islam*, *Ibid*, h. 3-4.

⁶⁴Muhammad SAW Akhyar Adnan, *Ibid*, hal. 1.

Sementara di Indonesia perhatian terhadap pengembangan teori ekonomi yang bertolak dari keislaman (saat itu) boleh dikatakan tidak ada, kecuali sifatnya pribadi seperti Dr. A.M. Saefuddin, Dr. Halide dan Dr. Murasa Saekaniputra. Sebelumnya Syafruddin Prawiranegara, seorang teknokrat terkemuka sejak tahun 1946 hingga sekitar 1958 pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan “sistem ekonomi Islam” dalam kesempatan lahirnya HUSAMI (Himpunan Usaha Muslim Indonesia). Penjelasan tersebut menurut Dawam Rahardjo sebagai penjelasan lebih lanjut dari apa yang ditulisnya pada tahun 1951 yang berjudul “Motif atau Prinsip Ekonomi Diukur menurut Hukum Islam”, dan penjelasan itu sebenarnya belum menjelaskan mengenai “sistem” melainkan moral ekonomi menurut pandangan Islam.⁶⁵

Namun jika kita melihat saat ini minat terhadap ekonomi Islam baik di dunia Internasional (contohnya di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Sudan, Yordania, Pakistan, Malaysia yangmana negara-negara ini termasuk negara yang benar-benar melaksanakan zakat dan sebagai salah satu alternatif dalam memberantaskan kemiskinan)⁶⁶ maupun di Indonesia sudah sangat besar, misalnya di Indonesia (secara resmi/oprasional baru diakui keberadaannya pada tahun 1991) dan pada tataran praktis misalnya, sudah ada Bank Syari’ah, Asuransi Takaful, BMT, Bank Muamalat Indonesia lembaga BAZIZ dan baru-

⁶⁵*Ibid*, hal. 16

⁶⁶J. Barkley Rosser, Jr. Marina V. Rosser, *Comparative Economics in A Transforming World Economy*, (USA; Penerbit Mirror Higher Education Group, 1996). H. 115

baru ini ada bursa Efek yang islami yang mempunyai signifikansi besar terhadap pengembangan ekonomi umat.

Lebih lanjut pengembangan ekonomi Islam dilakukan dalam berbagai bentuk, dan yang paling menonjol adalah usaha pembangunan teori pada tingkat abstrak universitas etika ekonomi dan model-model ekonometri. Di berbagai universitas telah dibentuk departemen ekonomi, secara khusus mengajarkan teori-teori ekonomi seperti *Islamic University*, makkah dan *Islamic University of Omm Durman*, Sudah serta kegiatan riset dan penelitian telah di selenggarakan di lembaga-lembaga yang khusus dibentuk seperti *International Centre for Research in Islamic Economics*, King Abdul Aziz University, Jeddah, *The Islamic Research And Training Institute* pada Islamic Development Bank, Jeddah, *The Training Institute for Islamic Banking and Economics*, yang dibentuk oleh International Association of Islamic University di Islamabad.⁶⁷ Dan bentuk pengembangan secara empirik nampaknya masih terbatas, tapi oprasionalisasi beberapa konsep telah dilaksanakan, yang terkenal paling maju adalah pendirian bank-bank komersial Islam, lembaga-lembaga keuangan dan investasi serta bank pembangunan yang membantu membiyayai berbagai proyek pembangunan negara Islam, melalui IDB. Sementara konsep lain yang mulai dilaksanakan adalah pengumpulan dana zakat untuk pembangunan dan bantuan sosial, baik untuk masyarakat setempat maupun masyarakat Islam di luar negeri.

⁶⁷M. Dawam Rahardjo, *Op-citb*, h. 64

Demikian juga di Indonesia sudah banyak universitas-universitas yang kusus membuka konsentrasi ekonomi Islam seperti Magister Studi yang khusus membuka konsentrasi ekonomi Islam seperti Magister Studi Islam, UII, Yogyakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, UNAIR di Surabaya dan lain-lainnya, maupun pengembangan melalui seminar-seminar dalam rangka mensosialisasikan ekonomi Islam kepada masyarakat luas.

a. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Hasanuzzaman,⁶⁸ ekonomi Islam yaitu “ *Islamic Economics is the knowledge and application of injunction and riles of the Syari'ah that prevent injustice in the aqcusition and disposal of material resources in order to provide to satisfaction to human being and anable tehem to perform their abligation to Allah and the society*”.

Di dalam definisi tersebut terungkap aktivitas ekonomi yaitu dari kata-kata “perolehan” dan “pembagian”. Aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah Syari'ah yang di dalamnya mengandung perintah (injunction) dan

⁶⁸S.M. Hasanuzzaman, dalam karangannya, *Definition of Islamic Economics*, Jurnal of Research in Islamic Economics, (vol. 1, No.2/2984), hal .50

peraturan (rules) tentang anjuran/perintah dan larangan. Pengertian “memberikan kepuasan terhadap manusia” merupakan sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian “memungkinkan manusia melaksanakan tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat”, dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi tapi juga mengakomodasikan peran pemerintah dalam mengatur dan merencanakan semua aktifitas ekonomi termasuk didalamnya pajak dan zakat.⁶⁹

Jadi paradigma ekonomi yang dikembangkan dalam Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi dengan tujuan utama mencapai kemenangan dan kebahagiaan (falaakh) di akhirat yang menekankan keseimbangan antara dimensi spritual-kolektif. Namun demikian peranan mekanisme harga dan pasar tetap merupakan suatu instrumen yang berperan dalam mengoleksikan sumberdaya secara efisien sebagai suatu upaya menyejahterakan masyarakat.⁷⁰

Selanjutnya M. Dawam Rahardjo menyatakan bahwa definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik pengertian yaitu, *Pertama*, pengertian tentang ekonomi itu sendiri, yakni “pengetahuan tentang penggalan dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia”. *Kedua*, mengenai “penerapam perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syari’at” dengan kegiatan ekonomi, dalam rangka “melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat”. *Ketiga*, keterangan mengenai predikat “Islam” dalam ilmu

⁶⁹Husein Sawit, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; perlukah berbeda, Op-cit*, h. 3.

⁷⁰Imamudin Yuliadi, *Metodologi Ekonomi Islam; Utilitas*, (No. 9. Tahun ke-7/1999). Ha84

ekonomi.⁷¹ Selanjutnya jika telah diketahui masalah ilmu ekonomi, maka tugas kita dalam melakukan penelitian terhadap ekonomi Islam adalah mengenai ajaran Islam atau pengetahuan Syari'ah pada umumnya dan bidang yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya bidang mu'amalah.

Dan Dr. Munawar Iqbal, Direktur Institut Internasional Islamic University, Islamabad, Pakistan mengatakan :

Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syari'at Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan Hadits adalah batu-ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam.⁷²

Sementara Mohamed Aslam Mohamed Haneef, mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah *"An approach to interpreting and solving man's economic problems based on the values, norm, laws and institutions in, and derived from, the sources of knowledge in Islam"*.⁷³

Berdasarkan definisi di atas, ekonomi Islam sebagai sistem pemikiran dan kebijakan yang merupakan interpretasi terhadap sumber pengetahuan dalam Islam. Dan dalam mengembangkan pemikiran dan kebijakan ekonomi, metodologinya harus dibentuk sebagaimana aturan dalam melakukan interpretasi dan mengembangkan disiplinnya. Adapun metodologi Islam tersebut meliputi

⁷¹M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta, Penerbit Lembaga Studi Agama dan Filsafat, cet. 1, 1999) h. 20.

⁷²M. Dawam Rahardjo, *Op-citb*, h. 22

⁷³Mohamed Aslam Mohamed Haneef, *Islam, The Islamic Worldview, and Islamic Economics*, Malaysia, IUM (Journal of Economics & Management 5, No. 1), International Islamic University Malaysia Press, 1997, h. 50.

“Prinsip-prinsip pengetahuan dan metode pengajaran yang didasarkan pada hukum-hukum Syari’ah” (dan kami menambahkan nilai, norma dan institusi). Dari bagian yang mendukung pembuktian.⁷⁴ Bukti-bukti ini terdiri dari bukti pokok dan kedua berdasarkan sumber-sumber hukum dan nilai-nilai Islam. Sumber ini bisa dikategorikan kedalam “wahyu, akal dan alam”.

Lebih jauh lagi Akhyar Adnan menjelaskan setidaknya ada landasan filosofis, bahwa sistem ekonomi Islam memiliki beberapa ciri yaitu: tauhid, rububiyah, khilafah, tazkiyah, mas’uliyah dan ukhuwah. Dan pada tataran yang sedikit lebih teknis, secara prinsip sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep-konsep yang sudah ada, misalnya menyangkut pemilikan secara umum, pemilikan pribadi, distribusi kekayaan, moneter, larangan atas riba, zakat, larangan atas beberapa keinginan ekonomi, nilai-nilai positif yang harus dipatuhi dan nilai-nilai negatif yang harus ditinggalkan. Beliau melanjutkan bahwa:⁷⁵

“pemahaman yang mendalam membuktikan jika sesungguhnya sistem yang ditawarkan islam jauh lebih sempurna dibandingkan dengan sistem yang lain; baik sosialisme dan kapitalisme. Tidak sedikit yang mengistilahkan sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berkeadilan”.

Selanjutnya Suroso Imam Zadjuli, mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi

⁷⁴Mohamed Aslam Mohamed Haneef, *Op-cit*, h. 50

⁷⁵Muhammad SAW Akhyar Adnan, *Sistem Ekonomi Islam Memiliki beberapa Ciri.*, *Kabar Kampus*, (29 Desember 1999), hal. 3

individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (Sunnatullah). Sumber terpenting dalam sistem ekonomi Islam adalah al-Qur'an, al-Hadits dan Suri Tauladan perilaku ekonomi Islam pada zaman khalifah. Namun lanjutnya hingga saat ini belum terdapat satu literatur pun yang mengemukakan Sistem Ekonomi Islam secara totalitas/menyeluruh, yang ada baru merupakan pembahasan secara parsial saja seperti halnya zakat, Bank Islam, Riba dan sebagainya. Lebih jauh beliau mengemukakan bahwa SEI (Sistem Ekonomi Islam) merupakan sistem yang mandiri dan memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem-sistem yang lain. Adapun yang membedakan SEI dengan sistem ekonomi yang lain adalah :⁷⁶

- a. Asumsi Dasar/Norma Pokok ataupun aturan main dalam proses interaksi kegiatan ekonomi yang di berlakukan. Dalam SEI asumsi dasarnya adalah "Syari'ah Islam" yang berlaku secara komprehensif dan universal.
- b. Prinsip Ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
- c. Motif Ekonomi Islam adalah mencari "keberuntungan" di dunia dan di akhirat selaku Khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas

Lebih lanjut penulis akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalisme dengan menggunakan *aksioma etika*

⁷⁶Suroso Imam Zadjuli, *Op-cit*, h. 8-9

Islam.⁷⁷ *Pertama*, Kapitalisme gagal menjejawantahkan kesatuan kehidupan (makna hidup yang sesungguhnya) dengan penekanan yang berlebihan pada nilai material manusia dengan mengorbankan aspirasi ruhaniyah. Padahal sesungguhnya penghambaan terhadap perolehan material akan membekukan sifat kreatif manusia dan mengeringkan sumber kebahagiaan yang mengalir dari karya-karya kreatif tersebut. Menurut sudut pandang Islami, sikap seperti itu mengaburkan usaha manusia dengan cara yang membahayakan, malah harus dipalingkan untuk mewujudkan sifat teomorfisnya. Dalam ayat al-Qur'an disebutkan : "Yang mengumpulkan kekayaan (di dunia ini) dan menumpuk-numpuknya; ia mengira bahwa kekayaannya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam api yang menganga (Q.S. al-Humazah: 2-4). Karena itu, perolehan uang sangat disusutkan posisinya dalam skala nilai manusia menurut etika Islam. *Kedua*, kapitalisme merusak keseimbangan alam. Sebab kekayaan terpusat pada segelintir orang; dengan alasan bahwa kaum kayalah yang berhak melakukan investasi. Sementara dalam Islam, kehidupan adalah saling bekerja sama, walaupun sama sekali tidak menafikan persaingan, namun Islam tidak mengakui sebagai cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan manusia. Sebab di bawah panji Kapitalisme, persaingan bebas sangat memperparah ketidak aadilan sosial. *Ketiga*, kapitalisme tidak menitikberatkan pada tanggung jawab kolektif dalam pengertian dan tingkat

⁷⁷Syed Nawab Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*, (Bandung; Mizan, 1985), h. 116.

yang sama dengan yang dilakukan Islam. Memang benar, bahwa tanggung jawab dipaksakan atas individu melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti pajak pendapatan progresif. Padahal sesungguhnya menghindari dari kewajiban membayar pajak akan mengakibatkan ketidakpekaan individu terhadap tanggung jawab sosial dan Islam menolak perilaku sosial yang tidak bertanggung jawab.

Maka sesungguhnya lahirilah “ilmu ekonomi Islam” sebagai kebenaran, perlu diupayakan untuk menuntun kebijaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka regenerasi kebudayaan dari *homo-economicus* menjadi *homo-Islamicus*. Lebih jauh lagi berhasilnya proses regenerasi alam dalam arti islamisasi ekonomi bergantung pada ketepatan strategi untuk memulai perjalanan panjang dalam mengubah struktur sosial yang opresif dan tidak adil yang selama ini ada.⁷⁸

Walaupun demikian, keberadaan ekonomi Islam tersebut tidak berarti kita harus menghapuskan model-model ekonomi yang sudah ada saat ini, tetapi seharusnya ekonomi Islam dapat memberikan kontribusinya dengan melengkapi dan mengoreksi apa yang sudah ada dengan teori ekonomi Islam.

Dan untuk mewujudkan cita-cita serta keinginan dalam menerapkan sistem ekonomi Islam, dibutuhkan bangunan teori ekonomi yang mendukungnya, sejauh mana teori-teori ini bisa berjalan maka perlu pengujian. Pengujian teori ini dapat dilakukan kalau konsep-konsep ini menuntut adanya lembaga-lembaga yang

⁷⁸ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 223.

mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi islam itu. Selanjtnya ini lembaga tersebut masih masih sangat terbatas namun perkembangannya positif ada.⁷⁹

Jadi ekonomi Islam tersebut, memang ada dan bisa dibuktikan secara *normatif namun empirik*.⁸⁰ Seperti yang dikatakan oleh Islahi dalam bukunya yang berjudul *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, walaupun menurut Ibn Khaldun pada kenyataannya pemikiran ekonomi Ibn Taimiyah lebih bersifat *normatif* dibandingkan nuansa *positif*.

Adapun yang dikatakan *ekonomi positif* adalah suatu pembahasan mengenai kondisi riil dalam hubungan ekonomi atau “what is”. Sedangkan *ekonomi normatif* adalah suatu pembahasan mengenai apa saja seharusnya dilakukan berdasarkan nilai tertentu atau “what ought to be”. Sumber nilai ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah tidak saja berbicara persoalan pada dataran normatif tapi juga menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kondisi riil dalam masyarakat, contohnya: “Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup”.⁸¹ Ayat ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan/kekayaan akan menimbulkan berbagai macam perilaku yang ekksesif atau melampaui batas. Sementara dalam ayat lain dijelaskan: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan

⁷⁹Adi Suandi Hamid, *Kurikulum dan Silabi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; LP3EI-UUI, 1998), h. 5

⁸⁰Selanjutnya Prof. DR. Munrahim Misanam, dalam *Diskusi Panel: Paradigma Ekonomi Islam; Upaya Menyiapkan Konsep Ekonomi Islam Alternatif Merespon Era Globalisasi*, (Yogyakarta; 1998), h. 1.

⁸¹Q.S. Al-‘Alaq; 6-7.

kepada apa-apa yang telah diinginkan yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah-ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik (surga)".⁸² Dari ayat tersebut di atas menerangkan kecendrungan umum masyarakat atau seseorang yang mengasumsikan perilaku masyarakat terhadap harta yang tak terbatas. Namun diingatkan dalam ayat tersebut bahwa di akhirat (surga) jauh lebih tinggi nilainya daripada yang ada di dunia. Berangkat dari sini kita dapat mengambil suatu benang merah bahwa kecendrungan masyarakat akan harta merupakan sesuatu yang alami namun perilaku tersebut harus di kendalikan dengan adanya ganjaran yang lebih besar di akhirat. Maka sesungguhnya dalam perspektif Islam aspek normatif dan positif saling berkaitan, sebab setiap upaya memisahkan kedua aspek itu akan berakibat timbulnya distorsi dalam kehidupan masyarakat.⁸³

Namun demikian penulis masih ragu jika keberadaan ekonomi Islam tersebut kita mendasarkan diri/mengacu pada praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sebab menurut hemat penulis apa yang dilakukan Nabi bukanlah metode/ilmu ekonomi Islam seperti yang ada selama ini dan jika ada secara mikro ekonomi, namun belum tersusun secara sistematis tentunya belum bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu ekonomi yang memang sudah "*taken for granted*" dalam agama (baca: Islam). Tetapi paling tidak, kita berusaha untuk

⁸²Q.S. Ali Imran; 140

⁸³Imamudin Yuliadi, *Metodologi Ekonomi Islam, Op-cit*, h. 85.

menggantikan *value judgement* ekonomi non-Islam (dalam hal ini ekonomi Kapitalis) dengan *value judgement* Islam dan menambah stock ekonomi mengenai ketegasan positif dengan ketentuan Islam, selanjutnya menjalankan konsekwensi-konsekwensinya; lebih jauh lagi kita mempunyai semangat dan memang dan memang “harus” untuk mensosialisasikan dan mengaplikasikannya sedini mungkin.

Selanjutnya jika keberadaan (ekonomi Islam) benar-benar diakui sebagai sebuah sistem ekonomi yang mandiri, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi, tentunya hal ini akan mudah dilakukan kalau teori ekonomi Islam itu sudah memiliki *bentuk standard dan isi yang jelas serta teruji* dalam pelaksanaannya, dan mampu memecahkan problem ekonomi yang ada di tengah-tengah kemampuan teori-teori ekonomi yang sudah ada. Tetapi pada dasarnya kita harus memulai dari sekarang untuk terus mengedepankan semangat untuk menerapkan ekonomi Islam (dengan memulainya dari diri kita sendiri), sebab menurut hemat penulis sistem ekonomi Islam ini akan terus berkembang (dinamis) seiring dengan perubahan waktu dan munculnya kesadaran masyarakat bahwa sistem ekonomi yang ada sekarang jauh dari norma-norma yang dianjurkan agama.

C. Prinsip-prinsip Dasar dan Tujuan Sistem Ekonomi

1. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Kapitalis

a. Kebebasan Memiliki Harta Secara Individu

Semua negara mengetahui hak kebebasan seseorang atau individu masing-masing untuk memiliki harta kekayaannya. Setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa adanya kendala atau hambatan. Seseorang mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki.

Setiap individu berhak memiliki manfa'at yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.

b. Kebebasan Ekonomi dan Persaingan Bebas

Setiap orang untuk mendirikan, mengorganisasi dan mengelola perusahaan yang dikehendakinya. Individu juga berhak terjun dalam segala bidang perniagaan dan memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, selagi aktivitas yang dilakukan itu syah dan menurut peraturan negara tersebut. Berdasarkan prinsip ekonomi dan tuntutananya, yaitu persaingan bebas, maka untuk itu setiap orang dapat menggunakan potensi fisiknya, mental dan sumber-sumber yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi kepentingan individu tersebut.

c. Ketimpangan Ekonomi

Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ketidak samaan kesempatan mewujudkan jurang perdebatan diantara golongan kaya bertambah kaya dan golongan miskin semakin melarat.⁸⁴

Keadaan masyarakat atau bangsa dalam suatu negara tidak boleh terjadi dalam keadaan adanya jurang perbedaan antara golongan kaya atau miskin karena akan timbul dampak negatif yang tidak dikehendaki, bagi mereka yang kaya akan berbuat aniaya (sewenang-wenang) pada masyarakat kecil (fakir miskin), karena mereka kurang memiliki pengetahuan agama (etika) yang baik dalam mengelola perekonomiannya. Sedangkan dalam ajaran ekonomi Islam tidak demikian. Mereka yang kaya diwajibkan menolong yang miskin, baik melalui zakat atau infaq-infaq yang lainnya, sehingga terdapat keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Islam tidak sependapat dengan cara-cara ekonomi Kapitalis.

2. Kebaikan-kebaikan Sistem Ekonomi Kapitalis

Adapun kebaikan-kebaikan sistem ekonomi Kapitalis adalah sebagai berikut :

⁸⁴Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta; Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid I, h. 2.

- a. Mereka yang mendukung sistem ekonomi Kapitalis menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mereka sebut dasar hukum ekonomi dan menegaskan bahwa jika dasar hukum diterapkan dengan bebas, ia akan meningkatkan produktifitas. Hali ini disamping berupaya meningkatkan kekayaan negara, tetapi juga dapat mewujudkan distribusi kekayaan yang rasional dalam masyarakat.
- b. Persaingan bebas diantara perorangan akan menimbulkan tahap 'produksi' dan 'tingkat harga' pada tingkat yang wajar dan akan membantu memperoleh penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Persaingan akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Karena itu, dasar hukum akan mempertahankan semua perkara pada tahap yang mendasar.
- c. Para pakar ekonomi kapitalis menjelaskan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang baik, sama halnya dengan maksud untuk memaksimalkan produksi. Semakin kecil kesempatan untuk memperoleh keuntunganm, semakin kurang semangat untuk giat bekerja dan meningkatkan setiap orang untuk memperoleh pendapatan sebanyak mungkin, maka setiap individu akan berupaya bekerja keras dengan tenaga yang maksimal serta berusaha untuk melakukan produksi yang maksimum.

Dengan cara tersebut di atas kualitas dan kuantitas produksi akan diperbaiki, semua prinsip produksi yang ada akan digunakan untuk

mencapai motivasi tersebut, barang-barang konsumsi dapat digunakan dengan kuantitas yang besar. Dengan demikian motivasi untuk mendapatkan keuntungan sangat berguna untuk kepentingan perorangan.⁸⁵

3. Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis

Diantara kelemahan-kelemahan sistem ekonomi Kapitalis sebagai berikut :

- a. Kompetisi yang bebas dan tidak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat, apabila hal itu mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, sebagai contoh, hak perorangan yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan pengumpulan kekayaan yang melampaui batas oleh beberapa individu. Hal ini menjadikan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan seterusnya mengakibatkan rusaknya sistem ekonomi.
- b. Persaingan bebas menyebabkan munculnya semangat persaingan diantara individu-individu untuk kepentingan perseorangan dan kepentingan umum akan menimbulkan bahaya dan ketidak selarasan dalam masyarakat. Jika kekayaan hanya dimiliki oleh segelompok kecil perorangan, maka akan mempergunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang jelas mereka akan mengorbankan kepentingan utama masyarakat, karena semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Kompetisi diantara kepentingan perorangan dan masyarakat secara perlahan merupakan bagian terpenting

⁸⁵ *Ibid*, h. 4.

dalam masyarakat keseluruhan, dimana hal tersebut sangat mengganggu sistem ekonomi.

- c. Nilai-nilai moral yang baik seperti persaudaraan, kerja sama, saling tolong-menolong, kasih sayang dan kemurahan hati, tidak berharga dan tidak diperdulikan lagi dalam masyarakat. Nilai-nilai itu akan diantingkan oleh nilai-nilai seperti sifat mementingkan diri sendiri, pendendam dan permusuhan pada sesama. Sejumlah orang bekerja untuk mencapai motivasi pribadi dan tidak terdapat tujuan yang mendorong mereka bekerja untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Adakalanya terdapat individu yang mengesampingkan kepentingan masyarakat umum demi mencapai keinginan pribadi masing-masing.
- d. Perbedaan yang jelas antara hak-hak majikan dan pekerja akan mengakibatkan masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang bersaing yang mempunyai kepentingan-kepentingan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang menerima upah tidak menikmati kesempatan yang sama dengan saingannya yaitu seorang majikan kapitalis tadi, yang mempunyai segala kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, keterampilan teknik yang sempurna dan pekerjaan yang layak. Ketidakadilan ini semakin memperdalam jurang antara yang kaya dan yang miskin.⁸⁶

⁸⁶*Ibid*, h. 107.

Hal demikian itu menyebabkan sifat moral dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak membentuk nilai moral yang luhur dikalangan para ahli, penafsiran yang salah, ide-ide yang keji dan tidak bermoral. Dalam usaha seseorang mengumpulkan kekayaan, ia lebih mengutamakan cara yang curang dan cara-cara hidup yang tidak bermoral, dan berupaya untuk menjadi konglomerat (hartawan) yang menipu orang lain dan memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil.

Ringkasnya dalam sistem ekonomi kapitalis, di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi dibawah penguasaan para ahli, yang mengesampingkan soal-soal kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi mengalirnya kekayaan hanya melalui saluran-saluran yang tidak wajar. Di sisi lain, menjamin kesejahteraan semua pekerja (yang merupakan sebagian faktor produksi) kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Kesempatan dari semua penjelasan di atas merupakan akibat dari keinginan yang tidak terbatas terhadap harta benda dan persaingan bebas.

4. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis

a. Pemilikan harta oleh negara

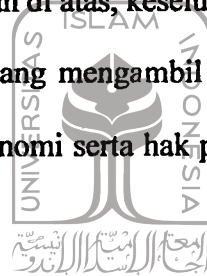
Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak kepemilikan.

b. Kesamaan ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan (walupun sulit ditemukan disemua negara komunis) bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan, setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.

c. Disiplin politik

Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan dibawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi, kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapuskan sama sekali.



5. Kebaikan-kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi Sosialis mempunyai kebaikan-kebaikan sebagai berikut :

- a. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya termasuk makanan sebanyak dua kali sehari, beberapa helai pakaian, kemudian fasilitas kesehatan, serta tempat tinggal dan lain-lain.
- b. Setiap individu mendapat pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara.
- c. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan (negara) yang sempurna diantara produksi dengan penggunaannya, dengan demikian

masalah kelebihan atau kekurangan produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.

- d. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, dan keuntungan yang diperolehnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.⁸⁷

Menurut pendapat penulis walaupun keadaan itu diatur demikian tetapi masing-masing individu tidak merasa bebas sesuai dengan hati nuraninya.

6. Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi Sosialis mempunyai kelemahan sebagai berikut :

- a. Tawar menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak dua kali sehari.
- b. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berfikir serta bertindak. Ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terkait kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin.
- c. Sistem ekonomi Sosialis mencoba untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal dan mengesampingkan pendidikan moral dan latihan individu. Dengan demikian jelas mereka tidak berusaha untuk mencapai kejayaan yang menjadi tujuannya; misalnya karena undang-undang saja belum mencakupi untuk memperbaiki kesalahan seseorang

⁸⁷Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 6.

tanpa disertai dengan pendidikan moral dan latihan. Sebaliknya, dibalik upaya memupuk semangat persaudaraan dan kerja sama yang baik diantara majikan dengan penerima upah, sistem Sosialis menimbulkan rasa permusuhan dan dendam antar mereka. Secara keseluruhan sistem ini mencoba untuk mengubah ketidak samaan kekayaan dengan menghapuskan hak kebebasan individu dan hak terhadap pemilikan yang mengakibatkan hilangnya semangat untuk bekerja lebih giat dan berkurangnya efesiensi kerja buruh.

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa dalam sistem sosialis semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian apabila pencapaian kepuasan kebendaan menajdi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi, maka tidak dapat dihindarkan bahwa masyarakat akan terbagi dalam beberapa kelompok. Seluruh kekuasaan akan berada ditangan golongan kaum buruh (*proletarial*) yang kurang berpendidikan dan beradab, kezaliman, penindasan dan balas dendam, menjadi lebih berbahaya dari pada sistem ekonomi Kapitalis.

7. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

a. Kebebasan peorangan

Seseorang mempunyai hak kebebasan yang sepenuhnya untuk membentuk suatu keputusan dan berpendapatan yang dianggap penting dalam suatu negara Islam. Sebab dengan adanya kebebasan tersebut individu muslim

akan dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan tidak akan terjadi kekacauan dalam masyarakat.

b. Hak terhadap harta kekayaan

Islam mengakui hak perseorangan untuk memiliki harta kekayaan, sekalipun demikian Islam memberikan batasan tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan orang lain dan masyarakat pada umumnya.

c. Perbedaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya perbedaan ekonomi di antara individu-individu, tetapi Islam tidak memberikan perbedaan itu menjadi meluas, ia mencoba menjadikan ketidaksamaan itu dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

d. Jaminan sosial

Setiap perorangan mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan untuk memperoleh kebutuhannya masing-masing, setiap warga negara mendapat jaminan. Hal demikian itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi hajatnya sesuai dengan prinsip 'hak untuk hidup'. Apabila kebutuhan pokok setiap warga negara telah terpenuhi, maka akan terjadi persamaan yang sepenuhnya.

e. Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang perorangan menumpuk kekayaan secara berlebihan dan perlu diambil langkah-langkah untuk melarang perbuatan yang tidak baik itu supaya tidak terjadi dalam sebuah negara.

f. Larangan terhadap organisasi anti sosial

Sistem ekonomi Islam melarang seluruh praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dimasyarakat seperti berjudi, minum arak, riba, menimbun harta, pasar gelap dan sebagainya.

g. Kesejahteraan perorangan dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan perorangan dan sosial masyarakat yang saling membantu satu sama lainnya, bukannya yang saling berkompetisi dan bertentangan antar mereka.⁸⁸

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa Islam mendukung dan menggalakkan kesamaan kehidupan sosial, walaupun tidak menganjurkan kesamaan dalam ekonomi, sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki, tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Bahkan sangat penting sekali bagi setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk betusaha mendapatkan pekerjaan dan nejalankan berbagai aktivitas ekonomi. Sehingga terjadinya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan baik. Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha meredakan konflik perbedaan dalam ekonomi sehingga terwujud kemanfaatan bersama.

⁸⁸Lihat Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 10.

8. Sistem Ekonomi Islam

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada saat ini terdapat dua sistem ekonomi yang menguasai dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sebagai akibat dari penjajahan Barat terhadap dunia Islam baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka kedua sistem ekonomi itu telah dipakai oleh sebagian negara-negara Islam, kedua sistem itu masing-masing memiliki konsep yang bertolak belakang. Sosialisme memiliki konsep ekonomi kolektif, sedangkan kapitalis memiliki konsep kebebasan individu (liberal). Di samping perbedaan yang bertolak belakang, keduanya mempunyai persamaan, yaitu aktivitas perekonomiannya memiliki watak materialisme murni.⁸⁹

Berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berketuhanan. Karena itu aktivitas perekonomian masyarakat muslim, disamping bersifat material, namun didalamnya tidak mengabaikan aspek spiritual (ibadah). Sendi dari aspek spiritual adalah kesadaran individu muslim akan keta'atan kepada Allah SWT, dengan kata lain, manusia itu disamping berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitar, juga ia berhubungan dengan Allah SWT. A.M. Saefuddin⁹⁰ menggambarkan hubungan yang demikian itu sebagai hubungan "triangle" antar Allah SWT, manusia dan alam sekitarnya. Allah dalam hal ini berada pada puncak triangle tersebut,

⁸⁹Lihat Muhammad SAW Syauqi Al-Fanjari, *Ekonomi Islam Masa Kini*, (Bandung; Mizan, 1988), Penerjemah Husaini, h. 60.

⁹⁰A.M. Saefuddin, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Media Dakwah, 1984), h. 3.

sedangkan manusia dan alam sekitarnya berada pada kedua sudut triangle tersebut.

Dengan menempatkan Allah SWT pada puncak atas, maka segala aktivitas ekonomi dalam Islam tidak akan terlepas dari pengawasan dan petunjuk yang diberikan didalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, baik yang menyangkut dengan masalah produksi, distribusi maupun konsumsi.

Allah SWT melarang terhadap cara memperoleh barang produksi, dalam mendistribusikannya atau mengkonsumsinya dengan jalan yang bathil, kecuali dengan aktivitas yang sah dan sehat berdasarkan kebebasan berkehendak serta dibarengi dengan kesukarelaan masing-masing pihak, tidak berbuat curang dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan. Dengan demikian terlihatlah bahwa Islam telah menyelesaikan masalah bagaimana agar manusia dapat memanfaatkan (mengelola) kekayaan yang ada, dan inilah yang sebenarnya dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat.

Karena itu dalam membahas masalah ekonomi, islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, mengelola dan mendistribusikannya. Dengan demikian hukum-hukum yang menyangkut masalah ekonomi dibangun di atas tiga kaidah, kepemilikan (property), pengelolaan kepemilikan dan mendistribusikan kekayaan di tengah-tengah manusia.⁹¹

Hak milik merupakan masalah pokok dalam dunia ekonomi, dari mana ia memperoleh hak milik tersebut dan sejauh mana hak pemilikan itu berada pada

⁹¹Lihat Taqiyuddin An Nabhani, *Op-cit*, h. 61.

manusia serta konsekuensinya yang timbul dari kepemilikan tersebut. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kepemilikan seseorang terhadap suatu benda bersifat absolut, sedangkan dalam sistem sosialis hak milik hanya untuk kaum proletar yang diwakili oleh kepemimpinan diktator. Karena itu dalam sistem ekonomi sosialis kepemilikan itu diatur oleh negara dan secara individual tidak ada hak kepemilikan.

Berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, prinsip-prinsip kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam adalah :

a. Pemilik mutlak adalah Allah SWT

Semua sumber ekonomi adalah milik Allah SWT, hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا... (البقرة: ٢٩)

"Dia lah Allah, yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu ..."

dan ayat 284 :

لِلَّهِ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... (البقرة: ٢٨٤)

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi ..."

yang diberikan kepada manusia untuk dikelola. Dengan demikian kepemilikan bukan berarti penguasaan secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya terbatas pada kemampuan untuk memanfaatkannya. Kepemilikan terhadap sumber-sumber ekonomi dibagi menjadi tiga macam, yaitu kepemilikan individu

(*Private property*), kepemilikan umum (*Collective property*) dan kepemilikan negara (*State property*).

Salah satu contoh kepemilikan individu telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Yahya Ibn 'Urwah R.A. :

من أحيأ أرضاً ميتة فهى له (رواه ابوداود)

"Barang siapa yang memakmurkan tanah kosong yang bukan menjadi milik seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut". (H.R. Abu Dawud).⁹²

Sedangkan kepemilikan umum yang dikelola oleh negara adalah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Khaddasy R.A dari salah seorang shahabat Muhajirin, Nab SAW, R.A. sebagai berikut :

الناس شركاء في ثلاثة في الكلاء والماء والنار (رواه احمد و ابوداود)

"Semua orang miskin berserikat dalam tiga sumber ekonomi, yaitu rumput, air dan api". (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).⁹³

Termasuk ke dalam harta milik umum (negara) ini adalah *baitul mal* kas negara) yang bersumber dari pajak usaha (*kharaj*), *jizyah* (pajak jiwa), *ghanimah* dan *fa'I* (rampasan perang) dan lain sebagainya.

b. Kepemilikan itu terbatas

⁹²Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Sy'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Daru al-fikr, t.t.) Jilid III h. 178.

⁹³*Ibid*, h. 278.

Kepemilikan manusia terhadap sumber ekonomi itu terbatas hanya selama hidupnya. Jika telah meninggal, maka harta itu harus didistribusikan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Menurut An Nabhani⁹⁴ pembatasan kepemilikan itu dengan menggunakan mekanisme tertentu, terlihat pada beberapa hal sebagai berikut.

- 1). Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengambilan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi milik orang lain.
- 2). Dengan cara menentukan mekanisme pengelolaannya.
- 3). Dengan cara menyerahkan tanah *kharajiyah* sebagai milik negara, bukan sebagai milik individu.
- 4). Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa dalam kondisi tertentu (*hak suf'ah*).
- 5). Dengan cara mensuplai orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan syara' (zakat).

c. Sebab-sebab timbulnya kepemilikan

Kepemilikan atas suatu harta mempunyai sebab-sebab syari'ah yang telah ditentukan Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebab-sebab itu, secara garis besarnya terjadi lima sebab, yaitu :

⁹⁴Lihat Taqyuddin An-Nabhani, *Op-cit*, h. 69.

- 1). Harta yang diperoleh sebab bekerja atau usaha, seperti jual-beli, broker/makelar (*samsarah*), kontrak tenaga kerja (*ijarah*) dan sebagainya.
- 2). Harta yang didapat karena kematian pemilik harta, seperti warisan.
- 3). Harta yang diperoleh dengan jalan adanya ketentuan syara' bagi orang yang tidak mampu atau tidak dapat memenuhi hajatnya secara minimal, seperti zakat, infaq dan shadaqah.
- 4). Harta yang diperoleh dari pemberian negara, seperti pembagian hasil *ghanimah*.
- 5). Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau jasa, seperti hibah dan hadiah.



9. Praktek Ekonomi dan Tujuannya

a. Sistem Kapitalis, Sosialis dan Islam

Pada prinsipnya sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dan beberapa hal, merupakan pertentangan antara keduanya dan ia berada dipertengahan (keseimbangan). Bahkan ciri ini merupakan jiwanya. Seperti halnya manusia memiliki jiwa untuk hidup, maka disiplin hidup pun memiliki jiwa untuk menjalankannya. Jiwa bagi disiplin juga berfungsi sebagai peraturan untuk membedakan satu disiplin dengan

disiplin lainnya. Contoh, disiplin Islam berbeda dengan disiplin sosialisme dan kapitalisme.⁹⁵

b. Individualisme Asas Kapitalisme

Prinsip dasar kapitalisme nampak jelas pada egoisme, bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkan dan membelanjakannya. Pemikiran individualismenya sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain kecuali ada manfaat yang diraihinya. Mereka tidak mementingkan kemaslahatan orang lain, apabila hal itu bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Slogan mereka adalah “bersaing dengan lawan” dan berusaha untuk mengalahkannya.

Sikap kapitalisme tanpa memperdulikan apa dari siap kecuali untung dalam jumlah besar. Semua cara dihalalkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, yang diingat hanya tertuju uang, uanglah yang dapat menyelesaikan segala masalah, uanglah yang dapat menciptakan negara makmur dan kehidupan tenang. Baginya tempat tumpuan, tempat peribadatan yang terbesar untuk menyembah uang adalah pasar dan bank, sehingga mereka menilai kedudukan manusia sesuai dengan adanya pengaruh uang yang dipunyainya.

Individu dalam sistem kapitalis adalah merupakan salah satu proses perputaran ekonomi. Perorangan merupakan penggerak dan sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonominya. Negara tidak berhak mengatur individu, jelasnya

⁹⁵Qardlawi, *Op-cit*, h. 69.

negara harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada perorangan. Perorangan bebas berbuat sekehendak hatinya, baik perbuatan yang mendatangkan untung atau sebaliknya. Golongan kapitalis tidak peduli, apakah tindakan mereka itu mengakibatkan dampak positif atau negatif bagi masyarakat. Dalam sistem ekonomi kapitalis, individu mempunyai harga diri dan eksistensi. Terbuka bagi orang kapitalis jalan untuk mengembangkan bakat. Sekalipun demikian, dalam banyak hal, sistem kapitalis merupakan malapetaka atau menyengsarakan bagi kehidupan manusia. Karena dalam paham kapitalisme ditemukan sikap ogi. Bencana yang timbul dari sikap itu, menimbulkan ambisi untuk menumpuk harta kekayaan dalam jumlah besar tanpa pernah merasa puas. Mereka diumpamakan seperti neraka jahannam, yang diungkapkan al-Qur'an dalam surat Qaaf (50) ayat 30, sebagai berikut :

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. (ق: ٣٠)

“Pada hari itu, Kami bertanya kepada neraka jahannam: “Apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, “masih adakah tambahan?”

Sedangkan masyarakat awam atau masyarakat biasa, terutama kaum lemah dan tertindas adalah merupakan masyarakat tersisihkan, dianggap sampah masyarakat dan dianggap tidak ada artinya dalam pembangunan di era globalisasi ini.

c. Sosialisme Menolak Hak Individu

Dasar peraturan sosialisme bertolak belakang dengan kapitalisme. Sosialisme bersikap dan berprasangka buruk terhadap individu, mereka

merampas segala hak pribadi demi mencapai kemaslahatan bersama. Tujuan mereka adalah "kemaslahatan bersama atas kemaslahatan individu". Pengakuan hak milik pribadi bagi kaum sosialis merupakan perbuatan yang dzalim dan menyimpang sehingga harus ditindak. Segala macam usaha yang mengarah kepada pengakuan hak milik pribadi harus dihapuskan/dimusnahkan, sekalipun dengan jalan kekerasan, hal yang demikian itu yang menimbulkan rasa dengki dan dendam. Merupakan satu prinsip penting yang harus diwujudkan adalah "sama rata dan sama rasa".

Untuk mencapai tujuan, paham sosialis berpegang kepada kekuasaan, tepatnya kekuasaan negara dan pemimpin yang diktator. Menurut paham sosialis, negara merupakan penggerak dan pedoman bagi perekonomian rakyat, perorangan sama sekali tidak berperan dan tidak mempunyai andil dalam investasi harta kekayaan negara, tugas rakyat hanya satu, sebagai abdi negara, melaksanakan tugas dari penguasa.

Posisi individu menurut paham sosialis adalah seperti tentara atau prajurit dalam front peperangan, mereka tidak mengatur strategis peperangan dan tidak diikutsertakan dalam memikirkan mana yang terbaik, tugasnya hanya melaksanakan apa yang digariskan oleh komandan tertinggi yang harus dipatuhi. Apabila diperintah maju menyerang, maka mereka mematuhi dan jika dikatakan mundur, maka mereka menarik diri ke belakang. Mereka sekali-kali tidak mempunyai hak bertanya "mengapa" dan "bagaimana", apalagi mengatakan "tidak". Sistem kapitalis memberikan fasilitas kepada

perorangan, sehingga menjadi besar dan bertindak sewenang-wenang, tanpa menghiraukan kemaslahatan masyarakat baik materi maupun spiritual. Sistem sosialis keadaannya sebaliknya dari sistem kapitalis. Paham sosialis menutup semua apa yang diberikan oleh paham kapitalis kepada individu, sehingga perorangan merasa rendah, dan kehilangan kepribadiannya dan mempersembahkannya kepada masyarakat yang tertutup kepada negara. Maka di sini negara berbuat sewenang-wenang, dan negara tidak lebih suatu tempat yang di kelola oleh segelintir manusia. Akhirnya paham sosialis ditemukan beberapa orang, yaitu pejabat negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, sedangkan para konglomerat dalam sistem kapitalis berlaku sewenang-wenang juga.

d. Sistem ekonomi menurut Islam

Sistem ekonomi dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal itu dapat di lihat jelas pada pendirian Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak tersebut diletakan daalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akherat, jiwa dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Diantaranya Al-Qur'an mengungkapkan dalam surat Al-Qashash, ayat 77 sebagai berikut :

وابتغ فيما أتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن
 كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفساد في
 الأرض إن الله لا يحب المفسدين (القصص : ٧٧)

"dan usahakanlah pada apa yang telah di anugraahkan Allah SWT kepadamu akan kesenangan negri akherat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana halnya Allah SWT berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka orang-orang yag berbuat keusakan".

Islam juga bersikap ditengah-tengah (pertengahan) antara iman dan kekuasaan. Ekonomi yang modert tidak menganiaya (mendzalimi) masyarakat, khususnya kaum Dhu'afa (lemah), sebagaimana halnya yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis. Islam tidak menganiaya (mendzalimi) hap perorangan, sebagaimana dilakukan oleh kamu sosialis, terutama paham komunis, tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, dan Islam juga meminta mereka (mukalaf) melaksanakan kewajiban masing-masing. Karena itu Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebajikan.⁹⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di antara tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

- a. Mencari kesenangan akhirat yang diridhoi Allah SWT, dengan segala kapital yang diberikan kepada makhluk-Nya.

⁹⁶Lihat Yusuf Qardlahi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997), Penerjemah; Zainal Arifin, h. 69-71

- b. Dianjurkan memperjuangkan nasib sendiri mencari rizki dan hak milik dengan tidak melupakan hari akhirat, tempat kembali semua makhluk-Nya.
- c. Berbuat baik kepada masyarakat sebagaimana halnya Allah SWT berbuat baik dengan tanpa dihitung-hitung.
- d. Dilarang membuat kerusakan di muka bumi.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

ASPEK-ASPEK DALAM PRINSIP EKONOMI

A. Aspek Kepemilikan dalam Prinsip Sistem Ekonomi

Pemilikan adalah sebuah kenyataan yang ada pada berbagai sistem sosial, lahir bersamaan dengan munculnya sejarah manusia itu sendiri. manusia tidak bisa dilepaskan dengan kepemilikan, sebab dengan memiliki, manusia dapat menemukan penyambung hidupnya. Hanya memang ditemukan banyak macam sistem administrasinya, asal usul yang berlaku dan sifat kepemilikan, tergantung budaya yang berlaku.

Sebelum membahas lebih jauh tentang kepemilikan, terlebih dahulu dibahas apa yang dimaksud dengan kepemilikan?

Secara lughawi, kepemilikan¹ (Al-Milkiyah/Al-Milk) adalah bentuk masdar (verbal) dari kata **يَمْلِكُ - مَلِكٌ** yang berarti penguasaan terhadap sesuatu.² Adapun

definisi di kalangan para ahli Fiqh bervariasi antara lain :

Abu Zahrah memberikan definisi kepemilikan dengan ;

¹Peter Salim dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta; Modern English Press, 1991), hal. 979. lihat juga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1993), cet. IV, hal. 163.

²Ibnu Manzir, *Lisan Al-Arab*, (eirut, Daar Sadr, 1990) h. 492. dan Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit*, (Beirut; Dar al Fikr, 1995), h. 858.

اِخْتِصَاصٌ جَازِزٌ شَرْعًا صَاحِبِ التَّصَرُّفِ إِلَّا مَانِعٍ

“Sebuah hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak ada larangan”.³

Maksud hak khusus dalam definisi ini, adalah bahwa selain pemilik dilarang untuk memanfaatkan tanpa seizin pemilik. Dan larangan yang dimaksud meliputi dua hal yaitu; Pertama, karena belum mampu (naqs al-ahliyah) seperti anak kecil; dan kedua, karena pada miliknya tersebut terdapat milik orang (karena berkongsi) atau karena barang yang dipegang adalah barang gadaian orang lain.

Menurut Al-Qarafi, yang dimaksud dengan pemilikan adalah ;

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُقَدَّرٌ فِي الْعَيْنِ أَوْ فِي الْمَنْفَعَةِ يَفْتَضِي تَمَكُّينَ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَمْلُوكِ وَمِنَ الْمُعَاوَضَةِ عَنْهُ

“Sebuah ketentuan syar’I terhadap benda dan jasa dimana pemilikannya dibolehkan untuk memanfaatkannya dan mentransaksikannya”.⁴

Sedangkan Al-Kamal, bin Al-Hammam, mendefinisikan pemilikan dengan ;

الْقَدْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى التَّصَرُّفِ ابْتِدَاءً إِلَّا مَانِعٍ

“Sebuah kekuatan syar’I yang diberikan kepada pemilik untuk melakukan pengoprasian harta (tasharruf) selama tidak melanggar syara’”.⁵

Ketiga definisi pemilikan yang dikemukakan oleh para pemikir Islam di atas pada dasarnya mempunyai esensi yang sama karena mengandung substansi yang

³Abu Zhrah, *Al-Milkiyah wa Nazariyyah al ‘Aqd fi Asy Syari’ah Al-Islamiyah*, (Kairo; Dar al Fikr al ‘Arabi, 1996), h. 64

⁴Al-Qarafi, *Anwa’al Buruk fi Anwa’al furuq al Ahkam fi Tamyiz al Fatwa ‘an al Alkam Az Zikr*, (Beirut; Alam al-Kitab, tt), III, h. 233.

⁵Ibnu Al-Hammam, *Fath al-Qadir fi syarh al hidayah*, (Beirut; Daar al Fikr, 1977); cet. II, h. 486.

senada, yaitu (1) adanya hubungan khusus antara yang tidak memiliki tidak berhak menggunakannya tanpa seizin pemilik resmi.⁶

Hubungan antara pemilik dan barangnya dengan segala konsekwensinya ini merupakan hubungan sosial, bukan hubungan fisiologis. Dalam hubungan sosial, kesadaran merupakan prasyarat, sedangkan hubungan fisiologis tidak punya kaitan dengan kesadaran dan ketidaksadaran.⁷ (2) adanya kegelisahan syara', dimana merupakan barometer yang dipakai dalam mensahkan pemilikan, bukan budaya atau faktor kebanyakan suatu basyarakat tertentu. Kalau pemilikan tersebut disahkan oleh syara' maka pemilikan tersebut dianggap sah, begitu pula sebaliknya, kalau sudah disahkan oleh syara' maka pemilikan tersebut dianggap tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilikan tersebut tidaklah mutlak tetapi terbatas oleh syara'. Hal ini berbeda dengan pemilikan menurut undang-undang perdata Mesir pasal 11 dan 27 yang memberikan definisi pemilikan yaitu "Hak untuk memanfaatkan dan mengelola hartanya secara mutlak".⁸

Definisi yang diuraikan oleh kitab undang-undang Hukum Perdata Indonesia pada pasal 570 berbunyi; 'Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang

⁶Ali Haidar, *Durar al Hukum Syarh Majallah al Ahkam al 'Adliyyah*, (Beirut; Daar al Kutub al-Islamiyyah, tt), h. 15

⁷Bohesti, *Kepemilikan dalam Islam*, Terj. Lukman Hakim dan Ahsin M, Jakarta; Pustaka Hidayah, 1988), h. 10.

⁸Muhamad, *Faruq an-Nabahan, al Ittijah al Jama'I fi at-Tasyri 'al Iqtisadi al-Islami*, (Beirut; Muassasah ar Risalah, 1984), h. 170

diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan-gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang'.⁹

Definisi ini mendekati definisi berdasarkan Islam, yang meliputi dua hal penting dalam pemilikan yang harus sesuai dengan kriteria syara' yaitu melilik (al-Milik) dan yang dimiliki (al-Mamluk) yang dalam hal ini adalah harta.

Pada fase awal, pemilikan berasal dari sebuah kekuasaan diktator, yaitu hanya golongan kuat saja yang berhak memiliki, tanpa memperhatikan golongan lemah sehingga muncul eksploitasi tanpa batas oleh golongan kuat. Namun terjadi evolusi seiring dengan perkembangan zaman, bahwa pemilikan sudah menjadi kekuatan penting dalam kehidupan maka dibuatlah sebuah peraturan yang akan memberikan batasan pemilikan menjadi sebuah sistem untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh pemilikan tanpa aturan ini.

Kalau kembali menengok ke periode awal kehidupan, maka ditemukan bahwa pemilikan tanah pada saat itu bersifat kolektif.¹⁰ Seperti yang terjadi pada bangsa Indian di Amerika utara, penduduk Peru dan lain-lain, yang mengatakan bahwa tanah itu seperti air dan udara tidak boleh diperjual-belikan, bahkan seorang manusia berarti milik bagi keluarganya; mereka menjaganya dan melindunginya dari pihak lain.

⁹Subekti & Tjitroswdibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1992), h. 44)

¹⁰Muhamad al Mubaroq, *Nizam al Isqtishad*, (Beirut; Daar al Fikr, 1973), h. 68

Disamping itu, pemilikan pribadi hanya terbatas pada kebutuhan pribadi seperti pakaian dan alat buru. Jika pemiliknya mati pada paham sebagian suku bangsa, barang-barang miliknya juga ikut dikubur bersama pemiliknya atau dibakar dengan maksud menghilangkan kenangan yang bisa membuat keluarga senantiasa sedih, bahkan mereka meyakini kematian hanya sebuah perpindahan tempat sehingga orang yang mati harus membawa kebutuhan pribadinya untuk dipakai di alam mati.

Pemilikan di zaman Bani Israil, tanah merupakan harta terpenting pada zaman itu, yang mereka dapatkan dari hasil warisan kaum Kan'an yang luasnya cukup banyak. Kemudian tanah tersebut dibagikan kepada tiap-tiap suku (Qabilah) berdasarkan jumlah penduduknya sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Musa AS.

Pada awalnya, tanah merupakan milik kolektif suku kemudian terjadi perselisihan pada zaman berikutnya. Sehingga tanah tersebut menjadi milik keluarga, hingga pada akhirnya menjadi milik pribadi yang dapat diwariskan kepada nak cucu.

Dengan demikian, Musa AS mengatur pemilikan pribadi berdasarkan Firman Tuhan, dengan ketentuan-ketentuan seperti seorang pemilik harta wajib membayarkan upah buruh sebelum terbenam matahari, ia harus meliburkan buruhnya setiap hari sabtu, tanah garapan yang diaktifkan selama tujuh tahun harus diistirahatkan selama satu tahun dan hasil panen pada tahun ke tujuh harus dibagikan kepada fakir miskin.

Adapun pemilikan pada zaman Yunani dan Romawi, menyerupai bentuk pemilikan pada zaman Bani Israil, yaitu berawal dari pemilikan kolektif dan berakhir

dengan pemilikan pribadi. Harta milik yang terpenting juga adalah tanah. Orang-orang Yunani sangat senang dan menyunjung harta dan ranahnya, mereka meyakini bahwa tanah yang diperolehnya adalah hasil dari perjuangan nenek moyang mereka dengan pedang dan perang, dan meyakini pula bahwa profesi bertani adalah merupakan profesi yang paling mulia, mendatangkan kebahagiaan, menguatkan badan dan menciptakan kesejahteraan negara.

Kolektifitas pemilikan pada zaman Yunani berakhir dengan pemilikan pribadi seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ditegaskan oleh Aristoteles bahwa pemilikan pribadi adalah faktor utama dalam kehidupan masyarakat ideal. Dengan memiliki, lanjut Aristoteles manusia dapat termotivasi untuk bekerja dan lebih berkreasi.¹¹

Lain halnya dengan pemikiran pada zaman Arab sebelum datangnya Islam, mereka setelah mengenal pemilikan. Dalam masyarakat Badui (bangsa Arab yang masih hidup berpindah-pindah) Nomad, pemilikan kolektif adalah yang terpenting. Akan tetapi di Makkah, karena munculnya masyarakat dagang pemilikan individu mengalahkan pemilikan kolektif, meskipun suprastruktur sistem hukum yang mengaturnya belum terbangun. Disinilah Islam datang dengan mengisi kekosongan ini.

¹¹Muhamad Faruq dan Nabahan, *Al Ittijah al Jamani fi at Tasyri' al Istisadi al Islami*, (Beirut; Muassasah aAr Risalah, 1984), h. 166-167.

Enginear mengutip perkataan D.S. Mongoliouth, bahwa institusi kekayaan pribadi telah muncul dan berkembang di Makkah meskipun hal ini tampaknya bertentangan dengan ajaran mengenai hubungan famili.

Para pemimpin keluarga di Makkah adalah wakil-wakil dalam membentuk perusahaan kerjasama dengan perdagangan asing, dan keuntungan dibagi secara merata diantara para investor dan mereka mengembangkan usaha dagangnya dengan menanamkan investasi baru.¹² Demikian juga Tabari menceritakan pemilihan pribadi di Makkah, yang diceritakan adanya perselisihan antara Abdul Muthalib (Kakek Nabi) dan pamannya mengenai hak milik pribadi termasuk sumur zam-zam.¹³

Dalil yang membuktikan adanya kepemilikan pribadi (Individu) pada zaman sebelum Islam adalah sebagai berikut :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

“Bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridloannya...”¹⁴

Penyandaran Allah pada pemilikan harta orang-orang muhajirin dalam ayat di atas adalah bukti adanya pemilikan harta secara individu dan pada masa Arab sebelum datangnya Islam.

¹²Asghar Ali Enginer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, Terj. Imam Baihaqie, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), h. 64

¹³*Ibid.*

¹⁴Mujamma' Khadim al haramain asy Syarifain, *al Malik Fakdli Thiba'at al Mashaf asy syarif*, (Madinah Munawarah; PO.BOX 3561, 1971), h. 917

Persoalan pemilikan tidak terlepas dengan persoalan ekonomi yang senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Walaupun begitu usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh. Kebanyakan penelitian yang dihasilkan telah menyimpang jauh dari motivasi semula sehingga menghilangkan tujuan sebenarnya. Disatu pihak pendapat yang menyarankan kearah itu terlalu mementingkan hak individu dan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum. Dan di lain pihak pendapatnya menolak keistimewaan hak individu.¹⁵

Di dalam dunia ekonomi kita mengenal tiga sistem ekonomi, ketiga sistem ekonomi tersebut mewakili tiga wilayah dunia pada umumnya. Pada mulanya ketiga sistem ekonomi ini sngat jelas terpisah satu dengan yang lainnya, tetapi pada akhir abad ke-20 ini dalam praktek makin pragmatis disesuaikan dengan situasi politik dan kondisi. Misalnya Amerika Serikat sebagai suatu negara Liberalis bekerja sama dalam bidang ekonomi dengan Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara Komunis. Demikian misalnya dengan Iraq sebagai suatu negara Islam bekerja sama dalam bidang ekonomi dengan Rusia suatu negara Komunis. Kelihatannya yang menjadi motif pokok ialah mendapatkan keuntungan pribadi atau masyarakat atau negara.

¹⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhaakti Wakaf, 1995) Jilid I, hal. 1.

Namun demikian sistem ini masih berjalan walaupun tidak sempurna sewaktu timbulnya sistem-sistem ini.

Adapun ketiga sistem ekonomi itu ialah :

1. Sistem Ekonomi Islam, sejak abad ke-7 dimulai pada waktu Hijrah Rasul dari Makkah ke Yatsrib (Maddinah).
2. Sistem Ekonomi Liberal, sejak abad ke-18 dimulai setelah kemerdekaan Perancis 14 Juli 1789.
3. Sistem Ekonomi Sosial, sejak abad ke-20 dimulai pada revolusi Rusia 17 November 1917.¹⁶

Namun dalam pembahasannya tidak dapat dibicarakan berbagai usaha yang telah dibuat untuk menyelesaikan masalah diatas. Walaupun demikian dapat dijelaskan secara ringkas prinsip dasar beberapa sistem ekonomi.

Dalam sistem ekonomi Liberal atau Kapitalis, dimana suatu sistem ekonomu yang memberikan tugas mengusahakan alat-alat keperluan manusia kepada individu. Individu yang menentukan apa dan berapa dia akan menghasilkan, dengan siapa dia akan membuat dan dengan harga berapa dia akan menjual.¹⁷

Adapun Smith dalam bukunya yang berjudul "*Wealth of Nation*" (Kemakmuran Bangsa-bangsa, tahun 1977), bahwa *kesejahteraan umum akan dengan sendirinya paling cepat tercapai, jika setiap orang, setiap individu diberikan secara bebas berusaha tanpa adanya campur tangan pemerintah; karena didorong oleh*

¹⁶Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 26.

¹⁷*Ibid*, h. 51.

kepentingan pribadi, maka produksi akan disempurnakan dan akan terus mengikat dengan sendirinya. Dorongan dan motif yang berdasarkan atas keuntungan diri sendiri inilah yang menjadi latar belakang dari segala kegiatan manusia. Adam Smith percaya, bahwa sifat cinta pada diri sendiri seseorang individu akan baik pula akibatnya bagi kemakmuran masyarakat. Kemakmuran suatu negara akan terjamin sebaik-baiknya apabila tiap orang telah mencapai tingkat kemakmuran dengan sebaik-baiknya pula.¹⁸ Faham ini tidak mementingkan pertanian dan perdagangan, ia menitik beratkan pada pekerjaan (*arbeid*) dan kepentingan pada diri sendiri (*eigen behoeften*). Dengan demikian, jika seseorang dibebaskan berusaha, maka ia harus dibebaskan mengatur kepentingan diri sendiri dalam bidang ekonomi. Karena ajaran '*laisser' aller, laisser passer*' (merdeka berbuat dan merdeka bertindak) menjadi pedoman bagi persaingan mereka.¹⁹ Pedoman ini lahir karena dunia Barat mulai memandang agama dengan Skeptis. Rasa religius yang mendasari setiap agama sudah melemah, sebagai hasil penindasan oleh gereja (*Universalisme*). Tentulah dengan mundurnya agama, basis nilai-nilai moral dalam kehidupan maulai kehilangan pijakannya, karena nilai-nilai erat kaitannya dengan agama. Maka wajarlah bahwa dengan tersishnya agama, semua efek moralnya pun hilang.²⁰ Manusia modern, setelah mempercayai kemerdekaan pribadi dimana sekarang mereka mendasarkan konsep-konsep, ambisi dan nilai-nilainya, dan setelah menolak pandangan religius

¹⁸*Ibid*, h. 59

¹⁹Junus Ghozali, *Etika Ekonomi Islam*, Serang: Saudara, 2001) h. 34

²⁰Syahid Muhanamad Baqir ash-shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 111.

tentang kehidupan, dunia, pencipta dan harapan pahala dan hukuman, memusatkan perhatiannya pada penggunaan sepenuhnya kesempatan yang diberikan oleh kehidupan duniawi dan menikmati kesenangan material, menjadi satu-satunya tujuan usaha manusia modern yang memiliki kemerdekaan.

Disitu muncul perlunya meletakkan pondasi-pondasi kemerdekaan ekonomi dan memobilisasi semua sumber untuk mencapai tujuan akhir memperoleh uang, yang oleh kultur modern ditetapkan sebagai dewa baru.

Semakin kuat dan pesat kafilah modern itu bergerak menjauhi intelektual dan konsep-konsep kebajikan religius di abaikan, dan dorongan ekonomi begitu kuat pada persimpangan yang genting pada kultur barat ini, sehingga Marx berfikir bahwa factor ekonomi adalah kekuatan motivasi tunggal sepanjang sejarah manusia.²¹ Analisis suci yang Allah turunkan di pandang Sahara Arabia mengenai faham di atas (baik *Universalisme* ataupun *Kapitalisme*), yaitu terdapat dalam ayat di bawah ini :

ياايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس
 بالباطل وصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
 ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم (التوبة/ ٩: ٣٤)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidaklah menafkahkanya pada jalan Allah maka beritahukanlah

²¹*Ibid*, h. 112

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. At-Taubah: 34)²²

Jika faham universalisme dapat dikatakan meruntuhkan perekonomian, faham individualisme mengacaukan aperekonomian. Terhadap faham yang kedua ini, disebutkan oleh Allah di dalam bagian yang kedua dari ayat di atas: '*orang-orang yang menumpuk-numpuk (kekayaan) emas dan perak serta tidak mengorbankannya di jalan (kebenaran yang diridhoi) Allah, maka beritakanlah kepada mereka akan siksa yang sangat pedih*'.²³

Allah SWT menegaskan bahwa faham individualisme itu akan membawa manusia pada timbulnya segolongan manusia yang pekerjaannya menumpuk-numpuk harta kekayaan dari emas dan perak. Penumpukan dan penimbunan kekayaan itu membawa ancaman yang sangat pedih kepada manusia, yang menimbulkan peperangan yang sangat dahsyat.²³

Sedangkan dalam prosesnya, nafsu serakah kapitalisme telah mewujudkan :

1. Revolusi dalam perindustrian
2. Penumpukan kapital
3. Pemuasan kapital (organisasi-organisasi)
4. Munculnya kaum proletar²⁴

²² *AL-Qur'an dan Terjemah*, (Madinah Munaarah: Mujamma'Li Thiba'at Al-Mushaf Asy-Syarif, tt), Saudi Arabia.

²³ Abdulah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002), h. 40

²⁴ *Ibid.*, h. 41

Dalam sistem ekonomi Sosialis sebagai lawan dari Individualisme liberal (*lains sez faire individualsme*), walaupun sekarang sebagian besar diterima dalam kebanyakan perekonomian kapitalis.²⁵

Pemakaian kata sosialisme yang pertama kali masih diperdebatkan orang dalam permulaan abad ke XIX uang lampau, menurut Grunberg, bahwa perkataan itu dipakai pada tahun 1803 M, oleh pendeta Italia yang bernama Guilani. Di Inggris pengikut-pengikut Robert Owen, pertama kali menggunakan perkataan itu, sedangkan di Perancis pertama kali yang memakai ialah Vinet.²⁶

Sedangkan sosialisme berasal dari kata Latin-Socius artinya, bahasa Jawa Konco, bahasa Arab Sahabat, dan bahasa Inggris friend, bahasa Belanda maker. Sosialis mempunyai cita-cita persamaan, persahabatan, friendship, het kameraads pelijke (*dekameraadshap*).²⁷ Penulis Perancis Janet berpendapat: 'yang dinamakan sosialisme itu, ialah tiap-tiap pelajaran, yang mengajar bahwa negara berhak melaksanakan keseimbangan menurut hukum, dengan jalan mengambil dari mereka yang mempunyai kelebihan untuk diberikan kepada yang kekurangan; dan tindakan ini jangan hanya diambil terus menerus.'²⁸

²⁵ Ibrahim Lubis, *Op-cit*, h. 60.

²⁶ Junus Gozali, *Op-cit*, h. 42.

²⁷ Ibrahim Lubis, *Loc-cit*.

²⁸ Junus Gozali, *Op-cit*, h. 43.

Sedang Kirkup berpendiran bahwa pokok dari segala macam-macam pendapat itu ialah para sosialis menghendaki supaya semua industri dikemudikan oleh masyarakat dan hasil-hasilnya dibagi dengan adil.²⁹

Jadi paham sosialisme itu bertentangan dengan paham individualisme (kepentingan diri sendiri). Sosialisme bercita-cita cara hidup satu buat dirinya, semua buat satu. Berlawanan dengan individualisme tiap-tiap orang buat dirinya sendiri.³⁰

Faham sosialis sendiri memiliki berbagai macam merk, sedangkan yang paling diantaranya ialah :

a. Filsafat Dialectice

Berasal dari Filsafat Hegal (1770-1831), tetapi dirubah menjadi Dialecticall Matrialism, akhirnya menjadi Historical Materialism

b. Sistem Ekonomi

Diantara teori ekonomi yang terpenting ialah teori tentang nilai lebih (surplus value).

c. Negara dan Revolusi

Teori Negara dan Revolusi Engels berkata "*The State is nothing more than a machine for the appression of one class by another*". Negara itu tidak lain kecuali mesin untuk suatu lapisan masyarakat menindas lapisan yang lain. Karl Marx dan Engels amengatakan bahwa Negara merupakan suatu kenyataan (*civil*) karena

²⁹*Ibid.*, h. 43.

³⁰Ibrahim Lubis, *Loc-cit.*

negara iut ada, akibat adanya kelas. Dimana masyarakat tidak berkelas negara tidak pula ada.³¹

Pada tahun 1847 Karl marx mendirikan Partai Komunis, karena pada waktu di perancis ada partai Sosial yang dipimpin oleh Louis Blanc. Karl Marx bersama Engels menulis Manifasto Komunis. Perjuangan ini diteruskan oleh Lenin dan Stalin dan tidak mempergunakan kalimat komuis, dalam konstitusi 1936, kecuali dalam article 26. Uni Sovyet disebut sebagai negara Sosialis kepunyaan kaum buruh dan tani. Jelasnya bahwa faham komunis itu buah pikiran Karl marx dan Engels yang dicetuskan dalam tahun 1820-1895 dan diberi interpretasi dan pelaksanaannya oleh Lenin (1870-1924) dan Stalin (1879-1953).³²

Dalam sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berketuhanan. Segala aktivitas perekonomian masyarakat muslim, disamping bersifat material, juga didalamnya tidak mengakibatkan aspek spiritual (*ibadah*). Sendi dari aspek spiritual adalah kesadaran individual muslim akan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan kata lain, manusia itu disamping berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitar, juga ia berhubungan dengan Allah SWT.³³

Hal ini sesuai dengan ayat :

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا
واتقوا الله ان الله عليم بدات الصدور. (٧:٥)

³¹*Ibid*, h. 650

³²*Ibid*, h. 66

³³Junus Gozali, *Op-cit*, h. 48

Artinya : *"Dan ingailah karena Allah kepaaamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "kami dengar dan kami ta'ati". Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui isi hati(mu)". (Q.S. Al-Maidah: 7)*

Sesungguhnya ekonomi Islam juga sesuai dengan hukum-hukum alam (*nature*), tidak bertentangan dengan sifat-sifat manusia serta keinginan-keinginan naluriyahnya, sejalan dengannya, mengakui dan tidak memeranghinya. Sifat-sifat dan keinginan-keinginan tersebut dihimpun dengan baik, diambil sari patinya serta diarahkan, sehingga keluarlah suatu hasil yang berguna untuk kesejahteraan umat manusia.³⁴

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق
الله ذلك الدين القيم ولمن اكثر الناس لا يعلمون. (الروم / ٣٠:٣٠)

Artinya : *"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama Yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Q.S. Ar-Ruum: 30)*

الم تروا ان الله سخر لكم ما في السموت وما في الارض واسبع عليكم
نعمه ظاهرة وباطنة... (لقمان: ٢٠)

Artinya : *Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (Kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan utnukmu ni'mat-Nya lahir dan bathin...". (Q.S. Luqman; 20)*

³⁴Ibrahim Lubis, *Op-cit*, h. 88

Islam mengambil jalan yang terbaik diantara kedua pandangan yang ekstrim tersebut (Kapitalis dan Sosialis) dan mencoba untuk menempatkannya pada porsi yang tepat, yang berpendapat bahwa kejayaan atau kesuksesan tidak diperbolehkan melalui paham yang pertama maupun yang kedua, tetapi melalui keselarasan kedua paham tersebut.³⁵ Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan diantara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia.³⁶

Pemikiran akan adanya kepemilikan pribadi dalam Islam, kadang-kadang dibenturkan pada pemikiran kemutlakan kepemilikan Allah, yaitu pemikiran yang mengatakan bahwa hanya Allahlah pemilik harta satu-satunya, manusia tidak ada hak untuk mengakuinya sebagai milik pribadi. Pemikiran ini dasarnya pada firman Allah, yang berbunyi :

... وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ...

"...Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya..."³⁷

Dan Firman Allah :

...وَأَوْ تُؤْتُوهُمْ مِّن مَّا لِيَ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ...

"...Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah dikaruniakan kepadamu..."³⁸

³⁵ Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 13.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Mujamma' Khadim al haramain asy Syarifain, *Op-cit*, h. 161

³⁸ *Ibid*, h. 549

Kedua ayat diatas secara teoritis Allah mengungkapkan bahwa Dialah pemilik kerajaan bumi dan langit. Allahlah yang maha pemilik seluruh apa dan siapa yang ada di dunia ini; langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, baik hidup maupun mati, yang berfikir ataupun tidak berfikir, benda yang terlihat maupun tidak terlihat.

Berdasarkan pemikiran di atas berarti manusia tidak memiliki apa-apa sehingga muncul pemikiran bahwa tidak ada istilah pemilikan pribadi, namun yang ada hanyalah pemilikan kolektif karena pemilikan pribadi seakan-akan bertentangan dengan ayat diatas.

Untuk menjawabnya, kita tarik ke konsep khalifah, yaitu eksistensi manusia sebagai khalifah di bumi ini yang diungkapkan dalam Al-Qur'an, yang dalam Al-Qur'an kata ini (khalifah) beserta kata jadinya tercatat paling tidak mengandung tiga makna. *Pertama*, adalah Adam yang merupakan simbol manusia sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia berfungsi sebagai khalifah dalam kehidupan; *Kedua*, khalifah berarti pula generasi penerus atau generasi pengganti, fungsi khalifah diemban secara kolektif oleh suatu generasi; *Ketiga*, khalifah adalah kepala negara atau pemerintahan.³⁹

Tampaknya makna khalifah yang relevan pada permasalahan ini, adalah makna yang pertama yaitu Adam sebagai simbol manusia sebagai khalifah di dunia ini, sebagaimana Allah berfirman :

³⁹Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta; Paramadina, 1996), h. 357

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...

"Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfikir kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi".⁴⁰

Quraish Shihab, menutip mendapat Bagir As Sadr mengemukakan bahwa kekhalifahan mempunyai tiga unsur yang saling berkaitan, kemudian di tambahkan unsur keempat yang berada di luar, namun amat menentukan arti kekhalifahan dalam Al-Qur'an. Ketiga unsur itu adalah :

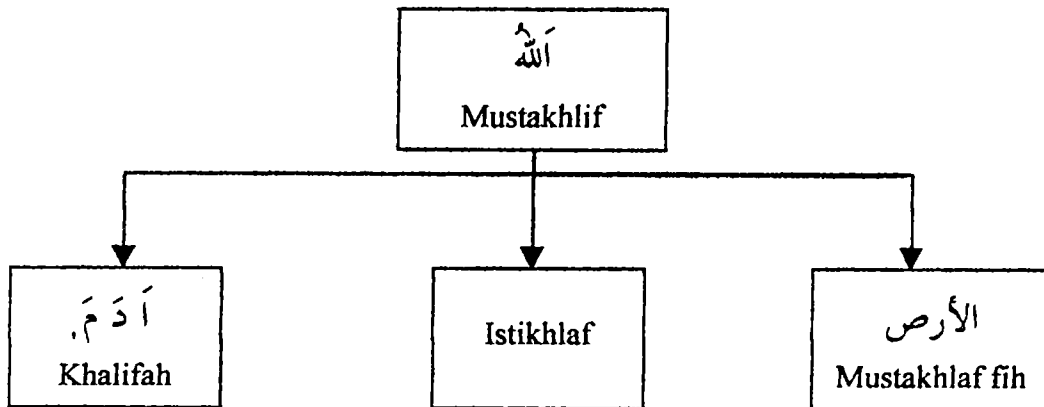
1. Manusia, yang dalam hal ini dinamai khalifah.
2. Alam raya, yang ditunjuk oleh ayat tersebut sebagai ard.
3. Hubungan antara manusia dan segala isinya termasuk dengan manusia.

Hubungan ini, walaupun tidak disebutkan secara teratur dalam ayat di atas, namun tersirat karena penunjukan sebagai khalifah tidak ada artinya jika tidak disertai dengan penugasan atau istikhlaf.

Itulah ketiga unsur yang saling berkaitan, sedangkan unsur keempat yang berada di luar adalah digambarkan oleh ayat tersebut dengan kata "inni Ja'il" yaitu yang memberi penugasan, yakni Allah SWT. Dialah yang memberi penugasan itu dan dengan demikian yang ditugaskan harus memperhatikan kehendak yang menguasainya.⁴¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar.

⁴⁰Mujamma' Khadim al haramain asy Syarifain, *Op-cit*, h. 13

⁴¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1999), cet. XIX, h. 158.



Disini manusia sebagai subjek yang mewakili Allah untuk menguasai dan mengelola objek yaitu ard (alam raya). Adapun hubungan antara manusia dan alam raya yang berupa pemilikan, tidak lepas dari konsep istikhaf (penugasan). Oleh karena itu, manusia terikat dengan kemauan Allah, sebab status seorang wakil tidak lebih dari pelaksanaan tugas atasan dan mematuhi permintaannya. Sebagai wakil, manusia tidak berhak membuat keputusan sesuka hati, jika bertindak demikian hilanglah statusnya sebagai wakil.

Pemilikan manusia secara pribadi adalah implementasi dari pemikiran bahwa manusia sebagai khalifah di dunia ini yang diberikan oleh penguasa mutlak yaitu Allah. Manusia diberikan harta sebagai tanda kemuliaan Allah dan kerelaannya yang telah memberikan nikmat kepada hambanya.

Sebagai khalifah Allah, ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah Allah karuniakan serta amanahkan kepadanya. Ibarat seorang bapak yang memberikan sebagian hartanya sebagai uang belanja kepada anaknya untuk dimanfaatkan, yang

dengan harta tersebut ia merasakan aktualisasi dirinya sebagai anak melalui latihan untuk mengelola hartanya. Kalau ia sadar akan statusnya sebagai anak maka harta tersebut dimanfaatkan kepada kebaikan, sebaliknya jika tidak, harta tersebut pun dimanfaatkan kepada hal-hal yang dilarang oleh orang tuanya,⁴² jadi, tidak dikuatirkan adanya perlakuan sewenang-wenang dari seorang khalifah yang diangkat Tuhan itu, selama ia benar-benar menyadari arti kekhalifahannya, demikian kata Quraish Shihab.⁴³ Dengan demikian, konsep pemilikan pribadi tidak lepas dari konsep istikhlaf, sebab bilamana konsep pemilikan pribadi lepas dari pemikiran istikhlaf, maka akan muncul penyalahgunaan manusia terhadap tugas yang diemban sebagai khalifah.

Pemilikan yang tidak mengakui adanya pemilikan pribadi dengan dalih segala sesuatu adalah milik Allah, Dialah yang menciptakan dan mengaturnya, sehingga berimplikasi pada pengakuan pemilikan kolektif saja karena pemilikan pribadi dianggap mencampuri urusan Allah dalam pembagian rizki pada umat manusia, sesungguhnya merupakan pemilikan dari sebagian penguasa dengan berkedok “khalifah Allah”, padahal ingin mengeksploitasi harta milik masyarakat lewat ambisi feodalismenya. Sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi Marxis, bahwa segala sesuatunya dikuasai oleh negara. Akan tetapi, ternyata kaum proletar telah melakukan pembunuhan dan mengambil alih serta menduduki posisi kaum borjuis dengan, menjadi pengisap yang lebih kejam. Betapa tidak negara totalitas yang tidak

⁴²Yusuf al- Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, (Beirut; Muassasah ar Risalah, 1991), cet. XX, h. 127.

⁴³Quraish Shihab, *Op-cit*, h. 169

mungkin ditangani oleh semua anggota proletar, tetapi hanya dikuasai dan ditangani oleh segelintir orang yang seluruh keputusan akan terdesentralisasi oleh segelintir orang tersebut, sesungguhnya telah melakukan penghisapan dan eksploitasi. Dan mereka bukanlah malaikat yang lepas dari keinginan untuk berkuasa dan mengeksploitasi.⁴⁴

Untuk lebih memahami kekhalifahan manusia dari Allah, dapat dilihat dari bentuk transaksi (aqad) dalam Islam yang dalam aqad itu memiliki kaidah yang merupakan penerimaan dari istikhlaf.

Salah satu contohnya adalah transaksi wasiat yang dalam Islam bermakna sebuah pemberian kepada orang lain baik berbentuk materi, manfaat, maupun tanggungan, diman yang diberikan wasiat boleh mengambil pemberian tersebut setelah pemberi meninggal, dan dalam aturan wasiat mewasiati, pemberi wasiat tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya kecuali seizin ahli warisnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak yang diberikan oleh Allah kepada Adam sebagai simbol khalifah hanya sepertiga dari bumi, dua pertiga sisanya milik Allah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manusia sebagai khalifah Allah tidak boleh memiliki dan menguasai seluruh harta Allah secara pribadi, karena disini ada harta milik umum yang diciptakan, khusus untuk kesejahteraan komunitas.⁴⁵

⁴⁴M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Nur Ikhsan & Rifqi Anwar, Surabaya; Risalah Gusti, 1999), h. 77.

⁴⁵Amin Mustafa Abdullah, *'Ushul al-Iqtisad al-Islami wa Nazwiyyah at Tawazun al Siqtisad fi al Islam*, (Kairo; Isa al Babi al Halabi, 1984), h. 91-92.

Uraian diatas mengungkapkan bahwa pemilikan yang ada pada manusia itu bersifat nisbi (relatif) atau tidak kekal. Harta yang dimiliki bersifat sementara, karena akan lepas dari pemiliknya, baik karena habis dikonsumsi oleh pemiliknya maupun lepas dari genggaman karena musibah. Begitu pula manusia tidak akan hidup kekal selamanya, sebagaimana harta tersebut diambil dari pewaris pendahuluannya. Oleh karena itu, hendaknya manusia itu tidak menjadikan harta tersebut. Sebagai tujuan utama kehidupan, akan tetapi menjadikannya sebagai wasilah untuk meraih kebahagiaan dunia lebih-lebih di akhirat.

Dengan memahami bahwa pemilikan oleh manusia hanya bersifat sementara, konsekwensinya akan mengurangi arogansi seorang individu untuk bersikap sombong dan bangga serta tidak membuat pemilikannya lupa daratan untuk bertindak semena-mena karena mereka yakin bahwa harta itu milik Allah.

B. Aspek Konsumsi dalam Prinsip Sistem Ekonomi

Berbicara mengenai konsumsi tidak terlepas dari suatu rangkaian mata rantai yang tidak melepaskan dari proses produksi dan distribusi yang terpadu sedemikian rupa. Karena kemungkinan perbaikan yang berkesinambungan dalam suatu kehidupan material maupun spiritual menjadi nyata, dan konsumsi merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengolahan kekayaan, dengan kata lain konsumsi adalah akhir dari keseluruhan proses produksi.

Pada dasarnya mayoritas pakar ekonomi memfokuskan perhatiannya pada produksi, mereka berusaha sekuat tenaga meningkatkan produksi serta memperbaiki kualitas dan kuantitasnya. Namun dengan bertambahnya hasil produksi belum menjamin untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera, sebab sangat mungkin produksi ini baik sebagian ataupun seluruhnya, digunakan untuk urusan yang tidak bermanfaat bagi tubuh manusia, merusak jiwa dan akal serta tidak membahagiakan keluarga dari masyarakat.⁴⁶

Kita tahu bahwa antara konsumsi dan produksi sangat berkaitan. Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen masa kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insenti pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Mereka mungkin tidak menyerap pendapatnya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya, sebagaimana M.A Manan mengatakan bahwa perbedaan antara ilmu ekonomi modern dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang, dalam Islam tidak mengakui kegemaran materialistik semata-mata dari pola konsumis modern.⁴⁷

Kekayaan diperoleh hanya untuk dikonsumsi, dan kekayaan yang dihasilkan hari ini akan digunakan untuk hari esok. Oleh karena itu konsumsi (pemanfaatan)

⁴⁶Yusuf Qordlawi, *Musykilah al-Fiqr wa kaifa 'Ala Jaha Al Islam*, (Mesir, Maktabah Wahabah, 1975), h. 137

⁴⁷M.A. Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Penerjemah Potan Arif Harahap, Jakarta: Internusa, 1992), h. 44.

berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi seseorang maupun negara.⁴⁸

Teori perilaku konsumsi yang dikembangkan di Barat setelah timbulnya Kapitalisme merupakan sumber dualitas, yakni “Rasionalisme ekonomi” dan “Utilitarianisme”.

Rasionalisme ekonomik menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat, yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomi.⁴⁹ Sedangkan Utilitarianisme adalah sumber nilai-nilai dan sikap moral. Kejujuran berguna karena ia menjamin kepercayaan, demikian juga ketepatan waktu ketakutan bekerja dan sikap hemat.⁵⁰

Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah dan mempunyai sistem pertukaran dan distribusi yang adil dan merata, akan tetapi apabila kekayaan itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, atau dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak penting dan kemewahan sebagai tujuan utamanya, maka sistem pertukaran dan distribusi yang baik tersebut akan gagal.⁵¹

Dengan demikian yang terpenting dalam konsumsi adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan yang baik dan tepat agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan sebaik mungkin. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi

⁴⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Penerjemah Suroyo cs, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 17

⁴⁹ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (New York, Charles Scribners Sons, 1958), h. 76

⁵⁰ *Ibid*, h. 52

⁵¹ Afzalur Rahman, *loc-cit*, h. 17.

sangat sederhana, karena kebutuhannya juga sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan manusia akan kebutuhan-kebutuhan ini. Peradaban materialistik dunia Barat tampaknya memperoleh kesenangan khusus dengan membuat semakin bermacam-macam dan banyaknya kebutuhan-kebutuhan manusia.⁵²

Selanjutnya dalam bahasa konsumsi dari segi sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, sangat sedikit sekali referensi-referensi yang berbicara mengenai permasalahan ini, hanya pada prinsip dasarnya bahwa pada sistem ekonomi Kapitalisme, karena pandangan dalam kehidupan ini mengagungkan kepada materi, maka baik pemilikan, produksi, konsumsi maupun distribusi bertujuan untuk kesenangan dan kepuasan pribadi (individu) seluasnya, sedangkan pada sistem ekonomi sosialisme adalah sebaliknya, yaitu baik pemilikan, produksi, konsumsi maupun distribusi adalah untuk bersama (kolektif) yakni satu untuk semua, semua untuk satu. Sehingga pada sistem ekonomi Kapitalisme siapa yang kuat dia dapat (menang), dan membuat manusia bersifat arogan untuk menguasai lainnya, pada sistem ekonomi Sosialis, lebih kepada eksploitasi manusia untuk kepentingan penguasa.

Selanjutnya M.H. Manan mengungkapkan bahwa pandangan terhadap kehidupan dan kemajuan ini sangat berbeda dengan konsepsi nilai Islami. Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa sekarang ini, untuk menghasilkn energi manusia dalam mengejar cita-cita

⁵²M.A. Mananan, *loc-cit*, h. 44.

spiritualnya. Perkembangan bathiniah yang bukan perluasan lahiriyah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup.⁵³

Pada masa sekarang ini, kemajuan berarti meningkatnya tingkatan hidup mengandung arti makin banyaknya kebutuhan-kebutuhan, sehingga nafsu untuk mengejar tingkatan konsumsi yang semakin tinggi bertambah. Dengan demikian apabila dilihat dari segi pandangan modern, kemajuan suatu masyarakat tergantung dari sifat kebutuhan-kebutuhan materialnya.

Untuk lebih memperdalam pembahasan konsumsi ini ada baiknya melihat keda aturan-aturan yang telah digariskan dalam prinsip ekonomi Islam.

Perintah Islam dalam AL-Qur'an, memberikan kepada manusia petunjuk-petunjuk yang sangat jelas dalam hal konsumsi. Ia mendorong menggunakan barang-barang yang baik dan bermanfaat serta melarang adanya pemborosan-pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting, juga melarang orang muslim untuk makan dan berpakaian kecuali hanya yang baik.

Adapun ketentuan-ketentuan itu sebagai berikut :

1. Penggunaan barang-barang yang baik dan bermanfaat

Kaum muslimin dianjurkan untuk menggunakan kekayaan mereka, baik langsung maupun tidak pada hal-hal yang mereka anggap baik dan menyenangkan bagi mereka. Islam tidak melarang kaum muslimin untuk menikmati barang-barang yang hanya berdasarkan hawa nafsu belaka.

2. Kewajaran dalam membelanjakan harta

⁵³*Ibid*, h. 45

Al-Qur'an menetapkan mencari jalan tengah diantar kehidupan materialisme dan kezuhudan. Disatu sisi melarang membelanjakan harta secara berlebihan, dan disisi lain juga mencela perbuatan menjauhkan diri dari kesenangan menikmati benda-benda yang baik dan halal dalam kehidupan.

Firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut : "...Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (Q.S. Al-'raf: 31).⁵⁴

Ayat diatas, disamping mencela praktek-praktek penolakan terhadap kesenangan hidup yang dilakukan oleh para pendeta Kristen dan Budha, juga mengancam perbuatan-perbuatan bodoh dan kemalasan dengan menjaukan diri dari kesenangan hidup... bahwa mereka tidak akan dapat menentang karuniak

Kenikmatan dari Allah dengan jalan menghilangkan atau mencabut keinginan-keinginan mereka terhadap barang-barang yang bagus dalam hidup ini dan sesungguhnya kesalehan (kealiman) bukan berarti menghindarkan diri dari barang yang baik dan halal di dunia ini.⁵⁵

Penjelasan selanjutnya dari ayat tersebut ialah kenyataan, bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut di isi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut.

⁵⁴Mujamma Khadin al-Haramain asy syarfain, *Op-cit*, h.

⁵⁵Afzalulr Rahman, *Op-cit*, h. 23

Praktek mematangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak diperbolehkan dalam Islam.⁵⁶

Al-Qur'an juga telah menggambarkan tentang metode keseimbangan yang paling penting dalam hal konsumsi, seperti seseorang sebaiknya bersikap sederhana dalam hal menggunakan harta kekayaan, tidak menjauhinya atau menurutkan hawa nafsu dalam kesenangan hidup duniawi, seperti kaum spiritual dan materialis.

3. Pemborosan membelanjakan harta kekayaan

Islam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjaga harta kekayaan mereka dengan hati-hati dan membelanjakannya secara adil dan bijaksana supaya tujuan yang baik bisa terpenuhi dan pemborosan kekayaan terkontrol dengan baik, Islam melarang kaum muslimin untuk memberikan harta benda anak yatim yang belum sempurna akalnya dan belum dewasa.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang artinya berbunyi : “ ... Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q.S. Al-Isra' : 26-25).⁵⁷

Fakhrur Razi menafsirkan ayat diatas sebagai berikut :

- a. “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan uang secara boros”.

⁵⁶M.A. Manan, *Op-cit*, h. 47

⁵⁷Mujama Khadin al Haramain asy syarfain, *Op-cit*, h

Tabzir (mubazir) artinya menghambur-hamburkan harta dan menafsirkannya dalam kemewahan....

- b. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.

Selanjutnya ia menggambarkan alangkah buruknya tanzir sehingga Allah menyamakan dengan teman syaitan, teman artinya menyerupai syaitan dalam perbuatan buruknya.

- c. "Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya"

arti ayat ini, syaitan menggunakan tubunya untuk berbuat maksiat, menimbulkan kerusakan di bumi dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Begitu juga dengan orang yang menyukai tabzir, mereka adalah orang yang suka menyelewengkan harta dan pangkatnya, sehingga terjadilah kerusakan di muka bumi serta hilangnya barokah ni'mat dari Allah.⁵⁸

Yusuf Qardlawi menambahkan bahwa tindakan menghambur-hamburkan uang dapat disimpulkan dalam tiga hal :

- a. Membelanjakan untuk hal yang dilarang agama, ini hukumnya haram.
- b. Membelanjakan untuk hal yang diperbolehkan agama, hukumnya dikehendaki, selama tidak meninggalkan tanggung jawab yang lebih besar.
- c. Membelanjakan untuk hal yang dimubahkan oleh agama, seperti untuk menyenangnkan hati, hal ini terbagi dua :
 - c.1. Pengeluarannya sesuai dengan pendapatan, dengan kata lain ia tidak boros.

⁵⁸Yusuf Qordlowi, *Op-cit*, h. 156

c.2.Membelanjakannya sesuai dengan kebiasaan, yang juga terbagi dua:

Membelanjakan harta demi menanggulangi bencana, seperti perang, ini tidak termasuk boros. Segala sesuatu yang tidak termasuk hal diatas, menurut pendapat jumbuh, ini termasuk sikap boros. Namun menurut sebagian ulama syafe'i, itu bukan sikap boros.⁵⁹

Ibnu Katsir menukil beberapa pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat "Janganlah kamu penghamburkan harta secara boros" Ia mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud berkata; Tabzir atau boros ialah membelanjakan harta bukan untuk kebenaran". Demikian pula kata Ibnu Abbas.

Sedangkan Mujahid berkata ; "Jika manusia membelanjakan semua harta untuk kebenaran, maka hal itu bukanlah tindakan boros, tetapi jika membelanjakannya bukan untuk kebenaran meskipun hanya satu mud, maka ia adalah pemboros". Qotadah berkata, "Boros atau tabzir ialah membelanjakan harta untuk maksiat kepada Allah, bukan di jalan yang benar."⁶⁰

Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikasinya terhadap orang-orang yang terlibat dalam pemborosan atau tabzir.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, h. 158

⁶⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzin*, (Beirut; darul al Ma'rifah, 1987), Jilid III, h. 39

⁶¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1995), h. 28-29

Dalam hukum Islam, orang semacam itu seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan dan bila dianggap perlu dilepaskan dan dibebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan syari'ah dia seharusnya diperlakukan sebagai orang yang tidak mampu dan orang lain seharusnya ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya.⁶²

4. Sikap sederhana

Sikap sederhana dituntut dalam kehidupan pribadi, ia juga di tuntutan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam membelanjakan uang negara. Ini berlaku bagi semua jajaran mulai dari kepala negara, menteri, gubernur sampai tingkat bawah. Para pemimpin umat Islam sepatantasnya menjadi suri tauladan bagi rakyat dalam menjauhi korupsi dan memamerkan kemewahan dan kemegahan⁶³

Perilaku sederhana ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, pemimpin negaa yang patut ditiru dan diteladani, beliau adalah orang yang pertama lapar dan yang terakhir kenyang, sampai wafat belum pernah kenyang dari makan roti, sebagaimana Aisyah berkata :

ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة متواليه ولو شئنا لشبعنا
ولكنه كان يؤثر على نفسه (رواه البيهقي)

"Nabi belum pernah kenyang selama tiga hari berturut-turut, jika saja kami mau, niscaya kami bisa tetapi Nabi mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri.: (H.R. Baihaqi).⁶⁴

⁶²Muhammad al Mubarak, *Nizamul Islam; al Iqtishad*, (Beirut; Darul Fikr, 1972), h. 87

⁶³Yusuf Qordhowi, *Op-cit*, h. 167.

⁶⁴Ibnu Abd Al-Qowi Al-Mundzeri, *At-Tarhib Wat-Tarhib min Hadits*"

5. Standar hidup dan kehidupan

Standar hidup adalah jumlah kebutuhan-kebutuhan dan kesenangan-kesenangan minimum yang dianggap sangat penting bagi seseorang dan untuk meningkatkannya, dia dapat berkembang untuk itu. Sedangkan standar kehidupan berhubungan dengan jumlah kebutuhan dan kesenangan minimal yang dianggap oleh seseorang sebagai hal yang sangat esensial dalam hidupnya.⁶⁵

Seseorang kemungkinan mempunyai standar kehidupan yang tinggi, tetapi memiliki standar hidup yang rendah, seseorang kemungkinan mempunyai angan-angan yang tinggi tentang kehidupan, misalnya kebersamaan dan persaudaraan, menolong orang-orang miskin dan lain sebagainya. Tetapi secara finansial tidak mampu untuk itu... walau bagaimanapun perlu dikemukakan bahwa bukan hanya standar penghidupan dan peningkatannya saja yang menjadi objek sementara hak-hak kehidupan yang baik lainnya terabaikan. Memang benar, banyak orang seringkali menolak untuk menerima kebenaran dan keadilan, jika hal tersebut menyangkut adanya pengaruh dalam pendapatan, tapi sebenarnya pendapat mereka keliru dan nampaknya tidak memahami apa yang sedang mereka lakukan.⁶⁶

Rasulullah SAW seperti halnya Nabi-nabi sebelumnya, menyukai hidup sederhana dan wajar, tidak menuruti hawa nafsu untuk hidup berfoya-foya, kehidupannya sederhana, hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 64

⁶⁶ *Ibid*, h. 64-65 z

ditunggangi, sebagaimana diterangkan secara jelas dalam hadits riwayat Abu ya'la ra yang berbunyi :

ما قل وكفى خير مما كثر والهى (رواه ابويعلى)

"Barang yang sedikit tetapi cukup (untuk memenuhi kebutuhan hidup) adalah lebih baik dari pada banyak (tetapi menjadikan mereka lupa diri) menyesatkan".⁶⁷

Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam hanya menganjurkan manusia bersikap wajar dalam menikmati kesenangan dan hidup tanpa harus bersikap tidak adil atau tidak bermoral. Dan penghidupan yang sederhana dan bersahaja dalam menikmati kesenangan-kesenangan hidup secara material adalah prinsip yang paling baik yang dianjurkan oleh Islam dalam penggunaan haknya.



C. Aspek Distribusi Pendapatan dalam Prinsip Sistem Ekonomi

Pada dasarnya distribusi kekayaan/pendapatan⁶⁸ merupakan tujuan utama dalam semua aktifitas ekonomi. Hal ini dikarenakan faktor-faktor produksi yang berperan dalam aktifitas ekonomi tepatnya ditujukan dalam rangka memperoleh saham yang "fair" dalam jumlah output, persis seperti petani, di mana semua usaha

⁶⁷Abi Bakar As-Suyuthi., *Al-Jami' As Shghir*, (Beirut; Daar al-Fikr, tt) , jilid II, h. 147.

⁶⁸Adapun yang dimaksud dengan distribusi kekayaan pendapatan adalah suatu cara dimana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan menyangkut juga prinsip yang menentukan bagaimana dari faktor-faktor tersebut. Dalam akumulus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai: *Pertama*, penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat. *Kedua*, pembagian barang keperluan sehari-hari (saat keadaan darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. Lebih jelasnya baca dalam Afzalur Rahman, *Muhammad SAW Sebagai Seorang Pedagang/Muhammad SAW as a Trader*, (Jakarta; Yayasan Swara Bumi, 1995), h. 285. baca juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1989), h. 238

dan investasinya bertujuan memperoleh panen besar. Dengan demikian, struktur suatu masyarakat yang “baik” akan ditentukan tidak hanya oleh “efisiensi” mesin alokasinya, tetapi juga oleh “kejujuran” (fairness) mesin distribusinya.⁶⁹

Oleh sebab itu banyak ekonom telah berusaha untuk menyederhanakan studi pendahuluan tentang distribusi pendapatan dengan berfikir dari segi “timbunan barang nasional”. Dikarenakan setiap individu membawa dan mengontribusikan barang-barang ekonomis yang dapat ia produksi pada suatu periode tertentu dan dari mana ia mendapat berbagai barang (komoditas) dan jasa yang ia inginkan.⁷⁰

Distribusi pendapatan (*distribution of income*) oleh beberapa penulis dikatakan bahwa distribusi pendapatan adalah sesuatu yang tidak berubah. Sebab mereka percaya bahwa studi statistik menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam distribusi pendapatan sangat mencolok dan hal ini merupakan jenis pernyataan yang wajar dari masyarakat yang maju. Mereka berfikir bahwa dampak dari perubahan tersebut bagi pekerja akan berakhir dengan bencana bagi masyarakat.⁷¹

Namun para ekonom klasik seperti Adam Smith, Thomas Robert Maltus, David Ricardo, Karl Marx dan Henry George merasa yakin bahwa distribusi

⁶⁹M. Umer Chaapra, Terj. Nurhadi Ikhsan & Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi ; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1999), h. 57.

⁷⁰Ralph. H. Bladgett, *Comparative Economic System*, (New York; The Macmillan Company, 1040), h. 381. menurut *Adam Smith* pembayaran uang yang terbesar untuk membiayai produksi dan distribusi ialah upah, sewa dan laba. Dari pengamatannya terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, “sistem kebebasan alamiah yang sederhana dan gamblang itu” selain menguntungkan kapitalisme juga sangat jelas mengandung sejumlah kelemahan mendasar. Baca dalam George Soul, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka Dari Aristoteles Hingga Keynes*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 57.

⁷¹Elizabeth Ellis Hoyt, *The Income of Society; An Introduction to Economic*, (New York; The Ronald Press Company, 1950), h. 156.

pendapatan personal akan berubah seiring dengan perubahan masyarakat dan hal itu dikarenakan distribusi personal akan mendapatkan lebih baik. Mereka percaya bahwa pembagian pendapatan nasional akan demikian oleh kepemilikan individu, sebagian lagi dimiliki oleh negara tentu akan mendapatkan lebih besar dibandingkan yang didapatkan oleh para pekerja yang mendapat lebih kecil. Mereka juga percaya bahwa jumlah pekerja yang terlatih tidak bisa dikembangkan melebihi batas campuran, maka peningkatan penduduk dan keikutsertaan negara menjadi lebih tinggi, sebab bagaimanapun milik negara maupun untuk meningkatkan pendapatan yang lebih banyak dari penggunaan hak milik mereka.⁷²

Adapun model distribusi pendapatan dalam ekonomi Kapitalisme (ada tiga faktor sangat berpengaruh yaitu: upah, tenaga kerja dan modal) sebagaimana kita ketahui bahwa kekayaan produktif dimiliki secara privat/swasta/pribadi untuk sebagian terbesarnya. Di bawah konsep distribusi yang disederhanakan tersebut, jelaslah bagi kebanyakan orang bahwa setiap individu harus diizinkan mengambil komoditas dan jasa dari timbunan barang itu secara proporsional dengan kontribusi yang dapat diberikan ke timbunan barang tersebut olehnya atau jumlah agen produktif yang dimilikinya. Ia tidak akan punya keinginan untuk mengambil komoditas dan jasa yang sama dengan yang telah ia masukkan, tetapi barang (komoditas) dan jasa yang diambil, diharapkan akan memiliki nilai total yang sama seperti yang dikontribusikan.⁷³

⁷²Elizabeth Ellis Hoyt, *Ibid*, h. 147.

⁷³Ralp. H. Bladgett, *Comparative Economic System, Op-cit*, h. 382.

Selanjutnya menurut teori ini, tingkat upah/remuneration yang diterima oleh para pemilik suatu kelas tertentu dari segi produktif cenderung ditentukan oleh permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam jangka panjang dan dibawah kondisi-kondisi kompetitif, sehingga nilainya sama dengan produktivitas marjinal dari kelas agen produktif yang dimaksud dapat diberikan agen produktif ini pada nilai tukar barang dan jasa tersebut. Terdapat perbedaan yang mencolok dalam tingkat upah rata-rata, sama sulitnya dengan merata-ratakan orang. Contoh seorang manager bank swasta bisa memperoleh \$4 juta per tahun, sedangkan seseorang petani hanya mendapat \$15.000 dan seorang buruh tani \$12.000. dalam pabrik yang sama, seorang mekanis memperoleh \$500 per minggu, sedangkan nelayan hanya mendapat &200, maka seharusnya teori upah yang lengkap harus mampu menjelaskan perbedaan-perbedaan itu. Selanjutnya sarana analisis dalam ilmu ekonomi yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja, kita dapat memahami fenomena dasar dari struktur upah.⁷⁴ Dan penulis tidak akan membahas masalah upah ini secara spesifik, tetapi hanya sebatas pembahasan yang bersifat ilustratif saja.

Adapun asumsi-asumsi dari teori distribusi yang secara spesifik dijelaskan sebagai berikut :⁷⁵

1. Ada banyak peminta (*demanders*) dan penawar (*suppliers*) dari setiap agen produktif atau kelas suatu agen.

⁷⁴Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Op-cit*, h. 274.

⁷⁵Ralp. H. Bladgett, *Op-cit*, h. 383.

2. Para pengguna dari setiap agen bersaing secara aktif memperebutkan peluang-peluang yang tersedia untuk penda penggunaannya, dengan tanpa kombinasi, organisasi, atau konspirasi pada salah satu sisi pasarnya.
3. Para pemilik setiap agen produktif dan mereka yang menggunakannya dalam produksi mendapat informasi yang cukup baik mengenai kondisi pasar yang mempengaruhi agen tersebut.
4. Setiap agen produksi bersifat mobil (bergerak) di seputar tempat-tempat dan posisi (jabatan) seseorang.
5. Ada suatu persamaan daya tawar antara penawar (*supplier*) dan para peminta (*demender*) pada setiap agen produksi.
6. Pemerintah tidak campur tangan dalam distribusinya, dan tingkat upah untuk para pemilik faktor-faktor produktif ditentukan secara eksklusif oleh faktor-faktor penawaran dan permintaan di pasar.
7. Para Pengusaha (*enterpriser*) yang meminta agen-agen produktif menjual produk-produk mereka sendiri dalam situasi pasar yang sangat kompetitif.

Lebih jauh lagi untuk menilai terealisasi atau tidaknya asumsi-asumsi di atas, secara praktek distribusi pendapatan dalam kehidupan ekonomi aktual akan serupa dengan yang diimpikan oleh teori umum tersebut. Akan tetapi kita dapat mengatakan bahwa bermacam-macam asumsi ini jarang atau jika pernahpun, maka sepenuhnya benar/sepenuhnya salah sebagai diskripsi tentang kondisi pasar aktual sehubungan dengan distribusi dalam sistem perekonomian kapitalistik, dan sejauh mana asumsi-asumsi itu terlaksanakan sangat tergantung pada situasi yang bervariasi dari satu agen

produksi ke agen produksi lainnya pada waktu yang sama. Meskipun sebagian dari asumsi-asumsi tersebut dapat saja tidak valid pada waktu tertentu dan kelas-kelas tertentu dari agen produksi, maka asumsi bahwa pemerintah tidak mencampuri distribusi pendapatan telah menjadi semakin "kurang berlaku" dalam perekonomian kapitalistik dalam tahun-tahun belakangan ini.

Di Amerika Serikat misalnya, pemerintah federal dalam periode perang mencampuri atau menentukan rente di banyak bidang di negara tersebut; pemerintah memberlakukan sebuah undang-undang yang mempromosikan dan mendukung organisasi-organisasi pekerja sebagai tujuan tawar-menawar kolektif dengan pihak majikan; pemerintah telah menjalankan kebijakan-kebijakan finansial yang mempunyai efek sangat besar pada suku bunga dalam perekonomian tersebut; dan pemerintah juga secara mencolok mengubah distribusi final pendapatan uang dengan menggunakan pajak progresif yang berat pada pendapatan dan laba yang berlebihan. Jadi secara umum teori distribusi secara keseluruhan, perlu untuk disimpulkan bahwa distribusi yang dipesifikasikan oleh teori umum tersebut belum baku (final) dari suatu aproksimasi (tidak sentralistik) yang muncul dalam praktek aktual terhadap sistem perekonomian kita.⁷⁶

Dan John Stuart Mill menyatakan bahwa distribusi pendapatan dalam ekonomi kapitalisme yang walaupun ia banyak memakai pengertian-pengertian seperti yang digunakan oleh teori pembagian yang klasik, berupa upah dan teori Malthus tentang penduduk, namun ia menunjukkan kemungkinan-kemungkinan

⁷⁶*Ibid*, h. 384-385.

untuk mencapai tujuan. Menurutnya upah riil yang akan diterima oleh kaum buruh, jika tidak terpaksa karena putus asa tidak mencukupi keperluan hidup semata-mata tetapi harus disesuaikan pula dengan tingkat penghidupan yang berlaku.⁷⁷

Sungguhpun demikian dia membenarkan pemikirannya David Ricardo di mana keuntungan harus turun jika biaya kerja naik, namun ongkos buruh tersebut tidak sama dengan upah. Lebih lanjut dikatakan bahwa: “ongkos buruh sering paling tinggi dan upah paling rendah”, sebab biaya buruh menjadi lebih efisien, dan mereka juga bisa dipekerjakan dengan kemajuan teknologi.

Oleh sebab itu semakin besar modal oleh suatu negara, semakin tinggi upah yang dapat dibayarkan, karena dengan adanya akumulasi modal suatu negara menjadi lebih produktif. Hal ini didukung oleh realitas yang terjadi di masyarakat, sejauh ini Smith (baca: bahwa penulis mengajukan tokoh ini, sebab dia dianggap sebagai tokoh ekonomi klasik terkemuka yang sampai saat ini masih diakui pemikirannya) menemukan sejumlah alasan yang menyakinkan bahwa tumbuhnya Industri di Inggris, maka upah riil meningkat. Ia pun dengan tepat menunjukkan adanya korelasi antara taraf hidup yang rendah di India dan China dengan keterbelakangan industri disana.⁷⁸

Tetapi karena persaingan antara pekerja dalam memperebutkan pekerjaan, maka upah tidaklah mesti setinggi seperti seharusnya. Lagi-lagi menurut Smith, batas

⁷⁷George Soule, *Pemikiran-pemikiran Sarjana-sarjana Besar dalam Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1958), h. 173.

⁷⁸George Soul, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*, *Op-cit*, h. 58

terendah upah ialah pemenuhan kebutuhan minimum untuk dapat hidup (subsistensi), sebab di bawah batas itu penduduk akan mati. Jumlah tenaga kerja yang langka disertai dengan laju peningkatan kekayaan nasional yang pesat menyebabkan upah naik seperti yang pada umumnya terjadi di Amerika Utara. Jadi dalam hal upah sama seperti harga barang-barang lain, yaitu berlaku hukum permintaan (seperti yang dijelaskan diatas).⁷⁹

Hal ini menurut Adam Smith, tingkat kelahiran orang-orang miskin amat sangat tinggi, tetapi angka kematian bayi juga sangat tinggi-kebenaran ini kemudian diperkuat oleh penelitian statistik. Tingkat kelahiran yang tinggi menambah penawaran angkatan kerja dan cenderung mempertahankan upah pada tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sekedar untuk hidup (subsistensi) dalam perekonomian yang statis, atau malahan kurang dari itu bila perekonomian mengalami kemunduran. Sebab syarat utama untuk menaikkan upah dalam perekonomian yang berkembang-yaitu suatu perekonomian yang mampu memproduksi dengan laju pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, kemakmuran orang-orang kaya menyebabkan tingkat kelahiran di kalangan mereka turun dan dengan demikian kekayaan cenderung terpusat di kalangan orang-orang kaya saja.

Satu hal yang perlu dikemukakan di sisni, baha *Paul Douglas* yang merintis tentang perubahan dalam jumlah tenaga kerja dan membiarkan pembagian tenaga

⁷⁹Ringkasnya dalam ekonomi Kapitalis, jika seseorang mempunyai tanah, maka ia akan mendapat sewa. Jika ia sebagai seorang pekerja, maka ia akan mendapat upah dan sebagai seorang kapitalis, ia akan memperoleh bunga. Selanjutnya jika ia seorang pengusaha, maka ia akan menerima laba. Jelasnya baca dalam Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 311.

kerja relatif dan modal kurang lebih sama. Kenyataan menunjukkan secara empiris saham relatif tenaga kerja cenderung berada pada keadaan yang diramalkan, sehingga mengindikasikan distribusi pendapatan antara tenaga kerja dan modal dalam keseluruhan kira-kira sama dengan yang dihasilkan dalam keadaan persaingan sempurna. Akan tetapi ini bukanlah berarti perekonomian Amerika sempurna. Akan tetapi ini bukanlah berarti perekonomian Amerika Serikat merupakan persaingan sempurna. Dan yang dapat dikatakan ialah ketidaksempurnaan semacam itu dalam persaingan seperti yang telah ada tidaklah mempengaruhi seluruh distribusi pendapatan antara tenaga kerja dan modal. Walaupun harus diakui keadaan yang tidak sempurna pada pasar memang mempunyai pengaruh terhadap distribusi pendapatan, akan tetapi yang paling besar dari ketidaksempurnaan ini ialah dalam bidang redistribusi pendapatan di sektor tenaga kerja daripada antara tenaga kerja dan pemilik modal.⁸⁰

Dan dalam hal *Penduduk*, menurutnya bertambahnya jumlah penduduk dapat diatasi, dan laba yang besar, upah yang tinggi mungkin memiliki persamaan. Kecendrungan ini pada kenyataannya terdapat di Inggris dan Amerika Serikat sejak tulisan Mill ditulis. Lebih lanjut dia mengemukakan bahwa doktrin harga adalah khusus tentang pembagian yang berlaku pada ekonomi doktrin, daripada "huku

⁸⁰Don Bellante & Mark Jackson, (Ed. Pratama Raharja), *Ekonomi Ketenagakerjaan; Pasar Kerja dan Distribusi Pendapatan*, (Jakarta; Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1983), h. 449-450.

alam”, doktrin tersebut dapat diubah, seraya mengingatkan bahwa kebenaran-kebenaran dalam ekonomi bersifat global (tentatif) saja.⁸¹

Adapun tentang *laba*, Adam Smith mengatakan jika suatu negara berhasil mengadakan akumulasi modal, maka tingkat keuntungan cenderung turun karena semakin banyak persaingan di dunia industri. Implikasinya dalam masyarakat yang masih terbelakang kesenjangan anyara yang kaya dan miskin justru lebih tajam. Selajutnya ia sangat menentang monopoli, sebab monopoli merupakan musuh besar manajemen profesional. Manajemen yang baik tidak akan pernah dilaksanakan kalau orang “tidak dipaksa” oleh persaingan bebas untuk menerapkannya agar bisa bertahan.⁸²

Mengenai *sewa*, Smith berpendapat bahwa sewa pada hakikatnya merupakan suatu harga monopoli. Jika diilustrasikan bahwa tanah yang dibutuhkan itu terbatas, maka orang-orang yang memilikinya dapat menarik bayaran tertentu dari pemakai. Sewa ini bukan upah tenaga kerja ataupun balas jasa bagi para pemilik modal/investor.⁸³ Sebab sewa yang tinggi semata-mata akibat dari kekayaan nasioanl

⁸¹George Soule, *Pemikiran-pemikiran Srjana-sarjana Besar Ekonomi, Op-cit*, h.174.

⁸² George Soul, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes, Op-cit*, h.59.

⁸³Adapun yang dimaksud dengan *Sewa tanah* adalah bayaran kepada pemilik tanah, karena digunakannya sumberdaya alam ini. Pembayaran kepada tuan tanah itu dapat juga termasuk bunga atas kapital yang dipergunakan untuk memajukan tanah, gedung dan sebagainya. Tapi pembayaran ini berbeda dengan sewa itu sendiri, sebab pemilik tanah dapat mengambil sebagian dari laba rata-rata yang biasanya terdapat norma-norma kapitalisme. Atau sebagian dari laba-lebih (kelebihan laba) yang datang dari upah pertanian yang rendah, tapi Marx mengabstraksikannya sebagai penyimpangan terhadap norma-norma kapitalisme. Hal ini disebabkan dalam sistem kapitalis, tanah merupakan sumber pendapatan. Harga tanah ditentukan oleh kapitalisasi sewa yang dihasilkan. Sebab sewa sudah menerangkan harga tanaah dan tidak sebaliknya, sebagai contoh: dengan 5% suku bunga, maka tanah yang menghasilkan sewa 200 a' acre layak berharga 4000, sebab 200 adalah 5% dari 400 pounds. Karena tanah itu aman dan *berprestige* sebagai aset, dalam kenyataannya ia dapat menentukan harga

yang melimpah atau tingkat upah yang tinggi. Dalam analisisnya tentang sewa, Adam Smith telah merintis teori terkenal tentang “*unearned increment*” (penghasilan bukan karya). Teorinya itu juga mencerminkan kecurigaan produsen barang-barang industri terhadap sisa-sisa sistem feodal dan para pemilik tanah.⁸⁴

Selanjutnya Ricardo mengatakan bahwa sewa adalah bagian hasil tanah yang dibayarkan kepada tuan tanah untuk menggunakan kekayaan tanah asil dan tidak rusak. Menurutnya sewa merupakan surplus diferensial yang berarti selisih hasil tanah mutu unggulan dengan hasil tanah mutu rendah, atau mungkin juga timbulnya sewa karena kesulitan tanah sehubungan dengan permintaan. Sementara Profesor Marshall menjelaskan bahwa hakikat pengertian sewa adalah pengertian tentang suatu surplus yang diperoleh suatu kesatuan untuk melakukan pekerjaannya.⁸⁵

Lebih luas lagi implementasi kongkret dari teori tentang distribusi harta/pendapatan ini, maka dapat ditinjau dari berbagai perspektif namun para pakar ilmu ekonomi telah memusatkan perhatian terhadap dua saaja yaitu : distribusi “fungsional” (Pembahasannya menyangkut pembagian pendapatan di antara pekerja dan apemilik modal) dan distribusi pendapatan “ukuran”.

a. Ukuran Distribusi Pendapatan⁸⁶

yang relatif tinggi, walaupun pengembalian tanah dapat saja rendah ketimbang aset lainnya. Lihat Anthony Brewer, *Kajian Kritis DAS Kapital Karl Marx*, (Jakarta: Teplok Press, 1999), h. 261.

⁸⁴George Soul, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles hingga Keynes*, *Op-cit*, h.59

⁸⁵Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, *Op-cit*, h. 115.

⁸⁶Don Bellante and Mark Jackson, *Op-cit*, h. 447-458.

Ukuran distribusi merupakan suatu konsep tentang penyebaran pendapatan baik bersifat individual maupun rumah tangga dalam masyarakat. Dengan kata lain, ukuran distribusi pendapatan membahas derajat ketidaksamaan pada distribusi pendapatan. Tiga diantaranya yang paling lazim digunakan ialah :

1. Kurva Lorenz
2. Indeks atau Rasio/Koefisien Gini
3. Kriteria Bank Dunia

Pada dasarnya Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk, secara kumulatif juga. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri "ditempatkan" pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Maka kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin luas) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang *semakin merata*. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka mencerminkan keadaan distribusi pendapatan yang semakin buruk dan tidak merata. Adapun alat untuk mengukurnya dengan grafik yang biasanya menggunakan kurva Lorenz. Kurva ini menunjukkan juga persentase kumulatif pendapatan yang diterima, dapat digambarkan pada persentase kumulatif rumah tangga dalam masyarakat yang menerima pendapat itu.

Semenatar itu salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah faktor *pertumbuhan ekonomi*.⁸⁷ Sehingga sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Dalam bahasa teknis ekonominya, produktivitas ini diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB atau Gross National Product/GDP).⁸⁸ Selanjutnya PNB atau PDB mengukur hasil keseluruhan sebuah negara, padahal besar negara (dalam arti jumlah/kuantitas penduduknya) berlainan. Oleh karena itu agar bisa membandingkannya, maka digunakan ukuran PNB/kapita atau PDB/kapita. Dengan demikian dapat dilihat produksi rata-rata setiap orang dari negara yang bersangkutan.⁸⁹

Maka seluruh kekayaan yang dimiliki atau diproduksi oleh negara itu tidak berarti menjadi milik semua penduduknya. Bisa jadi, sebagian kecil orang di negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar yang lain hidup dalam kemiskinan. Jadi sebuah negara yang tinggi PNB/kapitanya bisa saja kita temukan di mana-mana terdapat penduduk miskin, tidak punya tempat tinggal dan kedinginan pada musim dingin. Oleh karena itu dibutuhkan

⁸⁷Wijaya mendefinisikan pertumbuhan ekonomi ialah sebuah proses yang menyebabkan terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan Nasional riil. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan terjadi jika kenaikan out put per kapita. Selanjutnya baca dalam Faried Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomi-ekonomi Makro*, (Yogyakarta; BPFE, Ed. III, cet, I, 1992), h. 264-265.

⁸⁸Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, cet. III, 1996), h. 2.

⁸⁹*Ibid.*, h. 3

indikator yang lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu faktor pemerataan ekonomi.⁹⁰

b. Sumber Ketidaksamaan⁹¹

Pada dasarnya identitas terdekat pada ke dua koefisien menunjukkan dan lebih menyakinkan bahwa ketidaksamaan dalam distribusi kekayaan *bukanlah* sumber utama dari ketidaksamaan pendapatan disebabkan ketidakmerataan tenaga kerja, pemilikan kekayaan. Orang-orang yang sangat kaya apakah karena warisan, kemampuan, atau keberuntungan menikmati pendapatan jauh di atas jumlah yang diperoleh rumah tangga rata-rata. Sebab orang-orang yang tidak memiliki kekayaan sulit memperoleh pendapatan besar.⁹² Sementara koefisien Gini dan kurva Lorenz mengambil garis persamaan yang sempurna sebagai norma perbandingan dengan distribusi yang ada. Akan tetapi jika ditentukan perbedaan yang ada dalam soal cita rasa, kapitalitas, investasi human kapital, jumlah jam kerja dan variabel lainnya, persamaan pendapatan sempurna menjadi tidak berarti sebagai standar perbandingan. Maka jika distribusi pendapatan “kurang sama” di Amerika Serikat dibandingkan dengan negara makmur seperti Swedia atau negara totaliter seperti Uni Sovyet (sekarang Rusia) ini berarti tidak diragukan lagi menggolongkan Amerika memiliki distribusi rendah. Sesungguhnya demikian identifikasi distribusi ini sebagai “ideal” merupakan suatu persoalan yang murni *normatif* atau *filosofis*, bukanlah sasaran bagi analisis ekonomi. Sekalipun jika

⁹⁰*Ibid.*,

⁹¹Don Bellante and Mark Jackson, *Op-cit*, h. 459.

⁹²Paul A. Samuelson & Willam D. Nordbaus, *Op-cit*, h. 420

satu atau lain distribusi diterima sebagai “ideal” distribusi Amerika tidak dapat dianggap rendah, kecuali jika menyimpang besar sekali dari distribusi yang “ideal”.

Dalam ekonomi Islam, yang menjadi ebyek bahasan dalam distribusi pendapatan antara lain tentang konsep/prinsip *sewa dan upah, modal dan tenaga kerja*. Kita mulai dengan faktor yang *Pertama* yaitu sewa dan upah, yang mana secara historis tidak terdapat “bukti” mengenai konsep sewa dalam istilah modern (namun menurut Umer Chapra permasalahan sewa masih mengalami kontraversial di kalangan ulama fiqih)⁹³ yang pernah dikembangkan pada masa Nabi Muhammad SAW, barang kali (menurut Abdul Mannan) pada masa itu tidak terdapat kekurangan tanah. Kebutuhan tersebut telah berlangsung lama dan permanen dirasakan selama masa Khalifah ‘Umar, sebagai akibat penaklukan Irak, Suriah, Iran dan Mesir. Lagi-lagi menurut Abdul Mannan konsep sewa dalam bentuk yang sederhana telah

⁹³Para ahli fiqih tidak mengizinkan baik tanam bagi hasil maupun sewa tanah untuk masa tertentu dan menegaskan bahwa seorang pemilik tanah harus menanam sendiri tanahnya sebisa nya dan memberikan sisanya kepada orang lain agar bisa melakukan hal yang sama. Namun ada dikalangan ahli fiqh membolehkan tanam bagi hasil, tetapi melarang sewa untuk masa tertentu. Keberatan mereka adalah walaupun pada mulanya Nabi SAW tidak menganjurkan tanam bagi hasil dan sewa tanah untuk masa tertentu, tetapi kemudian beliau mengizinkan tanam bagi hasil dan ini telah menjadi praktek luas di kalangan sahabat Nabi dan penerusnya. Walaupun demikian mayoritas ahli fiqh “membolehkan” baik tanam bagi hasil maupun sewa untuk masa tertentu, yang disesuaikan dengan dibolehkan mudharabah dan sewa dalam Syari’ah. Adapun ergumentasi mereka bahwa kemiskinan mayoritas ummat Islam di masa awal periode Madinah telah mendorong Nabi SAW, untuk lebih banyak menuntut dari orang kaya. Dan untuk lebih adilnya, maka para ahli fiqh yang membolehkan sewa untuk masa tertentu, diharapkan mereka akan berusaha untuk menjamin keadilan kepada penyewa dengan menyepakati sejumlah persyaratan validitas kontrak sewa tanah. Contohnya, menurut Imam Malik bila hasilnya rusak atau penyewanya tidak dapat menanam tanah yang disewa karena diluar kontrolnya (misalnya banjir atau kekeringan) maka kontrak dapat dibatalkan karena resiko yang berlebihan dan tidak menentu. Silakan baca: *Shahih-Muslim*, vol. 3, 1995, h. 1186: 90. Juga Abdul Hamid Abu Sulaiman, “The theory of the Economic of Islam”, dalam *Contemporary Aspects of Economic Thinking in Islam*, 1976, h. 9-12.

berkembang tidak hanya karena langkah revolusioner 'Umar dengan adanya larangan pembelian tanah oleh kaum Muslimin di wilayah yang ditaklukan, tetapi juga karena dihentikannya praktek mendistribusikan tanah⁹⁴ taklukan dikalangan muslimin. Selanjutnya 'Umar mengizinkan para penggarap tanah asli untuk membudidayakan tanah mereka berdasarkan pembayaran *Kharaj* dan *Jizyah*.⁹⁵

Oleh karena itu paktek Nabi SAW pada periode awal di Madinah mengindikasikan jika negara Islam memiliki wewenang untuk mengingatkan kesejahteraan para petani pemilik tanah dan yang tidak memiliki tanah dan juga mengurangi pemusatan kekayaan di masyarakat Muslim. Dalam rangka melindungi kepntingan kedua belah pihak, ada tiga unsur yang menajdi pertimbangan di negara Islam :⁹⁶ produktifitas tanah, penggarap dan kesejahteraannya dan biaya pengolahan, sebelum menetapkan swa atas tanah.

Dari ketiga unsur diatas, kesejahteraan petani penggarap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan sewa atas tanah dan pemilik tanah dianggap tidak adil, jika

⁹⁴Adapun yang dimaksud dengan distribusi tanah adalah suatu penentu utama untuk distribusi pendapatan dan kemiskinan. Maka negara-negara yang telah menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan suatu distribusi pemilikan tanah yang adil, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan Costa Rica telah mampu mencapai suatu distribusi pendapatan yang relatif lebih adil, sementara negara-negara yang membolehkan berlangsungnya pemilikan tanah mengalami kemiskinan yang tinggi dan distribusi pendapatan tidak adil. Lihat dalam Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 113.

⁹⁵*Kharaj* adalah salah satu bentuk pajak yang bisa dirubah oleh pemerintah Islam, dan tidak disebutkan al-Qur'an tetapi berdasarkan ijma'. Adapun yang dimaksud dengan *Jizyah* adalah pajak untuk mendapatkan hak milik yang ditetapkan bagi orang non-Muslim yang bersumber dari al-Qur'an, yaitu: "Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberi al-Kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tunduk dan patuh". (Q.S. at-Taubah: 29). Lihat juga dalam Amrullah dkk, *Op-cit*, h. 43.

⁹⁶Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 179.

menetapkan sewa atas tanah tersebut melebihi daripada apa yang dihasilkan tanah tersebut, walaupun dalam kondisi apapun.

Adnya dua prinsip yang mendasari sewa atas tanah yaitu: *Pertama*, keadilan yang berarti sewa yang dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka merasa bahagia dan puas, dengan demikian harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tanah tersebut. *Kedua*, kemurahan hati yang berarti sewa yang akan dipungut ketika mereka menghasilkan melebihi diatas kebutuhan mereka.⁹⁷

Faktor yang kedua berlaku adalah *modal*, sebagaimana yang kita ketahui bahwa modal dalam ekonomi modern sangat ditentukan oleh tingkat bunga, permintaan dan penawaran, modal juga ditentukan seberapa besar tingkat bunga yang berlaku. Adalah ekonomi keynesian mengandung jika tingkat bunga tinggi, maka tabungan yang terbentuk menjadi besar sehingga sumber modal pun menjadi besar tetapi konsep ini mengandung kelemahan, sebab jika kegiatan bunga tinggi, maka investasi akan menurun. Hal ini berarti kegiatan ekonomi akan mengalami penurunan. Adapun yang dimaksud dengan modal dalam ekonomis Islam adalah “sarana produksi yang menghasilkan” tidak sebagai kerja sesudahnya. Pada kenyataannya modal dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber daya alam. Dalam karya-karya Wicksell, modal adalah “Suatu keseluruhan tunggal yang terpadu dari tanah dan tenaga kerja yang tersimpan,

⁹⁷Selanjutnya baca dalam Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 178.

bertumpuk-tumpuk selama bertahun-tahun lamanya". Oleh karena itu dalam suatu masyarakat bebas-bunga, modal dapat diperlakukan dalam pengertian yang digunakan dalam produksi kapitalistik. Karena sistem ekonomi Islam mendukung suatu masyarakat yang seimbang, perbedaan antara modal pribadi dan sosial jadi tidak penting. Tetapi tidak demikian hanya dalam masyarakat kapitalis sekarang ini, di man pinjaman perang oleh pemerintah adalah modal. Lain halnya dengan negara Islam mempunyai hak untuk turun tangan bila modal swasta digunakan untuk merugikan masyarakat. Sebab terjadi dalil normatif yang mensinyalir, jika menyalahgunakan kekayaan masyarakat yaitu: "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya kelehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta."⁹⁸

Selanjutnya teori Islam tentang modal lebih realistis, luas, mendalam dan etis dibandingkan dengan yang ada dalam teori modern: *Realistik*, karena produktivitas modal yang mengalami perubahan berkaitan dengan kenyataan produksi, yang dianggap murah dalam pertumbuhan yang dinamis. *Luas dan mendalam*, karena memperhatikan semua variabel seperti mata uang, jumlah penduduk, penemuan baru, kebiasaan, selera, tingkat hidup, ketinggalan waktu dan sebagainya. *Etis*, Karena keikutsertaannya dalam berbagai bidang di suatu negara Islam harus bersifat adil dan wajar, juga harus bebas dari eksploitasi para pelaku produksi lainnya, sehingga terciptanya kekayaan nasional. Oleh sebab itu dalam kerangka sosial Islam, bunga

⁹⁸Q.S. al-Haqqah: 30-32

yang ditetapkan pada modal tidak diperbolehkan menimbulkan dampak yang merugikan ekonomi.⁹⁹ Idealnya *modal* dalam ekonomi Islam, haruslah terbentuk bebas dari bunga, sebab modal dalam Islam bersumber dari kesediaan dari orang-orang kaya untuk berbagi hasil dengan orang miskin yang produktif dan diimplementasikan dalam bentuk zakat.

Faktor yang selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor yang diakui dalam ekonomi Islam bukan hanya sebagai suatu jumlah yang besar dan diutamakan tetapi juga kualitas tenaga yang ditawarkan melalui permintaan dan penawaran tenaga kerja dan juga bentuk hubungan antara pemilik dan tenaga kerja.¹⁰⁰ Walaupun demikian, sifat faktor produksi dalam Islam berada karena kenyataan bahwa perburuhan, maka semua faktor produksi tidak hanya tergantung kepada proses perubahan sejarah (seperti yang terdapat dalam ekonomi sekuler modern) melainkan juga pada kerangka moral dan etika tanpa batas waktu di mana faktor produksi perlu bekerja. Hal ini disebabkan juga banyak atribut hubungan pemilik modal, buruh, perilaku para pekerja terhadap majikan dan sebagainya, harus berdasarkan pada Syari'at.¹⁰¹

Selanjutnya Baqir as-Shadar¹⁰² mengatakan bahwa ketiga-tiga faktor ini sangat dipengaruhi oleh politik ekonomi tetapi beliau mengingatkan bahwa buruh/tenaga kerja (termasuk organisasi) bukanlah material kekayaan yang boleh

⁹⁹Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Op-cit*, h. 124.

¹⁰⁰Dochak Latief, *Op-cit*, h. 19.

¹⁰¹Muhammad Abdul Mannan, *Op-cit*, h. 58.

¹⁰²Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 396-397.

dimiliki, sebaliknya merupakan unsur kemanusiaan dalam pengeluaran dan mekanisme faktor inilah yang menghasilkan modal.

Lebih jauh lagi Abdul Abu Sulaiman menolak ide yang menganggap “buruh/tenaga kerja” sebagai faktor pengeluaran yang dianggapnya merupakan konsep yang ada dalam ekonomi kapitalis yaitu pengeluaran adalah masalah terakhir. Menurut beliau faktor-faktor pengeluaran hanyalah tanah dan modal, sementara buruh atau lebih tepat lagi manusia merupakan entitas yang mendapat masukan dari faktor-faktor tersebut. Maka perbedaan antara modal dan tanah di satu pihak dan manusia di pihak lain, beliau mengemukakan peraturan bahwa tanah dan modal dibagikan kepada orang yang mengerjakannya. Sebab jika buruh dianggap sebagai “faktor pengeluaran” yang mungkin akan menyebabkannya dipergunakan oleh pihak lain.¹⁰³

Adapun tentang *upah* terhadap buruh/karyawan, dalam sistem ekonomi Islam harus didasarkan pada kesempatan kedua belah pihak yaitu *saling rela* (‘an taradin), sedangkan penentuan nilainya didasarkan pada manfaat kerja yang telah diberikan buruh terhadap majikan tersebut (bukannya berdasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KMK). Tidak boleh ada pihak lain dalam penentuan upah termasuk pemerintah. Sebab adanya penentuan UMR oleh pemerintah, jika terlalu tinggi dan di luar kemampuan pengusaha, maka hal itu akan merugikan pengusaha sehingga akan menyebabkan usahanya mengalami kerugian. Sedangkan bila terlalu rendah, jelas akan

¹⁰³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Tinjauan Penulisan Semasa*, terj. Amin Abdullah, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989), h. 82-83.

merugikan kaum buruh. Oleh sebab itu, Islam menyerahkan penentuan itu dikembalikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan kerelaan masing-masing. Peran pemerintah hanyalah memberi bantuan penyelesaian jika terjadi perbedaan dalam menaksir nilai manfaat dari kerja yang akan dilakukan tersebut.

Berkenaan dengan standar upah minimal, Islam mengendaki keikutsertaan para pekerja dalam keuntungan. Karena itu, kemudian dengan sendirinya penghasilan para pekerja diharapkan akan memiliki kesempatan yang layak untuk menjadi bebas gharar, tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada para majikan. Anggapan ini selanjutnya diperkuat oleh prinsip Islam tentang mudharabah, yang bisa diperaktekkan oleh masyarakat Islam masa awal dan yang sekarang dihidupkan lagi. Menurut Munawar Iqbal, mudarabah tidak hanya bentuk organisasi bisnis, tetapi memiliki pesan dan prinsip serta implikasi yang luas. Jadi, nilai produk seluruhnya minus upah minimum harus dianggap sebagai hasil keuntungan dari produktivitas gabungan antara tenaga kerja dan modal, yang karenanya harus dibagi antara keduanya, sehingga para pekerja dapat menerima upah pasar selama jangka waktu produksi, tetapi penghasilan mereka akan disesuaikan dengan hasil bisnis yang terakhir.¹⁰⁴

Hal ini diperkuat oleh Al-Qur'an maupun Sunnah dinyatakan bahwa para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sebab

¹⁰⁴Munawar Iqbal, (Ed), *Distributive Justice and fulfilment in an Islamic Economy*, (Islamabad; Leicester, U.K, cet. I, Inetrnational Institute of Islamic Economics and The Islamic Foundation, 1986), h. 47.

setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik di pihak majikan maupun pekerja, dan ini harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Dalam sebuah Hadits juga dijelaskan bahwa “Bayarlah upah para pekerjamu sebelum keringatnya kering”.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

STUDI PERBANDINGAN

SISTEM EKONOMI KAPITALISME,

SISTEM EKONOMI SOSIALISME DENGAN SISTEM

EKONOMI ISLAM

A. Persamaan dan Perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis dan Sistem Ekonomi Islam

Banyak teori ekonomi yang dikemukakan oleh para ahli, tetapi di pihak lain banyak pula yang merasakan penderitaan karena setiap teori menimbulkan persoalan baru dan permusuhan yang lebih berat.

Sampai tahun 50-an, dunia hanya dipengaruhi oleh pertentangan ideologi antara Kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak lainnya. Namun sejak tahun 60-an dunia menghadapi pertentangan baru, yaitu adanya gerakan baru dalam dunia ekonomi dengan adanya kelompok 70 yang beranggotakan 121 negara berkembang menuntut keadilan dalam pembagian kekayaan dunia.¹

Kedua kubu Kapitalisme dan Sosialisme, dengan pertentangan mati-matian berpangkal pada satu falsafah hidup yang dinamakan materialisme (falsafah

¹Abdullah Zaky Al Kasf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2002), h. 68

kebendaan). Seolah-olah manusia melupakan bahwa di balik materi yang diperjuangkannya, masih ada kekuatan gaib yang harus diyakini dan ditahuti yaitu Tuhan yang Maha Esa.

Islam membawa falsafah tentang harta dunia yang menguasai sebagian faham manusia di dunia, yaitu falsafah ketuhanan. Falsafah ini berbeda sekali dari paham universalisme dari gereja pada abad pertengahan yang lalu dan juga faham idealisme yang bisa diartikan orang.

Islam jug amenempuh cara praktis dalam mendidik dan melatih umatnya agar memelihara keseimbangan dalam menjalankan berbagai kegiatan, dan berusaha mengendalikan naluri mementingkan diri sendiri seta menyeleraskan diri kepada Allah, sepiritual dan juga ekonomi melalui pendidikan moral. Disamping itu mengendalikan hawa hafsu yang berlebihan dalam ambisi-ambisi syaitani yang terdapat dalam masyarakat atau umat manusia. Setelah keyakinan dan keimanan terhadap Allah menjadi dasar pokok maka umat Islam akan sadar atas kewajiban dan tanggung jawab baik pada diri sendiri maupun terhadap sesama makhluk.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia, dimana setiap anggota masyarakat di dorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat, disamping berusaha utnuk memperbaiki kehidupan rohami dan mengingatkan setiap benda di dunia untuk di ambil manfaatnya, tetapi secara bersamaan. Islam mendidik

mereka bertanggung jawab, bukan saja kepada istri dan keluarga, tetapi juga terhadap saudara-saudaranya. Yang miskin dan melaat, negara dan akhirnya seluruh makhluk.²

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
واليفى... (النساء: ٩٠)

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkarab dan permusuhan ...*"³

Dan Firman-Nya yang lain dalam surat An-Nisa ayat 50 :

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن
تحكموا بالعدل... (النساء: ٥٧)



"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...*"⁴

Ayat al-Qur'an tersebut di atas menyerukan agar kita mengikuti prinsip keadilan ini dalam seluruh aspek kehidupan kita, walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling penting adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial.⁵ Persoalan keadilan ini akan lebih jelas

²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I, h. 74

³Mujamma' Khadim al haramain, *Asy Syarifaini al Malik Fahdli Thiba'at al Mashaf asy syarif*, (Madinah Munawarah; PO.BOX 3561, 1971), h. 917

⁴*Ibid*, h. 128.

⁵Mumammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1992), h. 48

lagi bila ia dikaitkan dengan aspek ekonomi.⁶ Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab terdahulu yang menyangkut ketiga aspek yaitu; aspek kepemilikan, aspek konsumsi dan aspek distribusi pendapatan.

Dari ketiga aspek ini, nanti dapat terlihat persamaan maupun perbedaan pandangan dari ketiga sistem ekonomi dalam memandang ketiga aspek kehidupan dalam bidang ekonomi.

1. Dalam aspek kepemilikan

Dari aspek kepemilikan ini antara sistem ekonomi Kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam hampir terjadi persamaan dalam arti sama-sama mengakui adanya kepemilikan individu, hanya dalam sistem ekonomi Islam berbeda karena ada prinsip keadilan. Hal ini dapat di deskripsikan sebagai berikut : “sebagaimana diketahui sifat tamak manusia yang keluh kesah, tidak sabar dan gelisah dalam berusaha untuk mendapat kekayaan, hal itu menjadikan memicu manusia melakukan berbagai aktifitas produktif”.⁷ Yang sangat berkaitan erat dengan kepemilikan, keinginan manusia untuk menguasai harta kekayaan menjadikannya menimbun kekayaan itu dan tidak membagi-bagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hak milik individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan, tetapi hendaklah menurut landasan tertentu, sebagaimana yang dianut

⁶*Ibid*, h. 49

⁷Junus Gozali, *Etika Ekonomi Islam*, (Serang; Saydara, 2001), h. 122.

oleh prinsip sistem ekonomi Islam yang tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut.

Sistem ekonomi sosialisme yang merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalisme, yakni mendahulukan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan individu, bahkan mengorbankan kepentingan individu untuk tujuan kepentingan orang banyak. Atas dasar inilah, maka sistem ini tidak mengakui adanya hak milik individu, sebagaimana ia juga tidak mengakui adanya kemerdekaan ekonomi individu dan mengartikan keduanya dengan hak milik umum dan kemerdekaan ekonomi umum atau hak milik dan kemerdekaan orang banyak.

Tidak diakuiinya hak milik individu dan kemerdekaan ekonomi, bertentangan dengan falsafah manusia dan menyebabkan kesedihan dan kemalasan. Itulah sebabnya negara-negara sosialis terutama Uni Sovyet menderita kemunduran produksi baik kuantitas maupun kualitas.⁸

Islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kerjanya melalui jalan-jalan salah dan tidak adil,⁹ dan membenarkan penggunaan semua aturan produksi, memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari penghidupan, memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta kekayaan, setiap ia juga harus berinisiatif untuk mengambil langkah supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang untuk kesuksesan

⁸Ahmad Muhamad Al 'Assal dan Fathi Ahmad Abd Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Kairo; CV. Pustaka Setia, 1419 H./1999 M), h. 34.

⁹Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 25

atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah.¹⁰

Sebagaimana diakui penyebab timbulnya bermacam-macam krisis dan meratanya pengangguran adalah para produksi sendiri yang berupaya mendapatkan keuntungan saja dengan mempertahankan barang dagangannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang besar pendapatannya, namun, ternyata barang-barang dagangannya memiliki kebutuhan pasar sehingga menyebabkan adanya hukum pengadilan dan permintaan, dan terutama harga, yaitu hal yang menangkiskan terjadinya kerugian besar bagi para produsen, terhentinya produksi dan bangkrutnya pabrik –pabrik industri untuk mencari pasar penjual hasil produksinya, yang tidak mampu dijual di dalam negerinya, serta hal yang menyebabkan terjadinya gejala penjajahan.¹¹

Sistem ekonomi Islam tidak merumuskan terlebih dahulu adanya pertentangan antara kepentingan individu untuk kepentingan orang banyak secara terus menerus, seperti yang dilakukan oleh ekonomi sosialisme. Islam juga tidak merumuskan bahwa individu dalam usaha merealisasikan kepentingan sebenarnya selalu merealisasikan kepentingan orang banyak, dan selalu terus menerus mendahulukan kepentingan individu atas kepentingan orang banyak, seperti yang dilakukan oleh ekonomi Kapitalisme.

¹⁰*Ibid*, h. 77

¹¹Ahmad Muhammad Al 'Assal dan Fathi Ahmad Abd Karim, *Op-cit*, h. 34.

Ekonomi Islam memiliki siasat tersendiri, yang tidak memusatkan kepada individu belaka, seperti halnya ekonomi kapitalisme, dan juga tidak memusatkan kepada masyarakat saja, seperti halnya ekonomi sosialisme, siasat ini berdiri atas dasar perhatian kepada dua kepentingan bersama-sama dan berdaya upaya menyelenggarakan keseimbangan antara keduanya yang dikenal dengan prinsip keadilan dalam pemilikan.¹²

2. Dalam aspek konsumsi

Aspek konsumsi sebagai kelanjutan dari aspek kepemilikan yang lebih menekankan kebebasan pemilikan individu dalam sistem ekonomi kapitalis sehingga menyebabkan kebebasan individu dalam aspek konsumsi secara sepuas-puasnya dalam membelanjakan harta kekayaan, sedang dalam sistem ekonomi sosialisme karena pemilikan itu merupakan pemilikan yang kolektif, maka dalam aspek konsumsi pun berdasarkan pembelajaran yang berdasarkan kepuasan orang banyak.

Rasionalitas ekonomi beranggapan bahwa para konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan mereka. Ekonomi modern termasuk aliran tempo dulu, menggunakan istilah kepuasan dalam pengertian yang khusus sama sekali bukan tidak mengandung makna utilitarian.

Dalam ekonomi modern konsep kepuasan ini tidak mengacu kepada berbagai jenis kepuasan, baik spiritual maupun kebendaan. Namun makna kepuasan ini tidak diterima dalam kajian kita, fakta bahwa konsumen memiliki sifat yang dipengaruhi

¹²*Ibid*, h. 36.

oleh semangat Islam ternyata memberi pengaruh tertentu terhadap motifasi tersebut.¹³ Pemaksimumkan kepuasan itu sendiri merupakan suatu norma yang tidak terikat yang di sanjung oleh peradaban material, dan selanjutnya digantikan oleh norma baru agama Islam walaupun tidak secara menyeluruh. Bagaimanapun juga, konsumen masih tetap sendrung mencoba memaksimumkan kepuasannya dalam setiap kesempatan¹⁴

Hal ini diperjelas Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat (29) yang artinya :

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengeluarkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (jangan bathil dan boros)".¹⁵

Ringkasnya, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperolehnya dengan cara yang halal, tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta yang diperolehnya itu dengan cara yang sewenang-wenang, dan membatasi penggunaannya. Jelasnya terdapat hanya tiga penggunaan yang sesuai terhadap harta yang diperoleh seseorang. Dibelanjakan atau diinvestasikan untuk pengembangan hartanya atau disimpan saja.¹⁶

Menurut Islam, jalan terbaik yang perlu diikuti ialah dengan membelanjakan semua harta yang dimiliki menurut keperluan yang wajar dan halal dan jika terdapat kelebihan sebaiknya disumbangkan kepada orang lain supaya keperluan (pokoknya)

¹³Mumammad Nejatullah Siddiqi, *Op-cit*, h. 94.

¹⁴*Ibid*, h. 95.

¹⁵Mujamma' Khadim al Haramain, *Op-cit*, h. 94.

¹⁶Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 81.

dapat terpenuhi, islam menganggap hal tersebut sebagai salah satu akhlak yang luhur dan diutamakan supaya menyesuaikan dengan keperluan masyarakat.

Suatu masyarakat yang mendapat pengaruh etika Islam selalu berusaha lebih menghormati orang yang memiliki dan menyumbngkan hartanya daripada golongan yang hanya menumpuk hartanya atau menginvestasikan kekayaannya untuk terus mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan.¹⁷ Dalam hal ini prinsip tersebut dikenal dengan keadilan dalam konumsi, pada bagian ini prinsip Islam hampir sama dengan sosialisme.

3. Dalam aspek distribusi pendapatan

Sejak dahulu sampai sekarang masih berlangsung kontroversi yang luas tentang persoalan distribusi pendapatan antara berbagai golongan rakyat di setiap negara demokrasi di dunia. Dikemukakan bahwa teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat, terutama ia harus mampu menjelaskan fenomena, bahwa sebagian kecil orang kaya raya, sedangkan sebagian terbesarnya adalah orang miskin.

Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu tetapi, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara, demikian menurut sistem sosialisme. Akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian besar kekayaan itu akan masuk ke dalam kantong kapitalis.¹⁸

¹⁷*Ibid*, h. 82.

¹⁸Junus Gozali, *Op-cit*, h. 140

Dalam Islam prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang, yang tujuan pendistribusian pendapatan tersebut ada dua :*Pertama*, agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu berada dalam masyarakat. *Kedua*, berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.

Islam memberikan penekanan terhadap penyucian dan pembersihan jiwa manusia untuk mewujudkan suatu sistem kehidupan yang sejahtera, tetapi ia tidak pernah mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan yang praktis. Dalam upayanya mencapai tujuan pendistribusian harta yang adil kepada masyarakat melalui pendidikan dan pengamalan, untuk itu memerlukan tahapan-tahapan hukum tertentu. Bagaimana juga Islam jelas-jelas tidak menyetujui atau menganjurkan penyamarataan dalam distribusi kekayaan.¹⁹

Dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat (16) ditunjukkan betapa buruknya akibat dari penimbunan harta, yang berbunyi :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا قَرْيَةً تَدْمِيرًا

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan pendurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya".²⁰

¹⁹Afzalur Rahman, *Op-cit*, h. 82

²⁰Mujamma' Khadim al Haramain, *Op-cit*, h.

Dari penjelasan di atas, sesungguhnya ada perbedaan yang signifikan antara ketiga sistem ekonomi tersebut. Perbedaan itu bisa dilihat sebagai berikut :

1. Asumsi dasarnya

- a. Dalam ekonomi kapitalisme berawal dari konsep *Laissez faire* dimana setiap orang bebas untuk memiliki kekayaan sesuai dengan hasil produksinya sehingga setiap individu harus diizinkan mengambil komoditas dan jasa dari timbunan barang secara proporsional dari sejumlah agen produktif yang dimilikinya seperti dalam hal upah, tenaga kerja dan modal, artinya tanpa harus terikat oleh nilai-nilai manusiawi dan moral yang ada di dalamnya.
- b. Dengan konsep mekanisme pasar dan berfungsinya *invisible hand* yang ada dalam ekonomi kapitalisme, maka pemerintah tidak campur tangan dalam distribusinya (kalaupun ada tetapi sangat minim sekali) dan tingkat upah untuk para pemilik faktor faktor produktif yang ditentukan secara eksklusif oleh faktor penawaran dan permintaan dan juga persaingan bebas, dalam ekonomi sosial ditentukan oleh pemerintah sedangkan dalam ekonomi Islam berawal dari bahwa semua harta pada dasarnya milik Allah,²¹ dan manusia menguasainya sebagai amanat darinya, menunjuk pada pemilikan secara kolektif. Karenanya, dukungan tak bersyarat kepada pranata kekayaan pribadi yang menjadi sandaran kapitalisme tidak bergema dalam pemikiran Islam. Sebab kebebasan tanpa batas atas kekayaan pribadi hanya menyisakan

²¹Implementasi Komentari pernyataan di atas, ditegaskan oleh ayat al-Qur'an (Q.S. Al-Kahfi : 46)

arugan yang sempit bagi kebebasan manusia dengan membebaskan tanggung jawab sosial yang amat ringan kepada kaum kaya seraya mengorbankan kaum miskin. Jadi bagi setiap individu yang memilikinya harus mendistribusikan pada orang-orang yang berhak menerimanya dan landasan ini sering disebut dengan istilah tauhid atau juga menyadari bahwa setiap individu adalah khalifah Allah, sehingga memunculkan rasa accountabilitas dalam diri orang tersebut untuk mebransferkan hartanya. Dan intervensi pemerintah terhadap kondisi pasar dibenarkan, selama untuk menstabilkan harga di pasar, yang terimplementasikan dimana negara dapat mengenakan peraturan-peraturan pasar yang mencegah praktek dagang yang tidak jujur, misalnya mengawasi standar timbangan dan ukuran, mengawasi kualitas barang, menetapkan patokan harga, sampai kepada memberantas pasar gelap, penimbunan barang dan sebagainya.

2. Orientasi dan tujuannya

Pada dasarnya ketiga sistem ekonomi tersebut di atas bertujuan menegakkan keadilan dalam masyarakat, masalahnya adalah cara/ proses dalam menegakkannya yang sangat berbeda. Dalam ekonomi kapitalis terlepas dari norma-norma agama, mislanya dengan mengeksploitasi tenaga manusia demi kepentingan sesaat, demikian pula ekonomi sosialis yang merupakan kebalikan dari kapitalis, sedangkan dalam ekonomi Islam selalu mengacu kepada etika yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Contohnya, terdapat aspek etika dalam konsumsi yang terangkum dalam

beberapa hal yaitu : *Pertama*, menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. *Keuda*, mengajarkan bersikap yang sederhana yang mengandung lima dimensi yaitu keadilan (dalam mendistribusikannya), kebersihan (dalam mencarinya, berdasarkan halal/haramnya), kemurahan hati (untuk membelanjakannya sesuai dengan petunjuk syari'at).

3. Pada perilaku manusianya

Dalam ekonomi Kapitalis tidak terdapat aturan yang memuat agar para pemilik kekayaan untuk mendistribusikan pendapat kepada orang-orang yang berhak dan perilaku pemiliknya cenderung materialistik hedonistik yang mengakibatkan kekayaan terfokus pada sekelompok orang saja, semikian pula dalam ekonomi sosialisme hanya tertumpuh pada sekelompok manusia saja (kaum feodalisme), sebaliknya dalam ekonomi Islam terdapat anjuran agar setiap orang yang mampu mendistribusikan hartanya pada orang-orang yang memerlukan.

4. Asumsi terhadap makna bunga

Dalam ekonomi Islam tidak mengakui adanya paradigma bunga, hal ini disebabkan ; (1) bunga /riba meningkatkan kecenderungan dikuasainya kekayaan oleh segolongan kecil orang saja; dalam persoalan cenderung menghilangkan kepekaan seseorang terhadap sesamanya. (2) Islam tidak membolehkan laba yang di dapat dari kegiatan ekonomi kecuali kalau juga ada kemungkinan untuk merugi; tanggungan yang sah dari bunga nominal bisa dianggap sebagai laba yang pasti. (3) dalam Islam

kekayaan haruslah diperoleh dari kegiatan pribadi dan kerja keras, dan tidak dari sikap mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan laba sebanyak mungkin.²²

Permasalahan riba/ bunga boleh tidaknya telah begitu berkembang tidak hanya dikalangan orang muslim (dalam agama Islam), namun juga dikalangan non muslim, seperti yang diungkapkan oleh meruya K. Lewis yang menurut Akhmad Minhaji dalam bahasannya tentang perbandingan hukum kristen dan hukum Islam. Ada semacam pemahaman baha *Christianity is a relegion og theology* sedangkan *Judaism and Islam are religion of law* yang walaupun dalam bahasa Lewis nampaknya kurang seimbang, karena lebih menekankan informasi tentang hukum Islam. Terlepas dari persoalan tersebut Lewis mengungkapkan bahwa larangan riba/ bunga bukan hanya dikenal dalam Islam, tetapi juga dalam agama-agama lain termasuk kristen. Namun dalam perjalan sejarahnya, larangan dalam kristen semakin longgar dan akhirnya riba diperbolehkan dalam arti interest yakni usay dengan reasonable rates. Lewis menambahkan suatu hal yang tidak mungkin jika ada perubahan sikap Islam terhadap riba, dan “menyerahkan” agar Islam belajar dari pengalaman Kristen untuk merubah pandangannya sehingga pada akhirnya bisa menerima dan membolehkan riba.²³

Terlepas dari s boleh tidaknya riba /bunga, namun yang menjadi starting pint bahasan disini adalah dikarenakan riba itu sendiri lebih digunakan sebagai alat yang

²²Ahmad Amrullah, *Islamisasi Ekonomi; Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), h. 4.

²³Ahli Minhaji, *Riba; Haruskah Islam Belajar Kepada Kristen*, (Journal of Islamic Economics, UII, Yogyakarta, 6 Mei 1999), h. 127.

bisa dipakai untuk melakukan eksploitasi ekonomi. Misalnya, kalau pemerintah (atau lembaga perbankan lainnya) meminjam uang dari rakyatnya dengan syarat ada bunga yang diberikan, maka ada implementasi eksploitasinya lebih dari itu, apakah peminjaman tersebut bersifat individual, perusahaan atau pemerintah asing, kemungkinan kelalaian pemerintah akan selalu ada. Maka seharusnya sistem bank bisa dikembangkan berdasarkan peraturan-peraturan yang lebih memperbesar tanggung jawab (seperti sistem bang syari'ah yang memakai konsep mudlarobah/ bagi hasil) pihak yang meminjam agar jika perusahaan bangkrut tidak hanya berdasar pada pertimbangan kredit saja. Walaupun ini merupakan penyimpangan yang cukup banyak dari praktek perbankan di negara kapitalis Barat, sistem semacam ini akan menjadi saluran bagi mereka yang mempunyai modal lebih dan investasi yang baik. Jadi lebih khusus lagi dalam istilah ekonomi, sistem ini menggantikan peran yang dimainkan oleh sistem bunga di Barat sebagai imbalan atau mekanisme alokatif dari modal kepada produsen produksi, jika tidak modal akan sia-sia.

Selanjutnya dari uraian tentang riba/ bunga bisa dilihat adanya persamaan ajaran Islam tentang bunga dan persewaan. Menerima sewa dari tanah yang belum dibuka atau sumber alamnya belum diolah adalah dilarang, sebaliknya jika pemilik tanah sudah menggarapnya dengan memperkejakan orang dan/atau telah menginvestasikan sejumlah uang didalamnya, maka sewa bisa ditarik disesuaikan dengan pengolahan yang telah dilakukan.²⁴

²⁴Amrullah Dkk, *Op-cit*, b h. 49.

Dari uraian di atas, menurut penulis baik secara konseptual maupun operasional, antara ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis dan ekonomi Islam banyak memuat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan landasan ketiga sistem ekonomi tersebut berbeda yang antara lain adalah pada aspek moral/etika dan tidak mengakui paradigma bunga dalam ekonomi Islam, sehingga ketiganya tidak akan pernah mencapai titik temu, sebab mempunyai , kelebihan dan kelemahan masing-masing.

B. Analisis Penulis Tentang Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sistem Ekonomi Sosialisme dengan Sistem Ekonomi Islam

Sejarah peradaban manusia telah menyaksikan timbul tenggelamnya banyak sistem, suatu program untuk perbaikan dan pemenuhan kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran, tidaklah mengabaikan lembaga fundamental dan rencana luas organisasi yang mendasari sistem ekonomi secara keseluruhan. Sejak dahulu berbagai rencana komprehensif organisasi sosial telah diusulkan sebagai dasar rencana itu seperti ; anarkisme, feodalisme, kapitalisme, fasisme dan Islam.

Pada zaman modern sekarang ini, sistem perekonomian yang sangat dominan secara sederhana dapat diklasifikasikan pada tiga kelompok; sistem liberal/ kapitalik, sistem sosial/ komunistik dan sistem perekonomian campuran (modern ekonomi).²⁵

²⁵Winardi, *Pengantar Sistem-sistem Ekonomi*, (Bandung; Alumni, 1984), h. 26.

Khurshid Ahmad²⁶ menyatakan bahwa umat manusia dibawah kepemimpinan Barat telah mengalami empat ideologi utama selama tiga ratus tahun terakhir yaitu kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme dan negara sejahtera. Semuanya benar-benar di bangun di atas ideologi barat yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan moralitas dan agama. Mereka menganggap bahwa problem-problem ekonomi tidaklah diselesaikan melalui aturan sosial dan persoalan moral akan tetapi dikembalikan kepada aturan ilmu ekonomi.

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

Suatu sistem perekonomian liberal dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem ini memberi kelebihan yang cukup besar bagi individu-individu atau unit-unit perekonomian untuk melakukan terbaik bagi kepentingan masing-masing. Dalam sistem ekonomi liberal, alat-alat produksi utama, apakah itu tanah/ lahan, tenaga kerja, maupun kapital berada di tengah swasta. Keputusan-keputusan ekonomi dalam ekonomi liberal didistribusikan secara luas pada unit-unit yang lebih kecil, yaitu individu-individu dalam masyarakat. Istilah lain yang sering digunakan bagi sistem liberal adalah sistem kapitalis, yang pertama kali digunakan oleh Karl Marx untuk menunjukkan bahwa dalam sistem perekonomian liberal ini alat-alat atau faktor-faktor produksi lebih banyak dikuasai oleh pemilik kapital dari kalangan swasta.

Seperti sistem ekonomi lainnya, kapitalisme juga mengandung unsur pokok yang merupakan semangat atau pandangan ekonomi, jumlah dari keseluruhan tujuan,

²⁶Deliannov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995), h. 47,

motif dan prinsip yang di dominasi oleh tiga gagasan; perolehan, persaingan dan rasionalitas.

Tujuan kegiatan ekonomi dalam kapitalisme ialah perolehan menurut ukuran uang. Gagasan memperbanyak jumlah uang yang tersedia merupakan kebalikan dari gagasan memperoleh nafkah yang menguasai semua sistem prakapitalis, terutama ekonomi kerajinan tangan feodal. Sekalipun perolehan merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi, namun sikap yang ditunjukkan dalam proses perolehan membentuk isi gagasan persaingan, sikap yang secara logika terkandung dalam perolehan ini dapat dilukiskan sebagai kebebasan perolehan dari luar.

Karena kebebasan dari peraturan, kapitalisme pada hakekatnya bersandar pada kesadaran individu akan kekuasaan laminya. Karena itu kegiatan ekonomi ini berhubungan erat dengan resiko pribadi, tetapi si pelaku ekonomi bebas untuk mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara apa saja yang dipilihnya, asal saja tidak melanggar hukum pidana.

Bila arah unsur ekonomi semata-mata berorientasikan pada perolehan, boleh tidak boleh harus diterapkan modal perilaku ekonomi yang tampaknya paling rasional, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang dimiliki. Demikianlah rasionalitas ekonomi menjadi gagasan ketiga yang mendominasi dalam sistem kapitalis.²⁷

Sebetulnya adalah sangat sukar menjabarkan ciri-ciri sebuah sistem ekonomi secara rinci. Meskipun demikian, pengenalan ciri-ciri secara garis besar dapat

²⁷M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Terj. Nastanjim, (Yogyakarta; Dana Bakhti Wakaf, 1997), h. 310-311.

dianggap perlu. Ciri-ciri tersebut adalah; (a) pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi, (b) perekonomian diatur menurut mekanisme pasar, dan (c) motif yang menggerakkan roda perekonomian adalah motif laba.

Pengakuan yang luas terhadap hak-hak produksi dapat dilihat dari kenyataan dimana pemilikan alat-alat produksi ada di tangan perorangan (swasta), dan tiap-tiap individu bebas memilih pekerjaan yang dipandang terbaik bagi diri mereka masing-masing, dengan asumsi tiap orang tahu apa yang terbaik bagi dirinya, kebebasan ini merupakan syarat mutlak bagi perekonomian kapitalis, sehingga sistem ini kadang-kadang juga disebut *sistem free enterprise free trade*.²⁸

Ciri selanjutnya dari sistem ekonomi kapitalisme adalah bahwa perekonomian diatur dan digerakkan oleh pasar, berdasarkan azas *Laissez Faire, Laissez Paser*.²⁹ Roda perekonomian digerakkan oleh interaksi secara bebas di pasar. Bagi konsumen tujuan yang ingin diraihinya adalah kepuasan maksimal, sedangkan dari pihak produsen tujuan utamanya adalah laba maksimum. Adapun fungsi pasar dalam perekonomian adalah memberi sinyal kepada produsen tentang barang-barang yang akan dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan kepada konsumen ia memberi sinyal barang-barang apa saja dan dalam jumlah berapa tiap barang dibeli di pasar.

²⁸Deliannov, *Op-cit*, h. 48.

²⁹Istilah *Laissez-Faire* Doktrin agar pemerintah melakukan campur tangan seminimal mungkin dalam perekonomian).

Sinyal-sinyal tersebut, baik kepada produsen maupun kepada konsumen diberikan lewat harga-harga di pasar. Pasar akan mengatur kedua tujuan yang berbeda tersebut sedemikian rupa lewat suatu tangan tak kentara, sehingga tercapai keseimbangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan kunci berlangsungnya mekanisme pasar yang menguntungkan semua pihak ini adalah adanya kebebasan dalam proses ekonomi. Dengan adanya kebebasan setiap orang melakukan yang terbaik bagi dirinya maka proses ekonomi akan berjalan wajar, dalam hal ini konsumen akan dapat memperoleh barang dalam jumlah cukup dengan harga murah, dan sebaliknya produsen akan memperoleh keuntungan wajar pula.³⁰

Ciri berikutnya dari sistem kapitalisme adalah bahwa roda perekonomian didorong oleh motif ekonomi demi kepentingan pribadi. Dalam hal ini manusia diakui sebagai makhluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. paham seperti ini sering disebut paham individu (individualism). Perlu dicatat bahwa paham individualisme tidak sama dengan paham egoisme yang cenderung mempunyai makna sangat sempit, keduanya memang sama-sama mementingkan diri sendiri, tetapi implikasi kedua paham tersebut sangat berbeda dalam perhatian terhadap orang-orang atau kelompok masyarakat lain.

Kalau dalam egoisme seseorang mementingkan diri sendiri tampak memperhatikan kepentingan orang lain, dalam individualisme seseorang mementingkan diri sendiri juga memperhatikan terhadap orang lain. Mementingkan

³⁰Deliannov, *Op-cit*, h. 49.

urusan pribadi dalam paham individualisme tidak harus menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap kepentingan orang lain. Sebagaimana J.S. Mill salah seorang pakar klasik yang berjasa membuat ilmu ekonomi yang kaku dan dingin menjadi lebih manusiawi; orang bisa saja bersaing di sektor produksi dan bersifat sosial dalam distribusi pendapatan.

Sistem kapitalisme oleh para pendukungnya sangat disukai karena memiliki beberapa kelebihan. Yang jelas organisasi masyarakat yang diatur oleh pasar berdasarkan persaingan sempurna dianggap lebih efisien, baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya (dimana sumber daya dimanfaatkan secara optimum) maupun dalam pendistribusian barang-barang. Sistem ini dianggap paling mampu memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi semua pihak dalam masyarakat. Lebih jelas, dengan sistem ini para konsumen bisa memperoleh barang-barang dan jasa dalam jumlah cukup dengan harga relatif lebih murah, sedang di pihak lain para produsen yang hanya memperoleh laba wajar (normal profit) tetapi bisa melanjutkan usahanya. Begitu juga karena hak milik perorangan diakui, dan ada kebebasan melakukan segala sesuatu yang dianggap terbaik bagi kepentingan pribadi, maka kreatifitas masyarakat menjadi tinggi, dan sistem ini juga lebih mampu dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi lewat pengawasan sosial dan politik yang minimal, dibanding sistem-sistem lain yang pengawasan sosial dan politiknya memerlukan tenaga.

2. Sistem Ekonomi Sosialis

Diantara sekian banyak pakar sosialis³¹ pandangan Karl Heindrich Marx³² dianggap paling berpengaruh. Dari segi teoritis, banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya di dasarkan atas pandangan ekonomi saja, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah dan sebagainya.

Suatu hal yang agak istimewa dari teori Marx, hampir seluruh pandangannya diliputi oleh konflik. Ajaran Marx yang penuh dengan konflik ini boleh jadi sangat dipengaruhi oleh kehidupan pribadi Marx sendiri yang boleh dikatakan penuh dengan pertentangan. Perkenalannya dengan Joseph Proudhon, mempunyai pengaruh tersendiri terhadap pemikiran Marx. Proudhon adalah penganut sosial yang sangat membenci kapitalis, hal ini dapat dilihat dalam salah satu tulisannya, ia menanyakan “apa yang dimaksud dengan kekayaan? Yang dijawab sendiri dengan : “Kekayaan itu hasil curian!” dan kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan yang dimiliki oleh kaum kapitalis yang pada hakikatnya merupakan hasil rampokan dari kaum buruh yaitu dengan menggaji mereka dari tingkat upah yang sangat rendah”.³³

Jika diperhatikan, pemikiran-pemikiran Karl Marx hanyalah usaha untuk menjelaskan keburukan-keburukan sistem liberal kapitalis, demikian pula gagasan-gagasan Karl Marx banyak yang tidak orisinal, seperti gagasannya tentang perjuangan

³¹Winardi, *Op-cit*, h. 63.

³²Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, (Jakarta; Gramedia, 1999), h. 53 & 55.

³³Deliannov, *Op-cit*, h. 70

kelas berasal dari Comte de Saint Simon dan Guizot; ramalannya tentang krisis ekonomi kaum kapitalis dari Sismon, ramalan akan tumbuhnya kelas proletariat dari Moses dan Babeuf; teori nilai lebih dan eksplitasi dari Fourier, Bray, Thompson dan Hodge Kinsion, sedang gagasannya tentang pemilikan alat-alat produksi oleh masyarakat dari Proudhon.

Meskipun Karl Marx memiliki kelebihan-kelebihan, namun tak sedikit pula kelemahan-kelemahan yang nantinya merupakan faktor yang membawanya menuju kegagalan dan kehancuran.

Konsep prinsip dalam analisis Marx adalah alienasi atau ketersaingan yang timbul dalam suatu masyarakat kapitalis sebagai akibat dari eksploitasi kaum proletar oleh kaum borjuis. Kaum proletar adalah para pekerja industri yang kurang mempunyai sarana produksi sendiri dan sebab itu menjadi subjek perbudakan gaji, menjual tenaga untuk hidup. Kaum borjuis adalah para kapitalis, pemilik sarana produksi, sementara seluruh nilai produksi datang dari kaum proletar, mereka hanya memperoleh pendapatan kecil untuk menyambung hidup, gaji yang mereka peroleh hanya cukup untuk menyambung hidupnya sendiri. Saldonya (nilai surplus) diambil oleh kaum borjuis, yang sebab itu menjadi semakin kuat dan membuat kaum proletar tetap menjadi buruh untuk selamanya. Ini “merendahkan” dan tidak “memanusiakan” mereka dan mereduksi mereka menjadi “fragmen umat manusia (alienasi). Mereka tidak mampu mengembangkan potensi mereka secara penuh. Eksploitasinya menyebabkan terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas yang bertentangan dan meletakkan lahan perjuangan kelas yang membentuk sejarah manusia dan merupakan

inti dari proses sejarah. Mereka tidak bebas ; mereka adalah budak-budak di atas papan catur sejarah. Nasib mereka ditentukan oleh konflik tak terhindarkan dari kepentingan ekonomi dalam kelas-kelas yang beragam dalam masyarakat manusia (determinisme ekonomi).³⁴

Satu-satunya cara Marxis untuk mengakhiri alienasi adalah menghapuskan kepemilikan pribadi sebagai penyebab utamanya. Ini akan mengakhiri hal-hal sosial yang istimewa dari kaum borjuis dan juga menghancurkan kekuatan politik dan eksploitatif mereka. Sarana paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah sebuah revolusi oleh kaum proletar untuk menghancurkan sistem kapitalis dengan paksa tanpa melalui jalan 'utopia sosial' dan 'gradualisme'.

Marxis memberikan kepada mereka kekuatan ekonomi politik, meningkatkan kondisi kehidupan dan kerja mereka, dan menghapuskan konflik kelas. Tapi ternyata strategi Marxis mengandung cacat sebab ia hanya mampu menghapuskan kelas borjuis, pemilikan seluruh sarana produksi oleh negara, dan perencanaan pusat. Ia tidak mampu menunjukkan bagaimana strategi ini dapat menghapuskan perbudakan gaji dan eksplotasi.

Apakah jaminannya bahwa kaum proletar yang telah melakukan pembunuhan dan mengambil alih serta menduduki posisi kaum boerjuis demi pembebasan kelas nantinya tidak akan menjadi penghisap. Haruslah dipahami bahwa negara totaliter tidaklah diperintah oleh semua anggota kelas proletar. Akan tetapi kekuasaan itu

³⁴M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terj. Nur Hadi Ishsan & Rifqi Anwar, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), h. 77

hanya ditangani oleh segelintir orang yang seluruh keputusan akan terdesentralisasi dari segelintir orang tersebut. Mereka bukanlah malaikat yang lepas dari keinginan untuk berkuasa dan mengeksploitasi. Apakah ada jaminan bahwa kediktatoran kaum proletar tidak akan menghancurkan revolusi Marxis?

Jika alienasi hanyalah disebabkan oleh kepemilikan pribadi, maka seseorang dapat menerima pandangan Marxis bahwa penyelesaiannya terletak pada penghapusan kepemilikan pribadi. Bagaimanapun kepemilikan pribadi hanyalah salah satu dari sumber-sumber kekuatan dalam masyarakat manusia. Ada sumber-sumber kekuasaan yang lain semisal keberanian fisik, kemampuan mental, pendidikan, kreativitas, ambisi dan kerja keras, hubungan keluarga, dan kedudukan kepemimpinan dalam masyarakat.

Marx dalam membangun strateginya, meletakkan asumsi-asumsi yang keliru sehingga tujuan-tujuan yang ingin di capai malah merupakan sebuah bumerang yang menghancurkan mereka.

Asumsi-asumsi Marxis tersebut adalah :

1. Analisa Marxis mengimplikasikan suatu ketidakpercayaan total pada kemampuan manusia untuk mengelola kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan kesejahteraan sosial. Ia secara diam-diam mengasumsikan bahwa setelah pengenalan sosialisme, manusia yang sama dalam kapasitasnya sebagai konsumen, pekerja, manager perusahaan, dan pegawai pemerintah, akan selalu di dorong untuk melakukan yang terbaik dalam rangka kebaikan sosial tanpa memperhatikan kepentingan pribadinya. Ini mengimplikasikan bahwa : (a) para pekerja harus bekerja

dengan efisien, jujur dan tidak mementingkan diri sendiri tanpa insentif dalam proporsi imbalan materi; (b) para manager perusahaan harus bekerja dengan efisien tanpa dapat mempergunakan bagi kepentingan pribadinya sendiri, tanpa mengalami tekanan persaingan dan tanpa memiliki kemampuan untuk mengambil keputusannya sendiri dan untuk membeli serta menjual input dan output yang mereka anggap baik; (c) para pegawai pemerintah tidak akan mengambil manfaat yang tidak semestinya dari perbuatan keputusan yang banyak dan kekuatan eksekutif mereka. Ini mengimplikasikan bahwa sebagai imbalan dari semua ini mereka dalam kapasitas sebagai konsumen, membatasi klain mereka atas sumber daya hanya sebatas apa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk menghindari tekanan berlebihan atas sumber daya.

Asumsi-asumsi ini benar-benar sangat tidak realistis. Dalam sistem sekuler yang tidak adanya konsep tanggung jawab dihadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui dan hanya mengakui batasan tentang dunia ini, adalah tidak masuk akal mengharapkan individu untuk dapat mengabaikan kepentingan kekayaan pribadinya, tidak ada alasan rasional untuk mempercayainya baha dalam sebuah masyarakat sosial, sebagaimana dalam sebuah masyarakat kapitalis, para individu tidak akan memberikan prioritas untuk memenuhi kepentingan pribadinya, dimana dasar spiritual kehidupan tidak ada, terutama pada pemaksimalan pendapatan mereka maupun pemuasan keinginan-keinginan materi dan hawa nafsunya.

2. Diasumsikan bahwa mesin kekuasaan negara akan dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya. Selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat dan

dalam diri mereka sendiri tidak ada alasan yang khusus untuk mengerjakannya. Asumsi itu juga tidak benar, bahkan suatu negara totaliter tidak dapat lepas dari pluralitas kepentingan dan hak-hak istimewa yang timbul dari faktor-faktor semisal kedudukan dalam struktur kekuasaan, bangsa dan kawasan geografis. Dalam ketiadaan orientasi moral, tidak ada mekanisme yang dapat menciptakan suatu keharmonisan kepentingan. Bahkan dalam suatu percanaan ekonomi terpusat, alokasi yang sesuai dengan tujuan-tujuan sosial menurut pengambilan pertimbangan-pertimbangan nilai keberhasilan disamping ekspresi pilihan konsumen. Para perencana haruslah memiliki suatu dasar untuk menentukan tujuan-tujuan yang perlu mereka capai dan nilai-nilai yang harus mereka patuhi, tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang memenuhi kepentingan semua individu dan bukan kepentingan suatu kelompok tertentu.

Siapa yang akan memberikan tujuan-tujuan dan nilai-nilai ini? Karena sosialisme sama sekulernya dengan kapitalisme, maka perencana-perencana tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sekelompok orang-orang jika para perencana itu adalah manusia dengan segenap wataknya; maka preferensi-preferensi dan kepentingan mereka sendiri akan cenderung merajalela dalam suatu sistem yang tidak dibimbing oleh seprangkat tujuan-tujuan yang didefinisikan dengan jelas dan nilai-nilai yang diberikan oleh petunjuk Tuhan.

Kekuasaan yang sangat besar semacam itu tidak dapat tidak menyebabkan birokrasi diktator dan tidak fleksibel yang berkepentingan mempertahankan

kekuasaan dan keuntungan sendiri serta melupakan kesejahteraan masa. Ia juga menyebabkan perebutan kekuasaan yang kejam.

Demikianlah Marxis menawarkan gagasan sebagai langkah reformasi ternyata lebih mengundang tawa dari pada mengundang simpati. Bahkan mereka diklaim sebagai yang bertanggung jawab atas mundurnya perekonomian karena telah membunuh gairah untuk berkompetensi akibat mengabaikan pasar Negara- negara penganut sosialisme harus tetap menjadi penonton setia terhadap keberhasilan negara- negara yang tidak menganut sosialisme yang semakin maju dan berkembang pesat.

Kecaman yang paling keras terhadap sistem sosialis adalah kenyataan tidak adanya (dan kalau ada, sangat kecil) kebebasan bagi tiap negara memilih pekerjaan yang di sukainya. Padahal umumnya orang sekarang percaya kebebasan dalam memilih pekerjaan yang disukai ini merupakan hal yang paling terpenting yang menentukan produktifitas para pekerja, tanpa adanya kebebasan maka keaktifitas masyarakat yang akan terhambat, dan konsekwensinya produksi dan sekaligus perekonomian akan mandek. Manusia bekerja akan lebih baik jika diberi kebebasan dari pada didikse terus menerus kalau dalam sistem kapitalis, buruh itu setidaknya tidaknya bebasan untuk memilih pekerjaan, yang dalam sistem sosialis ia tidak bisa melakukan yang demikian dan tidak bisa lepas dari perseroan serta tidak menikmati kebebasan, semuanya tergantung pada pemimpin saat itu. Marx mungkin lupa bahwa bagaimanapun juga kalau seseorang sudah berkuasa akan cenderung mengeksploitasi dan berbuat semena –mena, sama halnya yang berkuasa itu berasal dari kaum borjuis maupun proletar.

Seorang pekerja dalam sistem, sosialis sangat tergantung pada pemimpin. Jika berbaik hati, pekerja mungkin beruntung; sekalipun ia cakap, dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan teliti, ia tidak akan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Begitu pula, kalau pimpinannya jahat, maka segala kerugian akan menimpanya. Dengan demikian sistem sosialis bahkan lebih jauh kejam dan lebih lalim dari pada Kapitalis.

Kelemahan lain, ialah kurangnya insentif untuk bekerja lebih baik dalam sistem sosialisme, karena hak milik pribadi tidak diakui, motif bekerja lebih baik dan meningkatkan produksi sangat rendah, setiap orang akan bertanya, untuk apa bekerja lebih rajin, giat, dan mencapai hasil serta prestasi yang lebih tinggi, kalau hasil atau imbalan yang diperoleh sama saja dengan bekerja seadanya.

3. Sistem ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah perangkat nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi Islam. Perangkat nilai-nilai sistem ekonomi Islam yang menurut Monzer Kahf, merupakan komponen yang menyusun eksistensi suatu sistem ekonomi Islam yaitu; filsafat, nilai dasar, dan nilai instrumental ekonomi.

Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar yang dibangun menurut suatu doktrin kehidupan hubungan antara manusia, alam dan Tuhan, sebagai pedoman nilai-nilai dan pandangan tentang kegiatan ekonomi. Bertolak dari filsafat sistem ekonomi dapat diturunkan nilai-nilai dasar yang akan membangun kerangka sosial, legal dan tingkah laku dari sistem, dan kemudian diturunkan nilai-nilai instrumental

sebagai perangkat peraturan permainan yang akan menjamin pelaksanaannya atau mengerakan sistem itu bekerja.³⁵

Memandang sistem ekonomi yang ada di dunia ini lewat kaca mata landasan filosofis, kita hendaknya kembali pada konsep triangle yaitu filsafat Tuhan terletak di sudut puncak. Pemahaman yang keliru terhadap sistem ekonomi mengakibatkan penjungkir balikan konsep triangle dan akhirnya mengeksploitasi nilai-nilai dasar maupun instrumental yang lalu membawa manusia kepada pendewaan dirinya sendiri, sehingga memasuki wilayah ekonomi sekuler dengan menggeser eksistensi Tuhan, seperti yang terjadi pada sistem ekonomi liberal-kapitalis. Atau tidak lagi menggeser eksistensi Tuhan bahkan menghilangkan eksistensi Tuhan seperti yang dianut oleh sistem ekonomi Marxis-sosialis.

Kenyataan menunjukkan bahwa filsafat ekonomi kapitalis dan Sosialis telah membawa manusia bertindak memperbudak manusia lain, kekayaan alam, dan bahkan Tuhan juga dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan diri sendiri. akibatnya adalah proses dekadensi nilai antara manusia dan Tuhan, dehumanisasi antara manusia dan manusia, dan disharmoni antara manusia dan alam.³⁶

Dalam sistem ekonomi Islam, eksistensi Tuhan berada pada posisi puncak. Dimana segala sesuatunya di kembalikan kepadanya. Segala sesuatunya berdasarkan

³⁵ AM. Sefuddin, *-Solusi Islam atas Problematika Ummat*, (Jakarta; Gema Insani, 1998), h. 34.

³⁶ *Ibid*, h. 35.

ketuhanan, yaitu sistem yang bertitik tolak dari Allah SWT, bertujuan akhir kepada Allah SWT dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah SWT.³⁷ Inilah yang dalam Islam kita kenal dengan istilah tauhid.

Interpretasi tauhid sebagai landasan filosofis sistem ekonomi Islam ini, dijabarkan Monzer Kahf sebagai berikut:

1. Dunia ini termasuk isinya merupakan milik Allah SWT.³⁸ Manusia sebagai Kholifah Nya hanya mempunyai hak untuk khilafat yang tidak absolut. Pengakuan pemilikan individual yang tidak terbatas adalah sebuah pengingkaran kepada kekuasaan Allah SWT sebagaimana yang dianut oleh sistem ekonomi Kapitalis.³⁹
2. Allah SWT itu Esa, pencipta segala mahluk dan semua yang diciptakannya tunduk kepadanya. Salah satu mahluk ciptaannya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Semua manusia sama dihadapan Allah SWT tidak berkelas-kelas, yang membedakan hanyalah level ketakwaannya. Implikasinya dari persamaan ini agar diantara mereka terjalin kebersamaan serta persaudaraan, saling membantu dan bekerja sama dalam kegiatan ekonomi.

³⁷Yusuf al- Qardhawiy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31.

³⁸Mujamma' Khadim al haramain, *Op-cit*, h

³⁹Monzer Kahf, *Op-cit*, h. 52.

3. Iman pada hari akhirat. Faktor ini sangat penting dan berpengaruh pada perilaku ekonomi seseorang, karena muslim yang akan mengadakan aktivitas ekonomi, ia akan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh aktivitasnya tersebut. Dengan kata lain, bahwa keyakinan adanya hari pembalasan dari setiap tingkah laku di dunia termasuk aktivitas ekonomi, maka ia akan senantiasa berhati-hati dalam berbuat, karena takut akan siksaan Allah SWT jikalau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ajaran Allah SWT.⁴⁰

Perangkat kedua sistem ekonomi Islam adalah perangkat nilai dasar, yaitu implikasi dan asas filsafat sistem yang dijadikan sebagai kerangka konstruksi sosial dan tingkah laku sistem. Perangkat tersebut terdiri dari keseimbangan (at Tawazun) keadilan (al 'Adalah), kepemilikan (al Milkiyah).

a). Keseimbangan (at Tawazun)

Keseimbangan sudah dijelaskan pada bab terdahulu mengenai aspek-spek dalam prinsip sistem ekonomi, prinsip keseimbangan ini sering ditemukan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari seperti bertindak proporsional, tidak boros serta tidak bakhil, hingga dalam bersedekah pun Islam menganjurkan untuk bersikap proporsional. Prinsip proporsional ini dapat berbentuk pengonsumsi barang yang tidak lebih dari kebutuhan sehingga jauh dari sikap berlebih-lebihan dalam melampaui batas. Prinsip proporsional ini juga dapat tersermin dalam perilaku

⁴⁰ *Ibid*, h. 53.

ekonomi yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan publik sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara yang satu dan yang lainnya sebagai embrio munculnya ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat.⁴¹

b). Keadilan (al 'Adalah)

Perangkat nilai dasar yang satu ini mendapat perhatian besar dari Allah SWT, sebagaimana termakub dalam al-Qur'an, tidak kurang dari seribu ungkapan yang berbeda-beda dalam Al-Qur'an yang memuat gagasan tentang keadilan, baik langsung dengan menggunakan kata-kata 'adl, qisth, mizan atau dalam berbagai ungkapan tidak langsung lainnya. Disamping itu ada dua ratus peringatan dalam AL-Qur'an yang menentang ketidakadilan yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata semisal zulm, Hsm, dhalal dan lain-lain. Semua itu merupakan wujud dari ketegasan Islam dalam membasmi semua jejak kezaliman dari masyarakat manusia, kezaliman adalah sebuah istilah yang menyeluruh menyangkut semua bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkaran, dimana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban kepada mereka.⁴² Yang menurut Sayyid Qutbh bahwa keadilan adalah menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menurut pandangan Islam, dan pengertian ini tidaklah diinterpretasikan secara sempit seperti yang ada dalam komunisme bahwa keadilan adalah persamaan imbalan

⁴¹ *Ibid*, h. 55.

⁴² M. Umar Chapra, *Op-cit*, h. 229.

tanpa perbedaan sedikitpun dalam segi-segi ekonomis, sekalipun ia harus berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu.⁴³ Akan tetapi Islam sangat menghormati perbedaan kemampuan sehingga memberikan imbalan sesuai dengan kemampuan.

Ada tiga hal yang menjadi asas terjadinya keadilan sosial yaitu; kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Kebebasan jiwa untuk menyalurkan naluri dan kecendrungan akan memberikan implikasi kebebasan jiwa yang senantiasa mengharu biru. Hanya Islam membingkai kebebasan tersebut dengan sejumlah pranata masalah sehingga tidak menimbulkan dampak kerugian baik jiwa maupun harta bagi diri dan masyarakat sekitarnya.⁴⁴ Dengan demikian Islam tidak memasung kecendrungan tersebut, sehingga ruang gerak untuk menyalurkannya tetap ada. Tidak seorang pun, bahkan tidak pula negara mempunyai hak untuk menghapuskan kebebasan jiwa ini dan menjadikan manusia hidup dalam perbudakan atau pengawasan. Ajaran inilah yang mendorong Umar, khalifah kedua bertanya, sejak kapan engkau memperbudak manusia, paahal mereka dilahirkan oleh ibu mereka sebagai pribadi yang merdeka.⁴⁵

Azas keadilan sosial selanjutnya adalah persamaan kemanusiaan yang sempurna. Islam memerangi segala bentuk diskriminasi beserta sebab musababnya. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW SAW senantiasa

⁴³Sayyid Quthub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Afif Muhammad, (Bandung, Pustaka, 1994), cet. II, h. 37.

⁴⁴*Ibid*, h. 43.

⁴⁵M. Umar Chapra, *Op-cit*, h. 228.

diperingatkan oleh Al-Qur'an bahwasannya ia hanyalah seorang manusia biasa, sama seperti halnya dengan manusia lain.⁴⁶ Dan memperingatkan sahabat-sahabatnya agar tidak menjadikannya sebagai kultus individu akibat kecintaannya yang mendalam pada dirinya. Ia bersabda : "Janganlah kalian bersikap kepadaku seperti sikap orang-orang nasrani kepada Isa putra Maryam, Aku tidaklah lain adalah hambaanya semata, maka sebut sajalah aku 'Abdullah (Hamba Allah SWT) dan rasul-Nya."⁴⁷ Dengan demikian prinsip persamaan kemanusiaan ini akan menepis penghambaan individu terhadap individu yang lain, sehingga realisasi keadilan sosial tidak sulit ditemukan.

Asas ketiga menuju penegakan keadilan sosial adalah jaminan sosial kuat. Islam tidak mengeluarkan suatu peraturan tanpa adanya imbalan (reward) atau balasan (punishment). Orang-orang yang berbuat baik dan menunaikan perintah Allah maka jaminan kebaikan dari Allah pun tak terlupakan. Demikian pula segala bentuk penyimpangan hukum baik pidana maupun perdata, juga sudah tersedia balasan yang proporsional, sehingga realisasi peraturan tidaklah merupakan konsep teoritis an sich tanpa jaminan kebaikan atau keburukan. Inilah salah satu asas penggerak keadilan sosial dalam masyarakat.⁴⁸

Demikian pentingnya keadilan sosial, sehingga Ibnu Taimiyyah tidak segan-segan mengatakan bahwa; "Tuhan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir,

⁴⁶Mujamma' Khadim al haramain, *Op-cit*, h

⁴⁷Myttafaq Alaih.

⁴⁸Sayyid Quthub, *Op-cit*, h. 79.

tetapi tidak menegakkan negeri yang tidak adil sekalipun beriman". Dari Dunia dapat selamat dengan keadilan dan kekafiran, tetapi tidak dengan ketidak adilan dan Islam.⁴⁹

c). Pemilikan (al Milkiyah)

Masalah pemilikan termasuk pembahasan yang sangat signifikan dalam ekonomi Islam dan ketiga dasar ekonomi Islam ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisahkan karena merupakan pangkal tolak untuk mengungkap nilai-nilai instrumental ekonomi. Mouzer kahf mengungkapkan lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tujuan hukum ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yakni zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peranan negara.⁵⁰

Dewasa ini para ekonomi kontemporer mulai menyadari akan pentingnya kandungan nilai-nilai religius, bermoral dan humanis pada sistem ekonomi yang mereka anut. Mereka sadar, bahwa sistem yang ada tidak akan mampu menjamin nilai-nilai kebenaran (logica), kebaikan (ethica) dan keindahan (aesthetica). Ekonomi yang dapat membebaskan diri dari penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan dan segala bentuk keterbelakangan serta dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi.⁵¹

⁴⁹M. Umar Chapra, *Op-cit*, h. 230.

⁵⁰*Ibid*, h. 56-60.

⁵¹AM. Saefuddin, *Op-cit*, h. 30.

Sedangkan sistem ekonomi Islam, lahir dari pemikiran agama yang sarat dengan karakter religius memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem ekonomi yang ada. Hal ini disebabkan oleh kesempurnaan aturan-aturan melalui penjabaran konsep muamalah dalam Islam. Karena ilmu ekonomi bagian dari ilmu agama Islam, maka landasan pijaknya juga tidak lepas dari suprasistemnya yaitu Islam yang dapat digali dari Al-Qur'an dan Al-Hadits serta sumber hukum Islam lainnya.

Adapun landasan pokok Islam yang telah disepakati oleh ulama ialah meliputi; Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma; dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah salah satu landasan pokok Islam yang disepakati oleh jumbuh ulama, kemudian selanjutnya Hadits Nabi Muhammad SAW SAW.⁵² Pandangan Islam dengan segala aspeknya bertumpu dan berpegang pada petunjuk Al-Qur'an, baik dalam hal yang berkaitan dengan Aqidah, Akhlak dan Syari'ah.

Dengan Al-Qur'an. Sistem ekonomi Islam mengungguli sistem kapitalis yang sungguh jauh dari kepuasan hati nurani. Karena al-Qur'an tidak saja memfokuskan petunjuknya pada permasalahan ruhaniah (hubungan vertikal ilahiyah) tapi juga secara seimbang, al-Qur'an serius memberikan petunjuk pada permasalahan amaliah kehidupan sehari-hari (hubungan horisontal sosial). Al-Qur'an sebagai acuan perilaku manusia yang mengandung pedoman-pedoman

⁵²Wahab Az-Zuhailly, *Ushul al Fiqh al Islami*, (Damaskus; Dar al Fikr, 1986), Jilid I, h. 417.

aktivitas, tidaklah berarti bahwa Al-Qur'an menyajikan aturan-aturan main bertindak tersebut secara detail, sebab dengan memfokuskan al-Qur'an pada persoalan yang mendetail akan mengurangi nilai kedinamisannya dalam mensikapi persoalan-persoalan sepanjang zaman, dan memungkinkan munculnya kasus pengabaian hukum dari al-Qur'an, karena dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Sebaliknya universalitas, generalitas, dan globalitas al-Qur'an menjadikan al-Qur'an luwes dalam setiap ruang dan waktu, selain itu segala bentuk ke arah kekakuan intelektual dapat dihindarkan, bahkan ia akan lebih membangkitkan semangat berfikir dan membuka semua cara yang akan di tempuh bagi perluasan pengetahuan.⁵³

Kandungan-kandungan praktis al-Qur'an hanya menempati bagian kecil dari keseluruhan naskahnya, karena al-Qur'an bukanlah dokumen hukum atau dokumen konstitusional,⁵⁴ dari keseluruhan naskah, kurang dari sepersepuluh yang berhubungan dengan hukum dan yurisprudensi, sementara sistemnya sebagian besar berkenaan dengan masalah-masalah keyakinan dan moralitas rukun agama dan aneka ragam tema lainnya. Gagasan-gagasan tentang keadilan ekonomi dan sosial, termasuk pula kandungan-kandungan hukumnya, secara keseluruhan merupakan bagian dari seruan religiusnya.⁵⁵

⁵³Dikutip oleh Wahab Az-Zuhaili dari Kitab Ushul Fiqh Karya Zaky al Din Sya'ban Azzuhaili, *Op-cit*, h. 417.

⁵⁴Fazlur Rahman, *Cita-cita Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000), h. 61.

⁵⁵Muhammad Hasliih Kawali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Terj. Noerhadi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), h. 24.

Sebagaimana pendapat mengatakan bahwa hanya sekitar 70 hingga 80 ayat yang menyajikan persoalan-persoalan ekonomi. Namun hal ini tidaklah menjadi sebuah rujukan pasti, karena sebagian fuqaha lainnya membuat perhitungan lain, hal ini dikarenakan oleh perbedaan pendekatan seseorang terhadap kandungan al-Qur'an.

Dengan demikian pedoman meningkatkan laba dalam suatu perusahaan umpamanya, tidak akan mungkin didapat secara jelas dan teknis dalam al-Qur'an tetapi secara general dapat diturunkan melalui pesan-pesan prinsipil dari ayat-ayat yang ada hubungannya dengan hal itu.

Persoalan ekonomi adalah persoalan praktis-aplikatif berarti merupakan bagian mu'amalat. Karena itu aplikasi boleh jadi bervariasi dari zaman ke zaman sesuai dengan perubahan kebutuhan manusia. Ternyata hal ini sudah diantisipasi oleh al-Qur'an dengan menyajikan konsep-konsep tertentu berupa nash-nash yang disatu sisi bersifat *qathi* (yang definitif) dan di sisi lain bersifat *dzanni* (yang spekulatif). Nash *qathi* adalah nash yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak membuka penafsiran lain. Penunjukan nash ini umumnya berlaku dalam bidang aqidah, ibadah-ibadah pokok, warisan, kaffarat dan lain-lain. Validitas hukum-hukum ini tidak mungkin dibantah oleh siapa pun, setiap orang wajib mengikutinya dan ketentuan-ketentuan ini tidak membuka peluang ijtihad.

Sedangkan nash al-Qur'an yang bersifat *dzanni* (yang spekulatif) sebaiknya terbuka bagi penafsiran dan ijtihadi. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam al-Qur'an dan mencari

penjelasan yang diperlukan pada bagian lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda.

Ayat al-Qur'an yang bersifat *dzunni* inilah karena sifatnya yang interpretebel maka pada umumnya berlaku pada bidang mu'amalah dalam arti luas yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan masyarakat dan dalam aspek ekonomi dalam arti sempit. Karena kehidupan masyarakat itu senantiasa berkembang, maka penerapan hukumanpun senantiasa akan mengalami perubahan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Cukup banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang ekonomi baik secara sempit maupun secara luas. Namun pesan utama al-Qur'an dalam aktivitas ekonomi adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau melakukan interaksi keuangan diantara kamu secara bathil, kecuali dengan julan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."*⁵⁶

Dari ayat ini Abu Zahrah mengatakan bahwa ada dua dasar yang dijadikan prinsip dalam mu'amalah kehartaabendaan yaitu :⁵⁷

1. Melarang memakan makanan yang bathil. Kata "bathil" diartikan sebagai "segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama."⁵⁸

⁵⁶Al-Baqarah (2); 188

⁵⁷Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*

⁵⁸Muhammad Quraish Qhihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung; Mizan, 1998). Cet. VIII, h. 409.

2. Saling merelakan di antara kedua belah pihak.

Abu A'la al-Maududi memetakan prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur'an menjadi 21 bagian. Namun bila diadakan perampingan dengan menggabungkan prinsip-prinsip yang saling mendekati, maka hasilnya dapat disajikan menjadi beberapa bagian saja yaitu : (1) sumber daya alamiah, (2) Pemilikan harta, Sistem perolehan dan pemanfaatannya, (3) Zakat, infaq dan shadaqah berikut pendistribusiannya, (4) Warisan dan wasiat, (5). Pajak.⁵⁹

Prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur'an di atas dimaksudkan untuk menentang struktur sosial yang tidak adil sebagai mana yang secara umum melingkupi kota mekah yang waktu itu sebagai tempat asal mula Islam. dimana saat itu mekah menjadi pusat perdagangan internasional yang penting. Pada saat itu orang sudah mengenal berbagai bentuk perdagangan , bahkan sudah cakap dalam hal keuangan dan investasi sektornal. Dengan begitu, sehingga di dalam al-Qur'an kitapun menemukan metafora yang diambil dari bahasa dagang "*god is good at account*"⁶⁰ atau "*Orang-orang yang beriman adalah mereka yang untung dalam berdagang dan orang-orang ingkar adalah yang merugi. Mereka yang menjadikan kesesatan sebagai petunjuk berarti melakukan perdagangan yang merugi*".⁶¹

2. As-Sunnah

⁵⁹Abul A'la al-Maududi, *Esensi Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Muslim (Bandung; Mizan, 1997), cet. VIII, h. 69-81.

⁶⁰Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, terj. Imam Baehaqi. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999), h. 63

⁶¹Al-Baqarah (2); 16

Kata as-Sunnah⁶² secara harfiah bermakna jalan yang terang atau jalan yang ditempuh. Ia bisa berarti teladan yang baik atau bisa juga berarti contoh yang buruk.⁶³ Sedangkan as-Sunnah menurut terminologi fakar ushul adalah ucapan, perbuatan serta ketetapan-ketetapan nabi SAW.⁶⁴ Dengan demikian as-Sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga macam yaitu :

- (1). Sunnah *quliyah* (ucapan)-sunnah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan sunnah lainnya-yaitu apa yang diucapkan oleh Rasulullah tentang suatu masalah dalam berbagai konteks. Contoh : rasulullah SAW bersabda : *في السائمة زكاة (Ternak dikenakan zakat)*.
- (2). Sunnah *fi'liyah* (perbuatan) yaitu perbuatan-perbuatan dan petunjuk-petunjuk Nabi yang sesungguhnya, seperti cara beliau melakukan shalat, puasa, manasik haji, atau transaksi-transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.
- (3). Sunnah *taqririyah* (ketetapan/legitimasi) ialah semisal Nabi melihat suatu perbuatan atau mendengar suatu ucapan, lalu Nabi membenarkannya.

⁶²Di sini dipakai kata as-Sunnah bukan *al-Khabar*, *al-atsar* atau *al-hadis*. Karena kata khabar sama dengan kata hadis yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, atau sahabat atau selainnya berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* dan sifat. Adapun kata *atsar* dikhususkan pada hadis marfu' dan hadis maqruf. Az-Zuhaili, *Usul...*, h. 449.

⁶³Hal ini dibuktikan oleh hadis yang mengatakan : "*Barangsiapa yang membuat sebuah contoh yang baik من سنة حسنة -maka dia dan orang yang berbuat atas dasar contoh itu akan diganjar pahala pada hari kiamat ; dan barangsiapa yang membuat sebuah contoh yang tidak baik من سنة سيئة -maka dia dan orang yang mengikutinya akan menanggung dosanya sampai hari kiamat.*" *Isnawi, Nihayat as-Sul Syarah Minhaj al-Wusul ila al-Usul wa Syarah al-Badakhshi*, (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), h. 271.

⁶⁴*Ibid*, lihat juga Abu Zahra, *Usul...*, h. 97

As-Sunnah yang menurut kesepakatan ulama merupakan sumber syari'ah yang kedua setelah al-Qur'an. Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan kesaksian tentang otoritasnya sebagai rujukan hukum-meskipun dalam beberapa hal otensitasnya perlu dipastikan sehingga tidak terperangkap pada hadis palsu. Penyaksian al-Qur'an tersebut disinyalir, baik secara implisit maupun secara eksplisit lebih dari satu tempat. Penyaksian melalui ayat ini secara lengkap dikutip oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*.⁶⁵

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah".⁶⁶

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

"Ta'atilah Allah SWT dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)".⁶⁷

Mengembalikan putusan yang diperselisihkan kepada Rasul Allah berarti merujuk kepada al-Qur'an, dan mengembalikan kepada Rasul berarti menggunakan sunnah. Selin penyaksian al-Qur'an tadi, sejumlah hadis juga menopang alasan kehujjaahan as-Sunnah sebagai landasan pokok.

⁶⁵Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Ar-Risalah* (Beirut; Dar al-Fikr, tt), h. 79

⁶⁶Al-Hasyr (59) ; 7

⁶⁷An-Nisa' (4) ; 59.

As-Sunnah sebagai landasan pokok Islam kedua setelah al-Qur'an berfungsi sebagai penopang al-Qur'an dalam menjelaskan hukum-hukum Islam.⁶⁸ Bentuk penopang yang dimaksud dapat dirumuskan dapat dirumuskan kepada tiga hal sebagai berikut :

Pertama, As-Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat yang masih *Mubham*, merinci ayat-ayat yang *mujmat*, mentakhsis ayat-ayat al-Qur'an dan lain-lain.

Kedua, Sunnah menambah kewajiban-kewajiban syara' yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-Qur'an. Misalnya, as-Sunnah datang dengan membawa hukum-hukum tambahan yang menyempurnakan ketentuan-ketentuan pokok tersebut.

Ketiga, Sunnah membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya dalam al-Qur'an; tidak pula merupakan tambahan terhadap nash al-Qur'an.⁶⁹

3. Ijma' (Konsensus pendapat)

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan alternatif setinggi-tingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan As-Sunnah). Ia merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*'amaly*).⁷⁰ Para ulama sepakat, bahwa ijma' dapat dijadikan argumentaasi (hujjah) untuk

⁶⁸Hal ini terlepas dari polemik yang mengatakan apakah as-Sunnah sebagai landasan Syari'ah yang berdiri sendiri atau bukan.

⁶⁹Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh...*, h. 103-104.

⁷⁰*Ibid.*, h. 185.

menetapkan hukum-hukum syara', terlepas dari perbedaan pendapat mereka dalam menentukan siapakah ulama mujtahidin yang berhak menetapkan ijma'. Yang jelas ulama dari as-Sunnah. Dalam al-Qur'an dikatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman; Ta'atilah Allah SWT dan ta'atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu".⁷¹

Ayat ini secara eksplisit menekankan pada keharusan mentaati Allah SWT, Rasul dan Ulul Amri. Juga dikesankan bahwa ayat ini memberikan dukungan terhadap infalibilitas ijma'. Menurut Fakhru Razi, karena Allah SWT memerintahkan ketaatan pada ulul amri, maka keputusan ulul amri harus terlindung dari kesalahan, sebabnya Allah tidak mungkin memerintahkan ketatan kepada orang yang masih mungkin melakukan kesalahan.⁷² Kata "amr" dalam konteks ini adalah umum yaitu mencakup urusan-urusan dunia dan agama. Yang disebut pertama dipecahkan oleh umara' dan yang disebut kedua dipecahkan oleh ulama.

Selanjutnya banyak hadis yang menunjukkan kehujjahan ijma' diantaranya :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنَةً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَةٌ

"Yang dipandang oleh kamu muslimin baik, maka menurut pandangan Allah juga baik".⁷³

⁷¹An-Nisa' (4) : 59

⁷²Fakhr Ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabair wa Mafatih al-Gaib*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1995), h.

⁷³H.R. Ahmad bin Hambal

Di hadis lain dikatakan :

لا تجتمع أمتي على ضلالة

“Ummatku tidak akan sepakat atas perbuatan sesat”.⁷⁴

Kehujjahan ijma' yang dibuktikan oleh sebagian ulama dengan dalil-dalil di atas, tidaklah berarti bahwa seluruh ulama sepakat akan kehujjahannya. Namun perbedaan pendapat itu, penulis sengaja tidak menyajikannya, karena bukanlah tempatnya di sini, lagi pula ijma' ini telah disepakati oleh sebagian besar ulama (*muttafaq 'alaih*).

Jastifikasi dalil dalam memberikan peluang kepada ulama untuk melahirkan sebuah ijtihad dan ijma', bukanlah sebuah kebebasan berpendapat tanpa batas, namun secara bijaksana penyelesaian problem umat dengan ijma' ini haruslah sesuai dengan prosedur yang tepat untuk menjamin keotentikan hasil ijma' itu sendiri.

Contoh hukum hasil ijma' adalah legalitas praktek transaksi *mudharabah*⁷⁵ dalam Islam. dalil ijma' inilah sebagai dalil paling kuat yang dipakai sebagai pembolehan pelaksanaan transaksi *mudharabah*. Para sahabat r.a. sepakat

⁷⁴H.R. Tirmizi dan Umar r.a.

⁷⁵Kata Mudharabah secara harfiyah berasal dari *ضرب* yang merupakan timbangan dari Mufa'alah. Kata ini mempunyai arti mengadakan perjalanan secara umum di atas bumi (“*Apabila kamu mengadakan perjalanan di muka bumi ini*” : an-Nisa’ ; 101) dapat juga bermakna perjalanan di atas bumi untuk berniaga dan mencari rezeki Allah (“*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi ini mencari sebagian karunia Allah SWT*”: al-Muzamil ; 20). Adapun makna istilahnya, asy-syafi'iyah mendefinisikan : Pembayaran harta kepada pekerja untuk diperdagangkan sementara keuntungan untuk mereka berdua. Lebih jelas lihat: M. Abd Mun'im Abu Zaid, *Al-Mudharabah wa Tathbiqatiha al-'Amaliyyah fi al-Masarif al-Islamiyyah*, (Kairo; al-Ma'had al 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1996), hal. 21.

termasuk pula ummat sesudahnya akan kebolehan transaksi *mudarabah* tanpa ada yang menegasakan.⁷⁶ Dalil-dalil tersebut adalah :

1. Telah diperaktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam kisahnya yang masyhur atas kedua anaknya Abdullah dan Ubaidillah bersama Abu Musa al-Asy'ari ketika ia menjabat sebagai Amir di Bashrah.⁷⁷
2. Ali r.a. Berkata mengenai *mudharabah*. "sebuah penitipan harta dan keuntungan sesuai yang mereka sepakati atasnya".⁷⁸

Jelaslah bahwasanya kontrak *mudarabah* cukup terkenal dipraktekan dikalangan sahabat, ahl itu membuktikan legalitas *mudharabah* secara ujma'.

4. Qiyas (Deduksi Analogis)

Qiyas secara harfiyah bermakna mengukur atau memastikan panjang, berat atau kualitas sesuatu.⁷⁹ Jumhur ulama mendefinisikan qiyas sebagai penerapan ketentuan (*hukum*) kasus asal (*asl*) kepada kasus baru (*far*), dimana hukum tidak berkomentar karena berlakunya kasus (*'illat*) yang sama bagi keduanya.⁸⁰

Dasar hukum keempat yang disepakati oleh jumhur ulama ini hanya dibenarkan apabila jalan keluar dari kasus baru tidak ditemukan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, atau ijma' yang tergolong qat'i. Akan sia-sia untuk menggunakan qiyas apabila kasus yang baru dapat terjawab oleh ketentuan yang telah ada. Hanya dalam soal-soal yang belum terjawab oleh nuansa dan ijma' sajalah, hukum dapat

⁷⁶*Ibid*, h. 23

⁷⁷Malik, *al-Muwatta*, terj. Dwi Surya Atmaja (Jakarta; Raha Grafindo Persada, 1999), h. 328.

⁷⁸*Ibid*,

⁷⁹Faizuz Abasi, *al Qani al Muhit*, (Beirut ; dar al fikr, 1955), h. 572

⁸⁰Al-Amidi, *al-Ihkam...*, h. 3

dideduksi dari salah satu sumber ini melalui penerapan qiyas. Jadi pada dasarnya qiyas adalah merupakan perluasan dari hukum yang ada. Maka tidak mengherankan bila sebagian ahli hukum tidak mengakui sebagian proses pembentukan hukum baru.

Terlepas dari konflik di kalangan ahli fiqh antara yang mengatakan bahwa qiyas sebagai proses pembentukan hukum atau bukan yang jelas empat mazhab Sunni dan Syi'ah Zaydiah telah mengesahkan qiyas dan menutip berbagai ayat al-Qur'an untuk mendukung pendapat mereka. Oleh karena itu rujukan surat an-Nisa' (4:49) yang memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman :

...فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 "Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikalah kepada Allah SWT dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah SWT". (Q.S. An-Nisa, 59)⁸¹

pengesahan ahli hukum tersebut di atas banyaklah benarnya karena permasalahan yang semakin kompleks sekarang ini memicu pada munculnya beraneka ragam kasus yang sulit untuk didapatkan secara rinci dari al-Qur'an, maupun as-Sunnah. Yang ditemukan kadang-kadang hanyalah persamaan kasus ('illat) antara kasus baru dengan aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an. Dengan demikian metode qiyas adalah salah satu solusi dalam hal ini. Sebagai contoh adalah kasus dibolehkannya praktek mudharabah melalui hasil analogi antara

⁸¹M. Hasim Kamil, *Prinsip....*, h. 280

mudarabah dan musaqat.⁸² Kedua praktek kerja sama ini sama-sama memiliki kuasa (*'illat*) yang serupa. Dimana *musaqat* dibolehkan oleh syari'ah berdasarkan hadis yang ada. Dalam kasus *musaqat* itu sendiri, terjadi bila seorang pemilik pohon korma tidak sanggup dan tidak punya waktu untuk mengurusinya, dan disisi lain ada orang yang pintar mengurusinya pohon korma tetapi ia tidak memilikinya. Bentuk seperti ini juga ditemukan dalam qirad (*mudharabah*). Nah, kalau *musaqat* dibolehkan maka *mudharabah* juga dibolehkan berdasarkan analogi tersebut.

Demikian keempat acuan dasar Islam yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' dan Qiyas penulis sajikan. Pada pembahasan masing-masing acuan dasar tersebut tidaklah disajikan secara mendetail hingga pada persoalan-persoalan teknis, karena penulis yakin bukanlah tempatnya di sini untuk menyelami hingga pada segmen-segmen yang paling rinci. Penulis hanya ingin menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi yang merupakan segmen krusial dalam kehidupan mendapat perhatian yang cukup serius dari keempat acuan dasar Islam yang penulis telah sebutkan.

Islam yang landasan pokoknya yang empat tadi, memiliki kandungan pokok yang saling berkaitan karena merupakan suatu kesatuan integral yang tak terpisahkan. Kandungan pokok yang dimaksud adalah dimensi aqidah suatu segemen penting dalam Islam, karena merupakan kerangka utama yang harus kuat dan kokoh, karena kualitas qidah sangat mempengaruhi serta sangat mampu

⁸²*Musaqat* adalah penyerahan pohon seseorang kepada orang lain untuk disiramnya atau apa yang dibutuhkan oleh pohon itu, dimana ia mendapat sebagian hasilnya. Lihat: Muhammad Rawwas

mewarnai segmen berikutnya yaitu syari'ah dan akhlak.⁸³ Dimensi aqidah meliputi keyakinan penuh tentang adanya Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab yang pernah ia turunkan, Rasul-rasulnya dan keyakinan pada hari akhirat.

Selanjutnya, dimensi syari'ah⁸⁴ adalah dimensi yang kuantitasnya paling banyak dalam ajaran Islam. karena berhubungan dengan tingkah laku manusia sehari-hari. Ia tidak boleh dipisahkan dengan aqidah ataupun sebaliknya. Kekokohan keyakinan bykanlah sebuah jaminan seorang muslim tanpa realitas syari'ah. Hal ini dapat kita lihat dari tindakan khalifah Abu Bakar ketika ia ingin mengucapkan syahadat. Hal ini membuktikan bahwa realisasi syari'ah sangatlah penting dalam kehidupan islami.⁸⁵

Dimensi syari'ah terbagi menjadi dua bagian yaitu segmen ibadah (*'ibadah mahdah*) dan segmen mu'amalat (*'ibadah'ammah*). Wahbah az-Zuhaili dalam hal ini membagi unsur-unsur yang terdapat dalam dimensi mu'amalat menjadi tujuan bagian yaitu: (1) Dimensi hukum keluarga (*al-Ahwal Asy Syahsiyyah*), (2) hukum pidana, (3) hukum perdata, (4) Prosedural pidana dan perdata, (5) hukum konstitusional, (6) hukum hubungan internasional, dan (7) ekonomi.⁸⁶ Namun nampaknya dimensi yang diuraikan oleh az-Zuhaili ini, tidaklah cukup mewakili

Qal'atjy, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut; Dar an-Nafaism 1988), cet. II, h. 425

⁸³Ali Abdul Halim Mahmud, *Faham Usul al-Islam*, (Kairo; Dar at Tauzi wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1994.

⁸⁴Istilah syari'ah yang dimaksud di sini adalah pengertian secara sempit yaitu perbuatan manusia secara lahiriah.

⁸⁵Muhammad Qutub, *Haula tatbiq asy-Syari'ah*, (Kairo; Kaktabah as-Sunnah, 1412 H), h. 90

⁸⁶Az-Zuhaili, *Usul ...*, Jld. I, h. 438-439. Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1989), cet. III, Jld. I, h. 19-20.

karena bentuk interaksi antara manusia (muamalat) jumlahnya multi dimensi. Berkembang seiring dengan perubahan zaman. Yang jelas dari pembagian az-Zuhaili ini dapat difahami bahwa dimensi ekonomi termasuk dalam segmen mu'amalat.

Dimensi ketiga dari Islam adalah etika (akhlaq). Inilah salah satu segmen dimensi dalam Islam yang mengatur sisi-sisi kemuliaan (estetika). Hal inilah yang mengungguli sebagian sistem yang ada di dunia ini, dimana nilai-nilai (*value*) kadang-kadang terabaikan yang penting orientasi serta otoritas hukum tersebut tercapai sehingga simbol kemanusiaannya pupus oleh kepentingan yang bersifat semu.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem ekonomi adalah sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruhi oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu, yang terdiri atas perangkat nilai-nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan sumber daya material menurut kerangka referensi yang mempengaruhinya. Kalau kerangka referensinya Islam maka disebut sistem ekonomi Islam, demikian pula sistem ekonomi Kapitalisme dan sistem ekonomi Sosialisme.
2. Munculnya sistem ekonomi (kapitalisme dan sosialisme) ditengah masyarakat masing-masing dengan beberapa prinsip antara lain kepemilikan, konsumsi dan distribusi pendapatan, memiliki kelebihan dan kelemahan, namun kehadiran ekonomi Islam mempunyai nuansa tersendiri yang pada gilirannya diharapkan mampu menghapus ketidakadilan dan eksploitasi terhadap masyarakat. Dalam ekonomi Kapitalis cenderung tidak merata, sebab pertumbuhan dianggap sebagai tujuan yang terpenting yakni kemakmuran individu bukan kemakmuran masyarakat, demikian pula ekonomi Sosialis yang merupakan kebalikan dari ekonomi Kapitalisme, lebih memerlukan kepada kolektivisme sedangkan dalam ekonomi Islam dianggap sebagai

akibat, karena asumsi dasar dalam ekonomi Islam adalah harta milik Allah yang harus ditransformasikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

3. Implikasi signifikan dari beberapa prinsip yang diterangkan dalam ekonomi Kapitalis dan Sosialis ternyata banyak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, karena kepemilikan menjadi sebab utamanya dan pemahaman yang keliru terhadap konsep triangle yang pada akhirnya mengeksploitasi nilai-nilai dasar maupun instrumental yang membawa manusia pada pendewaan dirinya dan menghilangkan eksistensi Tuhan. Sedangkan dalam ekonomi Islam eksistensi Tuhan berada pada posisi puncak, dimana segala sesuatu dikembalikan kepadanya, yakni sistem yang bertitik tolak dari Allah swt, bertujuan akhir kepada Allah swt, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah swt, serta adanya penerapan prinsip amanah dalam diri setiap orang yang berarti adanya kesadaran bahwa pada dasarnya harta adalah milik Allah.

B. Saran

Dari uraian di atas, ditemukan berbagai hal yang perlu disempurnakan yang tercermin dalam saran-saran.

1. Para ilmuwan dan ekonomi Muslim menyadari bahwa hadirnya ekonomi Islam dibutuhkan, sebagai alternatif di tengah-tengah ketidakadilan ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme, sehingga masyarakat menjadi 'mengerti' dan

tidak apriori dengan keberadaan Bank Syari'ah dan perlu mensosialisasikan eksistensi ekonomi Islam sebagai sistem terbaik.

2. Dari realitas yang ada, ekonomi Islam sebagai sistem terbaik harus dapat dibuktikan secara empirik, sehingga eksistensinya diakui dan universalitas Islam sebagai agama dunia dibuktikan dengan menerapkan kebijakan yang ada dalam ekonomi Islam.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan umumnya dan dapat bermanfaat serta diimplementasikan secara komprehensif.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 113.
- Abdullah Zaky Al Kasf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2002)
- Abi Bakar As-Suyuthi., *Al-Jami' As Shghir*, (Beirut; Daar al-Fikr, tt) , jilid II
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Sy'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Daru al-fikr, t.t.) Jilid III
- Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi Asy Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo; Dar al Fikr al 'Arabi, 1996)
- Abul A'la al-Maududi, *Esensi Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Muslim (Bandung; Mizan, 1997), cet. VIII
- Adi Sasono, *Liberalisme Ekonomi Pemerintahan dan Kemiskinan*, (Ed Lukman Soetrisna dan Faraz, Yogyakarta, P3PK UGM dan Tiara Wacana, 1995)
- Adi Suandi Hamid, *Kurikulum dan Silabi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; LP3EI-UII, 1998)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid. I
- Ahli Minhaji, *Riba; Haruskah Islam Belajar Kepada Kristen*, (Journal of Islamic Economics, UII, Yogyakarta, 6 Mei 1999)
- Ahmad Amrullah, *Islamisasi Ekonomi; Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta; PLP2M, 1985)
- Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta; Rajawali Press, 1987)
- Ahmad Muhammad Al 'Assal dan Fathi Ahmad Abd Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*; (Kairo; CV. Pustaka Setia, 1419 H./1999 M)

- Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik; Upaya Membingkai Peradaban*, (Cirebon; Pustaka DINAMIKA, 1998).
- Al-Asal Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abd. Karim, *Sistem Prinsip dan tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Saefuddin, (Bandung; Pustaka Setia, 1999)
- 'Ali Haidar, *Durar al Hukum Syarh Majallah al Ahkam al 'Adliyyah*, (Beirut; Daar al Kutub al-Islamiyyah, tt)Ali Abdul Halim Mahmud, *Faham Usul al-Islam*, (Kairo; Dar at Tauzi wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1994
- Al-Qarafi, *Anwa'al Buruk fi Anwa'al furuq al Ahkam fi Tamyiz al Fatwa 'an al Alkam Az Zikr*, (Beirut; Alam al-Kitab, tt), III
- A.M. Sefuddin, *Solusi Islam atas Problematika Ummat*, (Jakarta; Gema Insani, 1998)
- _____, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta; Media Dakwah, 1984)
- Amin Mustafa Abdullah, *'Ushul al-Iqtisad al Islami wa Nazwiyyah at Tawazun al Iqtisad fi al Islam*, (Kairo; Isa al Babi al Halabi, 1984)
- Aminore Fanfani, *Catholicism, Peotestantism and Capitalism*, (Sheed and Ward, London; 1938)
- Anthony Brewer, *Kajian Kritis DAS Kapital Karl Marx*, (Jakarta; Teplok Press, 1999)
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, cet. III, 1996)
- Asghar Ali Engincer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, terj. Imam Baehaqi. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999)
- Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1989), cet. III, Jld. I
- Bohesti, *Kepemilikan dalam Islam*, Terj. Lukman Hakim dan Ahsin M, Jakarta; Pustaka Hidayah, 1988)
- Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta; Paramadina, 1996)

- Deliannov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, (Pelita III, tahun IV, 1982-1983)
- Don Bellante & Mark Jackon, (Ed. Pratama Raharja), *Ekonomi Ketenagakerjaan; Pasar Kerja dan Distribusi Pendapatan*, (Jakarta; Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1983)
- Edi Suandi Hamid, *Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis dan Restrukturisasi Industri Serta Analisis Pasca Krisis*, Prospek Ekonomi Indonesia Pasca Krisis, diselenggarakan oleh Magister Manajemen dengan ISFI cabang Yogyakarta, (Yogyakarta, 19 April 1999)
- Elizabeth Ellis Hoyt, *The Income of Society; An Introduction to Economic*, (New York; The Ronald Press Company, 1950)
- Faizuz Abasi, *al Qani al Muhit*, (Beirut ; dar al fikr, 1955)
- Fakhr Ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabair wa Mafatih al-Gaib*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1995)
- Farhad Nomani dan Ali Rehnema, *Islamic Economic System*, (malaysia; Business Information Press, 1995)
- Fariad Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomi-ekonomi Makro*, (Yogyakarta; BPFE, Ed. III, cet, I, 1992)
- Fazlur Rahman, *Cita-cita Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000)
- George Soule, *Pemikiran-pemikiran Sarjana-sarjana Besar dalam Ekonomi*, (Jakarta; Pustaka Rakyat, 1958)
- Haribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Praktis*, (Surakarta; Pusat Penelitian UNS, 1998)
- Hendro Basuki, *Ekonomi Amerika dalam Pembinaan*, Suara Merdeka, (No. XLI/14/VI/24 Februari 1993)
- Hillary Clinton, *It Takes a Village*, Alih bahasa Widodo, (Jakarta; Gramedia Pustaka, 1996), Cet. 1
- Ibnu Abd Al-Qowi Al-Mundzeri, *At-Tarhib Wat-Tarhib min Hadits*

- Ibnu Al-Hammam, *Fath al-Qadir fi syarh al hidayah*, (Beirut; Daar al Fikr, 1977); cet. II
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzin*, (Beirut; darul al Ma'rifah, 1987), Jilid III
- Ibnu Manzir, *Lisan Al-Arab*, (Beirut, Daar Sadr, 1990)
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar*, Jilid I, (Jakarta; Kalam Mulia, 1994)
- Imam Brnadib, *Filsafat Pendidikan; Sistem dan Metode*, (Yogyakarta; FKIP, 1987)
- Imam Malik Al Muwatha, *Al-Muwatho* (Mesir; Al-Maktabahat Tijariyah, tt)
- Imamudin Yuliadi, *Metodologi Ekonomi Islam; Utilitas*, (No. 9. Tahun ke-7/1999)
- J. Barkley Rosser, Jr. Marina V. Rosser, *Comparative Economices in A Transforming Woeld Economy*, (USA; Penerbit Mirror Higher Education Group, 1996)
- James Harvei Dood, C.W. Hasek, *Ekonomi Principles and Application*, South Wastern, (New York; Publishing Commpany, 1948)
- Junus Gozali, *Etika Ekonomi Islam*, (Serang; Saydara, 2001)
- Lester Thurow, *The Future of Capitalism*, (London; Nicholas Bearley Publishing, 1996)
- M Rusli Karim (Fd), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana, Yogyakarta P3EI, UII, 1992)
- M. Abd Mun'im Abu Zaid, *Al-Mudarabah wa Tathbiqatiha al-'Amaliyyah fi al-Masarif al-Islamiyyah*, (Kairo; al-Ma'had al 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1996)
- M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Terj. Nastanjim, (Yogyakarta; Dana Bakhti Wakaf, 1997).
- M. Amin Rais, *Cakrawala Islam; Antar Cita dan Fakta*, (Bandung; Penerbit Mizan, 1996)
- M. Dawam Raahardjo (Ed), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, (Jakarta; LP3ES, 1987)

- _____, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta, Penerbit Lembaga Studi Agama dan Filsafat, cet. 1, 1999)
- _____, *Perspektif Deklarasi Makkah; Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung; Penerbit Mizan, 1987)
- M. Husein Sawit, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; perlukah berbeda?*, Dalam Seminar Nasional, yang diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi, (Yogyakarta; Universitas Islam Indonesia, 1997)
- M. Najjullah Siddiqi, *Ekonomi Islam*, terjemahan AM. Saefuddin, (Jakarta; LIPPM kerjasama Media Dakwah, 1986)
- Munrahim Misanam, dalam *Diskusi Panel: Paradigma Ekonomi Islam; Upaya Menyiapkan Konsep Ekonomi Islam Alternatif Merespon Era Globalisasi*, (Yogyakarta; 1998)
- M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terj. Nur Hadi Ishsan & Rifqi Anwar, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999)
- _____, *Islam and Economic Challenge*, (int. Isalaic Pub. House, and the Intern. Institute of Islamic Thought : Herndon VA, 1992)
- M.A. Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Penerjemah Potan Arif Harahap, Jakarta; Internusa, 1992)
- Malik, *al-Muwatta*, terj. Dwi Surya Atmaja (Jakarta; Raha Grafindo Persada, 1999)
- Weber, Normal *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (New York, Charles Scribners Sons, 1958)
- Max Weber, *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*, (Tr. Talcott Parson, Charles Scribner, New York; 1958)
- Misanam Munrahim, MA., Ec, P.hD, dalam *Kuliah Filsafat Ekonomi Islam*, pada tanggal 8-10-1999
- Mohamed Aslam Mohamed Haneef, Islam, *The Islamic Worldview, and Islamic Economics*, Malaysia, IIUM (Journal of Economics & Management 5, No. 1), International Islamic University Malaysia Press, 1997

- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1995)
- _____, *Al-Mizam al Iqtisad, al Islam Nazariah 'Amaliah, al Muslim al Ma'asir*, No. XX (Oktober-Nopember-Desember, 1978)
- Muhammad al Mubaroq, *Nizam al Isqtishad*, (Beirut; Daar al Fikr, 1973)
- Muhammad Faruq dan Nabahan, *Al Ittijah al Jamani fi at Tasyri' al Istisadi al Islami*, (Beirut; Muassasah aAr Risalah, 1984)
- Muhammad Akhyar Adnan, *Analisis SWOT Pengembangan Ekonomi Islam*, makalah STAIN Surakarta, Surakarta, 17 Mei 1998, hal. 1. Baca juga Munrahim Misanam, *Pendekatan Akademik dalam Paradigma Ekonomi Islam*.
- Muhammad al Mubarak, *Nizamul Islam; al Iqtishad*, (Beirut; Darul Fikr, 1972)
- Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)
- Muhammad bin Idris As-Syafi'I, *Ar-Risalah* (Beirut; Dar al-Fikr, tt)
- Muhammad Haslih Kawali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Terj. Noerhadi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996)
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Tinjauan Penulisan Semasa*, terj. Amir Abdullah, Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1989)
- Muhammad Quraish Qhahab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung; Mizan, 1998). Cet. VIII
- Muhammad Qutub, *Haula tatbiq asy-Syari'ah*, (Kairo; Kaktabah as-Sunnah, 1412 H)
- Muhammad Akhyar Adnan, *Sistem Ekonomi Islam Memiliki beberapa Ciri., Kabar Kampus*, (29 Desember 1999)
- Mujamma' Khadim al haramain asy Syarifain, *al Malik Fahdli Thiba'at al Mashaf asy syarif*, (Madinah Munawarah; PO.BOX 3561, 1971)
- Mukhtar Ahmad, *Tujuan Ekonomi Islam*, Jilid II, 1991

- Mumammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1992)
- Munawar Iqbal, (Ed), *Distributive Justice ana fulfilment in an Islamic Economy*, (Islamabad; Leicester, U.K, cet. I, Inetrnational Institute of Islamic Economics and The Islamic Foundation, 1986)
- Munrokhim Misanam, *Pendekatan Akademik dalam Paradigma Ekonomi Islam*, makalah disampaikan pada Diskusi Panel, yang diselenggarakan MSI-UII, LP-UII dengan STAIN Surakarta, (Surakarta; 17 Mei 1998)
- Nik Musthafa Hj. Nik Hasan, *Islam and Justice*, (Malaysia; Institut of Islamic Understanding, 1999)
- Nyang Sulaiman, *The Islamic State and Economic Development a Theoretical Analysis*, Islamic Culture, lt. 1976
- Oskar Lange dan Fred M. Taylor., *Teori Ekonomi Sosialisme*, (Minnesota, USA, 1938), diterjemahkan oleh Drs. Paul Sitohang (Jakarta, Bharata, 1964)
- Peter L. Berger, *The Capitalist Revolution, Fifty Proposition a bout prosperity, Equality and Liberty*, (United States of America, 1986)
- Peter Salim dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta; Modern English Press, 1991)
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung; Mizan, 1999), cet. XIX
- Ralph. H. Bladgett, *Campartive Economic System*, (New York; The Macmillan Company, 1040)
- Robert W. Green, *Protestantism and Capitalism*, The Weber Thesis and His Critics (D.C. Heat and Cimpany, New York)
- Ruslan Abdul Gani, *Harian Merdeka*, (28 Februari 1997)
- S.M. Hasanuzzaman, dalam karangannya, *Definition of Islamic Economics*, Jurnal of Research in Islamic Economics, (vol. 1, No.2/2984)
- Sayyid Quthub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Terj. Afif Muhammad, (Bandung, Pustaka, 1994), cet. II

- Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic of Islam*, Comparative Study, Edisi 1, (Lahore, Pakistan; Ashraf Press, 1947)
- Subekti & Tjitroswdibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1992)
- Suroso Imam Zadjuli, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya; Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 1999)
- Syahid Muhammad Baqir ash-shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002)
- Syauqi Ahmad Dunya, *Sistem Ekonomi Islam sebuah Alternatif*, (Jakarta; Fikahati Miska, 1994)
- Syauqi Al-Fanjari, *Ekonomi Islam Masa Kini*, (Bandung; Mizan, 1988)
- Syed Nawab Haidar Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesa Islami*, (Bandung; Mizan, 1985)
- Syeikh Mahmud Ahmad, *Ekonomi Islam suatu Pengantar*, Comparative Study, Edisi I, (Lahore Pakistan; Ashraf Press, 1947)
- Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, a.l. Maghfur Wachid, (Surabaya; Risalah Gusti, 1996)
- _____, *Nidzom Al-Islam*, (Beirut; Libanon: Darul Ummah, 1953), Cet.V
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), edisi 2, cet. IX
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1982)
- Wahab Az-Zuhaily, *Ushul al Fiqh al Islami*, (Damaskus; Dar al Fikr, 1986), Jilid I
- Warner Sombart, *Capitalism*, dimuat dalam *Encyclopedia of the Social Science*, vol.3-4
- Wiliam Eberstein, Edwain Fogelma dan Alex Jemadu, Alih Bahasa Alex Jemadu, *Isme-isme Dewasa ini*, (Jakarta; Erlangga, 1994), Edisi IX
- Winardi, *Pengantar Sistem-sistem Ekonomi*, (Bandung; Alumni, 1984)

Yusuf al- Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, (Beirut; Muassasah ar Risalah, 1991), cet. XX

_____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997)

Yusuf Qardlahi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1997)

_____, *Musykilah al-Fiqr wa kaifa 'Ala Jaha Al Islam*, (Mesir, Maktabah Wahabah, 1975)

Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1979)

Zimbakst Andres, Howard J. Sherm, *Stuart Brown Comparing Economics Syistem a Political-Economic Opproach*, Edisi 2 (Harcourt Broce Javanovindi Sandiago, 1989)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN :

AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

No	Ayat / Hadits	BAB	Hal
1.	H.R. Malik : لأن يأخذ أحدكم حبله فيحطب على ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه.	II	19
2.	Q.S. Al-Baqarah ayat 29 : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...	II	78
3.	Q.S. Al-Baqarah ayat 284 : لِلَّهِ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ...	II	78
4.	H.R. Abu Dawud : من أحيأ أرضا ميتة فهي له	II	80
5.	H.R. Ahmad dan Abu Dawud : الناس شركاء في ثلاثة في الكلاء والماء والنار	II	80
6.	Q.S. Qof ayat 30 : يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ.	II	84
7.	Q.S. Al-Qosos : وابتغ فيما أتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين	II	86
8.	Q.S. At-Taubah ayat 34 : ياايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياءكلون اموال الناس بالباطل وصدون عن سبيل	III	98

	الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعباب اليم		
9.	Q.S. Al-Maidah ayat 7 : واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذقلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بدات الصدور.	III	101
10.	Q.S. Ar-Ruum ayat 30 : فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدل خلق الله ذلك الذين القيم ولمن اكثر الناس لا يعلمون	III	102
11.	Q.S. Luqman ayat 20 : الم تروا ان الله سخر لكم ما في السموت وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرا وباطنة	III	102
12.	Q.S وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا	III	103
13.	Q.S ...وَاَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِى اَتَاكُمْ...	III	103
14.	Q.S وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا ئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...	III	105
15.	H.R. Baihaqi : ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة متواليه ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يؤثر على نفسه (رواه البيهقى)	III	118

16.	H.R. Abu Yu'la : ما قل وكفى خير مما كثر والهوى	III	119
17.	Q.S. An-Nisa ayat 90 : ان الله يأمر بالعدل والإحسن وإيتائى ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر واليغى	IV	142
18.	Q.S. An-Nisa ayat 90 : ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .	IV	142
19.	Q.S وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا	IV	149
20.	Q.S يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاصٍ مِنْكُمْ	IV	178
22.	Q.S أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ	IV	181
23.	Q.S يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ	IV	182
24.	Hadits مَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنَةً فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَةٌ.	IV	182
25.	Hadits لا تجتمع أمتى على ضلالة	IV	182

26.	Q.S. An-Nisa ayat 59 : فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ	IV	186
-----	--	----	-----



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nihayatul Maskuroh, anak ke tiga dari delapan bersaudara. Adalah putri Prof. DR. H.M. Junus Gozali dan Hj. Mamduchah. Dilahirkan di Serang pada tanggal 12 Pebruari 1964. Bersauamikan dr. Hikmat Sumantri dan berputra Afiyatul Mardiyah dan Subaihati Nur Rahmadini.

Dalam proses pendidikan, pendidikan tingkat Dasar diselesaikan pada SDN II Cilegon pada tahun 1976. Pendidikan tingkat menengah diselesaikan di SMPN I Cilegon pada tahun 1979. Pendidikan tingkat atas diselesaikan di SMAN Serang pada tahun 1982. Dan, pada tahun 1989 penulis menyelesaikan pendidikan tinggi sarjana di IAIN “Sunan Gunung Djati” Bandung.

Pengabdian penulis pada dunia pendidikan selama ini, yakni sebagai dosen di IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten sejak tahun 1990 sampai sekarang, Ketua Program Studi Tafsir Hadits Jurusan Ushuluddin STAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” Serang sejak tahun 2002 hingga 2005, serta sebagai Ketua Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten sejak tahun 2006 sampai sekarang.